



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)



TAHUN
**20
25**

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI KELAS I B

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto,
Kel. Mulya Agung, Kec. Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin,
Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos 30911.



(0711) 5252010



@pn-pangkalanbalai



PNPangkalanBalai



pn.pangkalanbalai@gmail.com



@pn-pkb



Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



pn.pangkalanbalai.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI KELAS I B

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Jalan Jaksa Agung
R.Soeprapto, Kel. Mulya Agung, Kec. Banyuasin III, Kabupaten
Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos 30911.

| No. Telepon : (0711) 5252010 | Email : pn.pangkalanbalai@gmail.com |

| Website : pn.pangkalanbalai.go.id | Instagram : @pn-pangkalanbalai |

| Twitter / X : @pn-pkb | Youtube : PNPangkalanBalai |

| Facebook : Pengadilan Negeri Pangkalan Balai |



**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI KELAS IB
TAHUN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Pangkalan Balai, 2 Februari 2026

Pereviu II

Eunike Mayerni Batubara, A.Md

Pereviu I

Muhammad Iman Septian, S.Ip

CHEKLIST REVIU

No.	Pernyataan	Check List
1. Format.	1) Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP.	√
	2) LKj telah menyajikan informasi target kinerja.	√
	3) LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai.	√
	4) Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	√
	5) Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	√
	6) Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	√
2. Mekanisme Penyusunan.	1) LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	√
	2) Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai.	√
	3) Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKjIP.	√
	4) Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data / informasi di setiap unit kerja.	√
	5) Data / informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.	√
	6) Analisis / penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.	√
	7) LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	√



No.	Pernyataan	Check List
3. Substansi.	1) Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
	2) Tujuan / sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.	√
	3) Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja.	√
	4) Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.	√
	5) Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	√
	6) IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan / sasaran.	√
	7) IKU dan IK telah SMART.	√

Pangkalan Balai, 2 Februari 2026

Pereviu II

Eunike Mayerni Batubara, A.Md

Pereviu I

Muhammad Iman Septian, S.Ip

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025 telah selesai disusun. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kepada berbagai pihak, *stakeholder* dan masyarakat yang berkepentingan terhadap Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selama tahun 2025.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Pangkalan Balai Tahun 2025 wajib dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

Penyajian data dan informasi seluruh aktifitas, sasaran kerja dan capaian kegiatan yang tersaji dalam LKjIP ini adalah merupakan gambaran akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selama tahun Anggaran 2025.



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Pangkalan Balai Tahun 2025 ini diharapkan dapat sebagai masukan baik itu kepada Pimpinan atau lainnya guna meningkatkan akuntabilitas kinerja Pengadilan Pangkalan Balai kedepannya sehingga juga kedepannya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat terus melanjutkan cita-cita Mahkamah Agung RI menuju peradilan yang agung.

Pangkalan Balai, 2 Februari 2026

**KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
KELAS IB**



FITRI AGUSTINA, S.H., M.H.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program yang dilaksanakan oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), serta surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025, Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai terus berupaya untuk menyajikan laporan yang akuntabilitas, karena dengan mewujudkan LKJIP yang proporsional dan professional akan semakin transparan dalam mempertanggung jawabkan kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025. Dengan berakhirnya Periode 2025, maka Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berupaya menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim penyusun LKjIP. Data kinerja yang menjadi acuan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2025 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk berikutnya. Sebagai bentuk kesadaran dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

**TABEL CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BALAI TAHUN 2025**

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	92	82	89
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.	100	100	100
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	10	8	80



No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding.	95	84	88
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	85	N/A	N/A
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	90	N/A	N/A
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100	100	100
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.	100	100	100
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.	100	100	100

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	14	10	71
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi).	40	6	15
RATA-RATA CAPAIAN				74	

Tabel 1. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025 dengan Penyesuaian RENSTRA Mahkamah Agung Tahun 2020-2024

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025 merupakan pencapaian atas target kinerja pertama dari Renstra Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2020-2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Analisa capaian data di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam laporan ini.

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peradilan yang Efektif, Transparan, Responsif dan Modern.	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	97%	96%	98,97%
		b. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	99.80%	100%	100%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%	100%	100%
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	99.80%	100%	100%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100%	100%	100%
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	60%	60%	100%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	13%	13%	100%
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	12%	13%	108%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	2%	N/A	N/A
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.	100%	100%	100%
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	100%	100%	100%
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	4	4	100

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	92	90	97,82
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01).	88	97	110
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03).	88	93	105
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01).	86	100	116
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03).	86	85	98,83
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	4	2,95	73,75
TOTAL CAPAIAN				97,51	

Tabel 2. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025 dengan Penyesuaian RENSTRA Mahkamah Agung Tahun 2025-2029

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025 merupakan pencapaian atas target kinerja pertama dari Renstra Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2020-2024 dan juga penyesuaian atas Renstra Mahkamah Agung RI Tahun 2025-2029 yang mana disesuaikan dengan Renstra Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025-2029. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Analisis capaian data di atas akan dijabarkan lebih lanjut dalam laporan ini.



DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI KELAS I B TAHUN 2025.....	ii
CHECKLIST REVIU.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	vii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GRAFIK.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
1.2.1. Tugas Pokok.....	4
1.2.2. Fungsi.....	5
1.3. Struktur Organisasi.....	6
1.4. Isu Strategis.....	19
1.4.1. Inovasi Pelayanan Publik.....	19
1.4.2. Penyelesaian Perkara.....	23
1.4.3. Keterbukaan Informasi.....	23
1.4.4. Penyerapan Anggaran.....	26
1.5. Sistematisasi Pelaporan.....	27
BAB II PERENCANAAN PENETAPAN KINERJA.....	28
2.1. Latar Belakang.....	28
2.1.1. Visi dan Misi.....	28
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	29
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas 1B.....	31
2.3. Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas 1B.....	33
2.4. Rencana Kinerja Tahun 2025 Sebelum Revisi.....	36



2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum Revisi.....	38
2.6. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025.....	43
2.7. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	46
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	54
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	54
3.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	57
3.1.2. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	108
3.2. Realisasi Anggaran.....	112
3.2.1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.....	114
3.2.2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum.....	115
3.3. Evaluasi Oleh Pengadilan Tinggi Palembang.....	117
3.4. Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Pertama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Palembang.....	118
3.5. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024.....	121
BAB IV PENUTUP.....	127
4.1 Kesimpulan.....	127
4.2 Rekomendasi.....	128
LAMPIRAN.....	xxiii



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025 dengan Penyesuain RENSTRA Mahkamah Agung Tahun 2020-2024	viii
Tabel 2.	Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025 dengan Penyesuain RENSTRA Mahkamah Agung Tahun 2025-2029	xi
Tabel 1.1.	Capaian anggaran Tahun 2025 Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB	27
Tabel 1.2.	Sistematika Laporan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB	27
Tabel 2.1	Tabel Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 T.A. 2025 Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB	30
Tabel 2.2	Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)	31
Tabel 2.3	Tabel Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU)	33
Tabel 2.4	Tabel Rencana Kinerja Tahun 2025 Januari s.d September (Triwulan III)	37
Tabel 2.5	Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum Revisi	39
Tabel 2.6	Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum Revisi disertai Capaian Akumulasi hingga September Tahun 2025 (Triwulan III)	41
Tabel 2.7	Tabel Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB	43
Tabel 2.8	Tabel Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB	46
Tabel 2.9	Tabel Anggaran Awal dan Anggaran Revisi Akhir Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB	47
Tabel 2.10	Tabel Revisi Perjanjian Kinerja Berikut Realisasi dan Capaiannya Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB	49
Tabel 2.11	Tabel Anggaran Awal dan Anggaran Revisi Akhir Tahun 2025 dengan Kolom Capaian Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB	53



Tabel 3.1.	Tabel Capaian Kinerja Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB Tahun 2025	55
Tabel 3.2.	Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu pada Tahun 2025	60
Tabel 3.3.	Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu pada Periode Tahun 2020.s.d 2025	60
Tabel 3.4.	Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Periode Januari s.d Desember Tahun 2025	61
Tabel 3.5.	Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Periode Januari s.d Desember Tahun 2025	62
Tabel 3.6.	Persentase Perkara yang diselesaikan / Putus Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak Tahun 2025	64
Tabel 3.7.	Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan / Putus Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak Tahun 2025	64
Tabel 3.8.	Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan / Putus Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak Tahun 2025	65
Tabel 3.9.	Jumlah Putusan dan Salinan Putusan Perdata yang dikirim Para Pihak Selama Tahun 2020 s.d 2024	65
Tabel 3.10.	Jumlah Putusan dan Salinan Putusan Pidana yang diterima Oleh Para Pihak Selama Tahun 2020 s.d 2024	65
Tabel 3.11.	Persentase Jumlah Penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	66
Tabel 3.12.	Data Jumlah Petikan atau Amar Perkara Pidana Tahun 2025	68
Tabel 3.13.	Data Jumlah Petikan atau Amar Perkara Perdata Tahun 2025	69
Tabel 3.14.	Persentase Jumlah Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Perkara Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak	69
Tabel 3.15.	Data Jumlah Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, PK Tahun 2025	72



Tabel 3.16.	Data Jumlah Putusan Pengadilan yang diunggah di Direktori Putusan Tahun 2025	75
Tabel 3.17.	Jumlah Putusan Pengadilan yang diunggah di Direktori Putusan Tahun 2020 s.d 2024	76
Tabel 3.18.	Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata dari Tahun 2020 s.d 2025	78
Tabel 3.19.	Penyelesaian Perkara Restoratif Justice Pada Tahun 2025	80
Tabel 3.20.	Pengukuran Jumlah Perkara yang Berhasil diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2020 s.d 2025	81
Tabel 3.21.	Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi Pada Tahun 2025	82
Tabel 3.22.	Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi Pada Tahun 2020 s.d 2025	83
Tabel 3.23.	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Pada Tahun 2020 s.d 2025	85
Tabel 3.24.	Jumlah Perkara Perdata E-Court Pada Tahun 2025	87
Tabel 3.25.	Jumlah Perkara Pelimpahan Pidana E-Berpadu Perbulan Pada Tahun 2025	89
Tabel 3.26.	Jumlah Layanan Perkara Pidana yang diajukan Secara Elektronik	92
Tabel 3.27.	Kategori Mutu Pelayanan	95
Tabel 3.28.	Indeks Kepuasan Masyarakat Periode Tahun 2020 s.d 2025	96
Tabel 3.29.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satker Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB Tahun 2025	98
Tabel 3.30.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 dan DIPA 03 Tahun 2025	102
Tabel 3.31.	Nilai Indikator Perencanaan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 Tahun 2025	105



Tabel 3.32.	Tabel Target, Realisasi Serta Capaian dari Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025	107
Tabel 3.33.	Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	112
Tabel 3.34.	Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum	113
Tabel 3.35.	Tabel Perincian Penyerapan Anggaran Dipa 01 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025	114
Tabel 3.36.	Tabel Perincian Sisa Anggaran Dipa 01 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025	115
Tabel 3.37.	Tabel Perincian Penyerapan Anggaran Dipa 03 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025	115
Tabel 3.38.	Tabel Perincian Sisa Anggaran Dipa 03 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025	116
Tabel 3.39.	Hasil Evaluasi SAKIP Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2024	118
Tabel 3.40.	Tabel Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Pertama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Palembang	120
Tabel 3.41.	Tabel Rekomendasi Serta Tindak Lanjut dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2024	125



DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1.	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 3 pada Tahun 2025	70
Grafik 3.2.	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 4 pada Tahun 2025	73
Grafik 3.3.	Jumlah Putusan Pengadilan yang diunggah Di Direktori Putusan pada Tahun 2025	75
Grafik 3.4.	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 4 Indikator 6 Tahun 2020 s.d 2025	78
Grafik 3.5.	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 8 Tahun 2020 s.d 2025	83
Grafik 3.6.	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 11 Tahun 2025	90
Grafik 3.7.	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 12 Tahun 2025	93
Grafik 3.8.	Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator 1 Tahun 2025	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Wilayah Administrasi Banyuasin	2
Gambar 1.2.	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	7
Gambar 1.3.	Tampilan Aplikasi Siamor	20
Gambar 1.4.	Tampilan Aplikasi Monalisa	21
Gambar 1.5.	Tampilan Siperkum pada Youtube	22
Gambar 1.6.	Tampilan Viladifa pada Youtube	22
Gambar 1.7.	Monev keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025	24
Gambar 1.8.	Lanjutan Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025	25
Gambar 1.9.	Tabel Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menduduki peringkat II	26
Gambar 3.1.	Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Januari s.d Desember 2025 (Melalui Aplikasi Siamor)	61
Gambar 3.2.	Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Januari s.d Desember 2025 (Melalui Aplikasi Siamor)	62
Gambar 3.3.	Perkara BHT yang ditindaklanjuti untuk di Eksekusi	77
Gambar 3.4.	Keadaan Diversi Perkara Anak Pada Tahun 2025	85
Gambar 3.5.	Monitoring IPASN melalui Aplikasi Sikep Periode 2025	99
Gambar 3.6.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)	102
Gambar 3.7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)	102
Gambar 3.8.	Nilai Indikator Perencanaan Anggaran DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) Tahun 2025	105
Gambar 3.9.	Nilai Indikator Perencanaan Anggaran DIPA 03 (Badan Peradilan Umum) Tahun 2025	105
Gambar 3.10.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025	107

BAB I PENDAHULUAN

**PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BALAI KELAS I B**

(0711) 5252010
pn.pangkalanbalai@gmail.com
pn.pangkalanbalai.go.id

**LKJIP
2025**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun kegiatan. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahunan merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai selama periode 2025 juga tidak lepas menghadapi beberapa kendala baik teknis maupun non-teknis antara lain :

1. Masih kurangnya jumlah hakim dan panitera pengganti, yang mana ditambah dengan jadwal persidangan yang padat, otomatis menghambat dalam waktu penyelesaian persidangan atau perkara.
2. Kurangnya ASN golongan II terutama untuk ditempatkan sebagai operator dan petugas register.
3. Kurangnya anggaran baik dipa dari Badan urusan Administrasi (DIPA 01) maupun dari Badan Peradilan Umum (DIPA 03) guna menunjang operasional. Hal tersebut seringkali mengharuskan satuan kerja untuk merevisi anggaran baik tersebut antar komponen maupun antar satker dan juga mengajukan Anggaran Tambahan Belanja (ABT) untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor.

Gambar 1.1. *Peta Wilayah Administrasi Banyuwasin*

Luas Kabupaten Banyuasin 11.875 km² di mana terdapat beberapa suku yang menetap di Kabupaten ini, antara lain Jawa, Madura, Bugis, Bali dan Penduduk asli Melayu Banyuasin (Melayu Pesisir). Batas Wilayah banyuasin mengelilingi 2/3 wilayah kota Palembang, sehingga banyuasin dapat dikatakan sebagai wilayah penyangga ibu kota provinsi Sumatera selatan. Kabupaten Banyuasin memiliki 21 kecamatan, 16 kelurahan dan 288 desa (dari total 236 kecamatan, 386 kelurahan dan 2.853 desa di seluruh Sumatra Selatan). Pada tahun 2022, jumlah penduduknya sebesar 878.154 jiwa dengan luas wilayahnya 11.832,99 km² dan sebaran penduduk 68 jiwa/km².

Dengan wilayah hukum yang cukup besar, sebagai satuan kerja pemerintahan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tentunya memiliki tanggung jawab mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi instansi pemerintahan dalam menyalurkan aspirasi publik dan menjalankan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas- asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara / Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 005/SEK/01/2010 tanggal 13 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor : B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi

1.2.1. Tugas Pokok

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai masuk dalam lingkup peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai



sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Palembang yang menjadi kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

1.2.2. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Pangkalan Balai antara lain :

- a. **Fungsi Mengadili (*Judicial Power*)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- b. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut Teknis Yudisial, Administrasi Peradilan, maupun Administrasi Umum / Perlengkapan, Keuangan, dan Kepegawaian.
- c. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum / perlengkapan).

- f. Fungsi Lainnya :** Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset / penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas - luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011** tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI **Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007** tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan.**

1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai suatu tujuan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur organisasi Pengadilan Negeri. Bagan Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TAHUN 2025



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi struktur organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut :

1. KETUA PENGADILAN

- a. Ketua dan Wakil Ketua bersama-sama memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan secara baik dan lancar.
- b. Membuat:
 1. Perencanaan (*planning, programming*) dan perorganisasian (*organizing*).
 2. Pelaksanaan (*implementation dan executing*)
 3. Pengawas (*evaluation dan controlling*) yang baik, serasi dan selaras.



- c. Melaksanakan pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua serta bekerja sama dengan baik.
- d. Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesama pejabat / petugas yang bersangkutan.
- e. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin / pembangunan.
- f. Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta pejabat struktural, dan sekurang-kurang sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.
- g. Membuat / menyusun legal data tentang putusan-putusan perkara yang penting.
- h. Memerintahkan, memimpin dan mengawasi eksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- i. Mengaktifkan Majelis Kehormatan Hakim.
- j. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan, baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.
- k. Melakukan pengawasan intern.
 - Intern : Pejabat peradilan, keuangan dan material.
- l. Menugaskan hakim untuk membina dan mengawasi bidang hukum tertentu.
- m.
 1. Melakukan Evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan.
 2. Melaporkan evaluasi atas hasil Pengawasan dan penilaiannya Mahkamah Agung.
 3. Mengawasi pelaksanaan court calender dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada dasarnya harus diputus dalam waktu 6 bulan

dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.

4. Mempersiapkan Kader dalam rangka menghadapi alih generasi.
- n. Melakukan pembinaan terhadap Dharmayukti Karini, IKAHI, Koperasi dan PTWP.
- o. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerja sama dengan instansi-instansi lain serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.
- p. Memperhatikan keluhan - keluhan yang timbul dari masyarakat dan menanggapi bila dipandang perlu.

2. WAKIL KETUA PENGADILAN

- a. Membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasian.
- b. Mewakili ketua bila berhalangan.
- c. Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua.
- d. Melakukan pengawasan intern untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas telah dikerjakan sesuai dengan rencana kerjadan ketentuan yang berlaku serta melaporkan hasil pengawasan tersebut kepada Ketua.

3. HAKIM

- a. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas, umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.

- c. Pengadilan Negeri melakukan pengawasan dan pengamatan (KIMWASMAT) terhadap pelaksanaan putusan pidana di Lembaga Permasyarakatan dan melaporkannya kepada Mahkamah Agung.

KEPANITERAAN

1. PANITERA

- a. Membantu Pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Mengatur pembagian tugas pejabat kepaniteraan.
- c. Membantu pimpinan pengadilan dalam pembinaan pegawai.
- d. Membantu hakim dalam persidangan perkara pidana dan perdata.
- e. Panitera dengan dibantu oleh Panitera Muda menyelenggarakan administrasi mengenai jalannya perkara pidana dan perkara perdata dan situasi keuangan perkara perdata.
- f. Bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat - surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- g. Membuat akta dan salinan putusan.
- h. Menerima dan mengirim berkas perkara.
- i. Melaksanakan Eksekusi putusan perkara perdata.
- j. Menyelenggarakan pendaftaran Badan Hukum Perseroan terbatas, Perseroan Commanditer dan Yayasan.
- k. Menerima dan mendatangi pendaftaran surat kuasa, melegalisasi surat - surat bukti perkara yang diajukan kepersidangan.
- l. Meneliti dan mengoreksi Konsep surat yang diajukan bawahan.
- m. Membuat dan Menandatangani Daftar penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bawahan.



2. PANITERA MUDA PIDANA

- a. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Membantu panitera dalam menyelenggaraan administrasi perkara dan pengolahan penyusunan laporan perkara perdata.
- c. Mengkoordinir / membagi tugas urusan perdata untuk diberikan kepada bawahan.
- d. Melaksanakan tugas administrasi perkara perdata, menerima dan memberi nomor register pada setiap perkara perdata yang diterima serta mencatatnya dalam register perdata.
- e. Menyiapkan berkas perkara banding / kasasi untuk dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung.
- f. Menyerahkan Arsip berkas perkara ke Panitera Muda Hukum.
- g. Membantu Hakim dalam persidangan perkara pidana dan perkara perdata.
- h. Meneliti mengoreksi konsep surat yang diajukan bawahan.

3. STAF PANITERA MUDA PIDANA

- a. Pemegang buku register perkara singkat.
- b. Pemegang buku register perkara lalu lintas dan perkara cepat.
- c. Pemegang buku register penyitaan.
- d. Pemegang buku register pengeledahan.
- e. Pemegang buku register praperadilan.
- f. Menyiapkan dan membuat laporan bulanan.
 1. Laporan Keadaan perkara pidana.
 2. Laporan Jenis perkara pidana.
- g. Menyiapkan dan membuat laporan bulanan.
 1. Laporan perkara banding.
 2. Laporan perkara kasasi.
 3. Laporan perkara PK.



4. Laporan perkara yang terdakwa mengajukan Grasi / Remisi.
- h. Menyiapkan dan membuat laporan Semester.
 1. Laporan kegiatan hakim.
 2. Laporan pelaksanaan tugas Hakim.
- i. Kearsipan :
 1. Berkas perkara yang masih aktif dan yang telah diminutasi.
 2. Surat - surat lainnya yang berhubungan dengan kepaniteraan pidana.

4. PANITERA MUDA PERDATA

- a. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara pidana dan pengelolaan penyusunan laporan perkara pidana.
- c. Menyerahkan arsip berkas perkara ke Panitera Muda Hukum.
- d. Membantu Hakim dalam persidangan Perkara Pidana dan perkara perdata.
- e. Mengelola keuangan Perkara Pidana, Uang bantuan Hukum dan uang jaminan penangguhan penahanan.
- f. Meneliti dan mengoreksi konsep surat yang diajukan bawahan.

5. STAF PANITERA MUDA PERDATA

- a. Menerima bukti setoran panjar biaya perkara dan membuat SKUM.
- b. Menyerahkan bukti setoran panjar biaya perkara Perdata.
- c. Membukukan uang panjar biaya perkara kedalam buku jurnal yang bersangkutan.
- d. Menerima dan membukukan kwintansi pengeluaran kedalam buku jurnal yang bersangkutan.
- e. Menginput semua transaksi kedalam SIPP.

- f. Menyetor biaya PNPB kepada bendahara penerima.
- g. Melaksanakan tugas-tugas sesuai standard SOP.
- h. Menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan tingkat pertama, Banding, kasasi, PK maupun salinan penetapan kepada yang berkepentingan.
- i. Menerima dan memberikan tanda terima : Memori banding, Kontra memori banding, Memori kasasi, Kontra memori kasasi, Jawaban / tanggapan atas alasan PK.

6. PANITERA MUDA HUKUM

- a. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengelolaan penyusunan laporan perkara.
- c. Menerima dan mengarsipkan berkas perkara yang sudah non aktif.
- d. Membantu Hakim dalam persidangan perkara pidana dan perkara perdata.
- e. Melakukan pendaftaran Badan Hukum berupa PT, CV, Firma dan Yayasan serta badan hukum lainnya.
- f. Meneliti dan mengoreksi konsep surat yang diajukan bawahan.

7. STAF PANITERA MUDA HUKUM

- a. Menyenggarakan pendaftaran Badan - Badan Hukum PT, CV, Firma, dan Yayasan.
- b. Mendata dan menyusun arsip berkas perkara pidana dan perdata.
- c. Membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- d. Mengelola dan menyajikan data / dokumentasi Pengadilan.



8. PANITERA PENGGANTI

Membantu Hakim dalam persidangan perkara perdata dan pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

9. JURUSITA

- Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera dalam hal perkara perdata.
- Menyampaikan pengumuman - pengumuman, teguran - teguran, protes - protes, dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara - cara berdasarkan ketentuan undang - undang.
- Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas - batas tanah yang disita beserta surat - suratnya yang sah apabila menyita tanah.
- Membuat berita Acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak - pihak yang berkepentingan.
- Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya.
- Melaksanakan tugas lainnya yang berkenaan dengan kejurusitaan.

KESEKRETARIATAN

1. SEKRETARIS

- Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- Mengatur pembagian tugas pejabat Kesekretariatan.
- Membantu pimpinan pengadilan dalam pembinaan pegawai.
- Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Mengkoordinir para Kepala Sub. Bagian serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan.



- e. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung Jawab atas pengelolaan dan penggunaan anggaran.
- f. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).
- g. Meneliti dan mengoreksi Konsep surat yang diajukan bawahan.
- h. Membuat dan Menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bawahan.

2. KASUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

- a. Membantu Pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasian.
- b. Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi Keuangan.
- c. Membagi tugas urusan keuangan untuk diberikan kepada para staf.
- d. Meneliti berkas tagihan pemeliharaan peralatan kantor / langganan daya dan jasa untuk mendapatkan penyelesaian.
- e. Menyusun konsep surat tanggapan yang berkaitan dengan anggaran rutin dalam rangka meminta data keuangan.
- f. Meneliti kelengkapan dan kebenaran SPP.
- g. Menelitian kelengkapan dan kebenaran register penutupan KAS.
- h. Meneliti SPJ penggunaan anggaran rutin sesuai dengan bukti pengeluaran.
- i. Menyelesaikan surat-surat yang berkenaan dengan pinjaman untuk ditandatangani oleh ketua Pengadilan Negeri.
- j. Menyelesaikan administrasi Bantuan Hukum bagi mereka yang tidak mampu.
- k. Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi Umum.
 - 1. Membagi tugas urusan Umum untuk diberikan kepada para staf.
- m. Mengkoordinir surat masuk dan surat keluar.
- n. Membuat daftar Inventaris Ruangan.
- o. Menyelenggarakan kearsipan surat.
- p. Meneliti dan mengoreksi konsep surat yang diajukan bawahan.

- q. Menyelenggarakan pemeliharaan alat, perlengkapan kantor, gedung dan rumah dinas.
- r. Membuat dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bawahan.

3. STAF KASUB KEUANGAN (BENDAHARA)

- a. Melaksanakan tugas perbedaharaan bersumber dari pelaksanaan APBN.
- b. Mengajukan SPP Pembayaran langsung, SPP Penyediaan Dana UYHD (SPP-DU), SPP Penggantian Dana UYHD (SPP-DU) dan SPP Tambahan UYHD (SPP-TU).
- c. Mengadakan pembukuan atas pengeluaran dana UYHD kedalam buku kas umum Tabelaris dan Pembantu setiap MAK.
- d. Mencairkan uang sesuai SP2D yang diterima.
- e. Laporan untuk pertanggung jawaban setiap pengeluaran dana UYHD.
- f. Menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas.
- g. Melakukan pemotongan PPH atas Pengeluaran dana UYHD.

4. STAF KASUB UMUM

- a. Menerima dan membukukan surat masuk dan keluar
- b. Mengirim surat-surat dinas
- c. Menyampaikan surat masuk kebagian masing-masing.
- d. Membantu membuat daftar inventaris ruangan.
- e. Membantu membuat kartu inventaris barang.
- f. dan tugas yang diberikan kepadanya.

5. KASUB KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

- a. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.



- b. Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi Kepegawaian.
- c. Membagi tugas urusan Kepegawaian untuk diberikan kepada para staf.
- d. Menyusun data kepegawaian untuk mengikuti ujian dinas dan diklat.
- e. Mengusulkan pemberian penghargaan tanda kehormatan.
- f. Menyusun Bezetting dan DUK.
- g. Melakukan permintaan KARPEG, KARSIS, KARSU DAN TASPEN.
- h. Menyelenggarakan sumpah PNS, pelantikan dan sumpah Jabatan.
- i. Mengusulkan Kenaikan pangkat pegawai / jabatan struktur dan fungsional.
- j. Mengusulkan dan menyelenggarakan administrasi mutasi pegawai.
- k. Mengusulkan pemberhentian dan pensiun pegawai.
- l. Menyiapkan dan menyusun laporan kepegawaian .
- m. Meneliti dan mengkoreksi konsep surat yang diajukan bawahan.
- n. Membuat dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) bawahan.

6. STAF KASUB KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

- a. Mengerjakan *Bezetting*, DUK, Surat Pernyataan menduduki jabatan.
- b. Membuat usul kenaikan pangkat, Kenaikan gaji berkala.
- c. Mengerjakan usul permintaan Karis dan Karsu.
- d. Mengerjakan usul mutasi, Menyiapkan Penyumpahan PNS, Jabatan.
- e. Mengerjakan daftar Hadir Pegawai.
- f. Mengerjakan Surat Izin cuti Pegawai.
- g. Mengerjakan Permintaan Askes, Karpeg, Taspen.
- h. Mengerjakan usul pemberhentian Pegawai dan pensiun.
- i. Mengerjakan surat permintaan Pengujian kesehatan bagi para CPNS dan tugas lain yang diberikan kepadanya.

7. KASUB PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN

- a. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran.
- d. Melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi.
- e. Mengupload segala bentuk laporan dan berita ke dalam *website*.
- f. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur *hardware*, meliputi server, komputer dan perangkat pendukungnya.
- g. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer.
- h. Melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi.
- i. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan teknologi informasi.
- j. Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan dan LKJIP.

8. STAF KASUB PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PELAPORAN

- a. Melaksanakan pembuatan Renstra, Rencana Kerja Tahunan dan Program kerja.
- b. Menginput rencana anggaran yang telah disusun kedalam aplikasi RKA-KL.
- c. Membuat laporan realisasi anggaran secara manual.
- d. Mengelola surat masuk dan surat keluar bagian PTIP.
- e. Melaksanakan pembuatan Laporan LKJIP.
- f. Melaksanakan pembuatan Laporan Tahunan.
- g. Melaksanakan pembuatan Laporan Keuangan.
- h. Mengupload segala bentuk laporan dan berita kedalam *website*.
- i. Melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi.

- j. Membantu pelaksanaan sinkronisasi dan backup Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- k. Membantu pelaksanaan update aplikasi yang berkaitan dengan pelayanan publik.
- l. Melaksanakan pengelolaan infrastruktur hardware meliputi server, komputer dan perangkat pendukungnya.
- m. Membantu pelaksanaan update aplikasi yang berkaitan dengan pelayanan publik.

1.4. Isu Strategis

Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan / keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Berikut isu strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas 1B Tahun 2025.

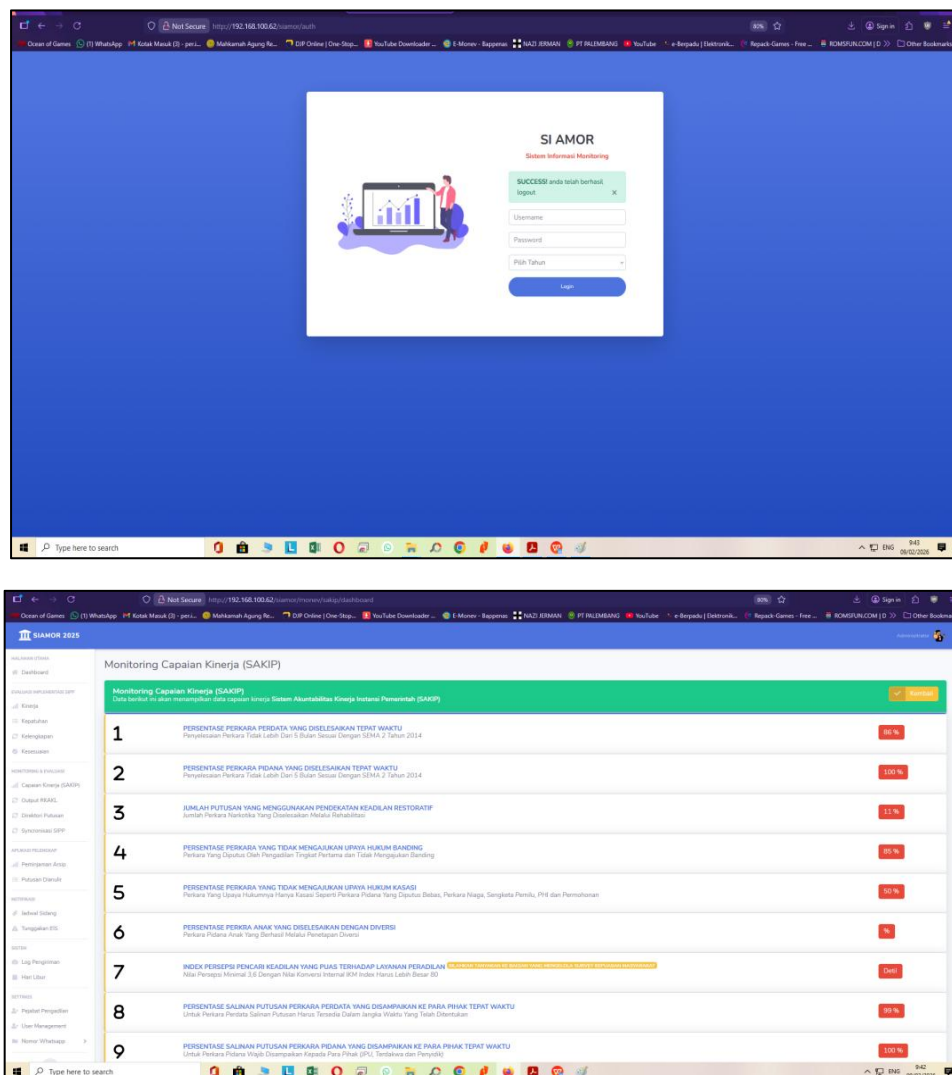
1.4.1. Inovasi Pelayanan Publik

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas 1B selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan publik sesuai dengan peraturan dan sistem yang berlaku. Transparansi peradilan adalah salah satu bentuk dari keterbukaan informasi publik. Secara teknis, salah satu bentuk transparansi peradilan adalah kemudahan mengakses informasi terkait perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan kemudahan mendapatkan informasi putusan melalui Direktori Putusan. Hal lain yang dilakukan adalah dengan kemudahan akses pendaftaran perkara dan layanan pengadilan lainnya melalui aplikasi e-court, Era-Terang, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB juga melahirkan beberapa inovasi yang berguna untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap kebutuhan informasi dan percepatan perkara para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai serta peningkatan kinerja bagi Pengawai Pengadilan Negeri Palembang. Aplikasi tersebut antara lain :

A. Aplikasi Siamor (Sistem Informasi Monitoring)

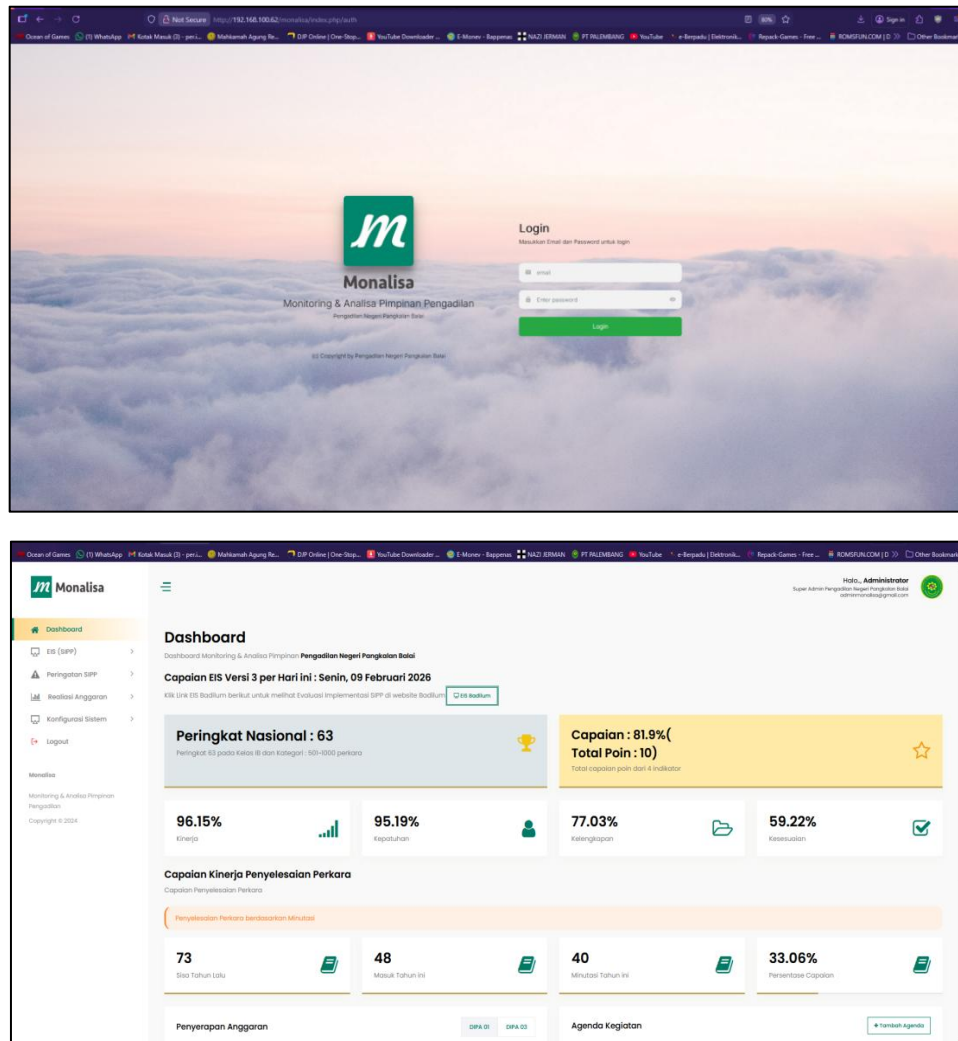
Merupakan aplikasi yang terpasang pada server / aplikasi lokal yang mana berfungsi sebagai salah satu media bagi pimpinan dalam mengawasi kinerja penyelesaian perkara serta dampaknya capaian kinerja.



Gambar 1.3. Tampilan Aplikasi Siamor

B. Aplikasi Monalisa (Monitoring & Analisa Pimpinan Pengadilan)

Merupakan aplikasi yang bersifat lokal hasil kerjasama dengan Pengadilan Negeri Klaten yang mana dalam hal fungsi, hampir sama dengan aplikasi Siamor, tetapi lebih mendetail dan sudah terdapat menu realisasi anggaran. Aplikasi ini juga sangat membantu pimpinan dalam memantau kinerja baik kepaniteraan maupun kesekretariatan.



Gambar 1.4. Tampilan Aplikasi Monalisa

C. Siperkum (Informasi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum)

Merupakan Vidio layanan atau informasi mengenai mekanisme pelayanan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai khusus bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Vidio layanan ini dapat diakses pada Channel youtube Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan judul **SIPERKUM (Informasi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum) Berdasakan PERMA No.3 Tahun 2017.**



Gambar 1.5. Tampilan Siperkum pada Youtube

D. VILADIFA (Vidio Layanan Ramah Difabel)

Merupakan vidio layanan yang mana dapat memanfaatkan media elektronik khususnya youtube berisikan kumpulan layanan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang dilengkapi basa isyarat sehingga dapat dipahami oleh pengguna khusus layanan.



Gambar 1.6. Tampilan Viladifa pada Youtube

1.4.2. Penyelesaian Perkara

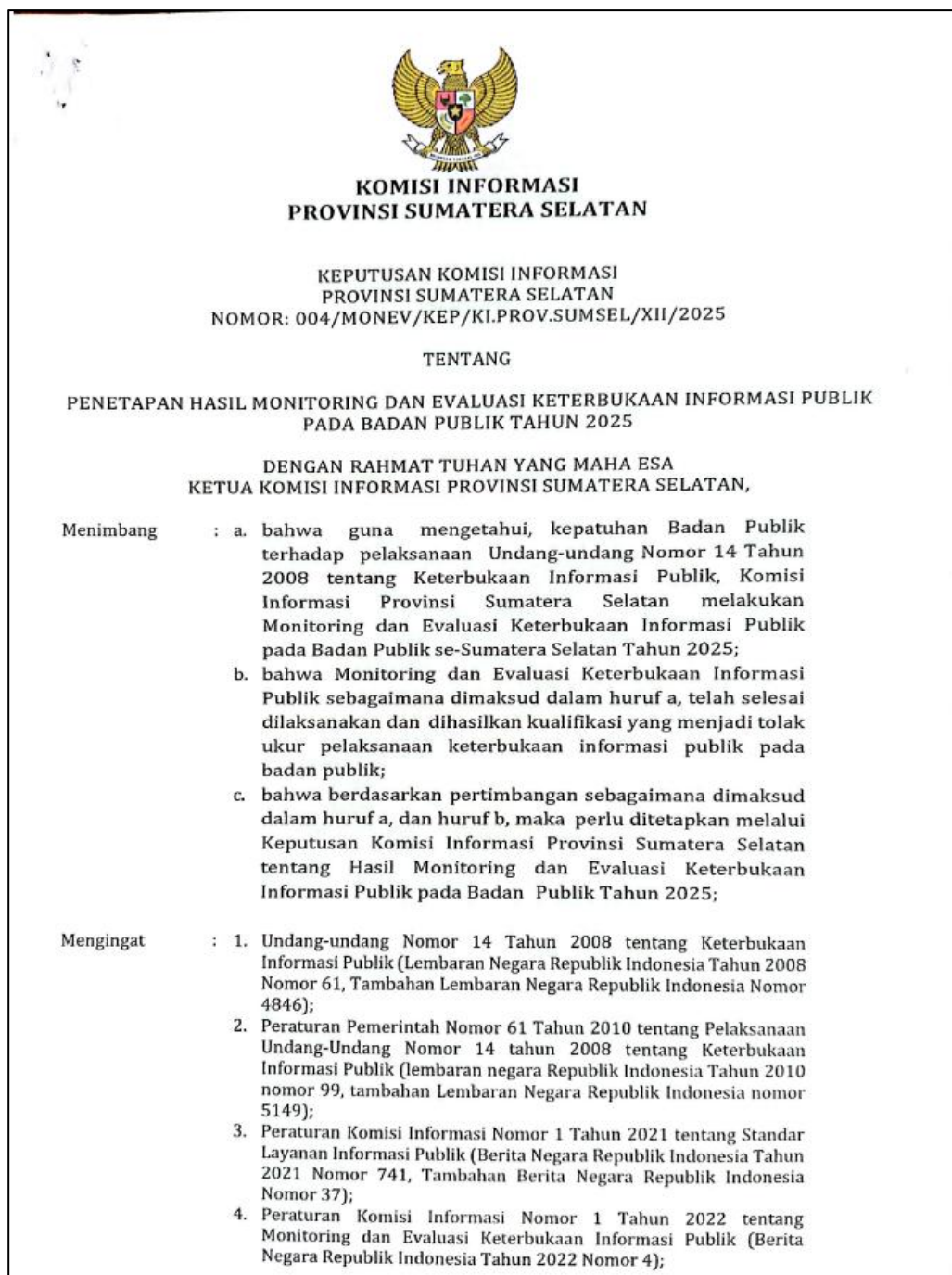
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas 1B juga selalu berupaya untuk meningkatkan penyelesaian perkara dengan menyederhanakan proses berperkara sesuai dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dipasal 4 ayat 2. Percepatan penyelesaian perkara ini dilakukan dengan jalur mediasi (Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), penyelenggaraan pemeriksaan perkara gugatan sederhana (Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana), dan juga penyelesaian perkara dengan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan dimana untuk tingkat pertama penyelesaian perkara paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Upaya lain adalah dengan meningkatkan tingkat penerimaan masyarakat atas putusan hakim pada tingkat Pengadilan Tingkat Pertama, dan Tingkat Banding sehingga dapat menekan angka permohonan upaya hukum. Kemudian, segala upaya penyelesaian perkara ini dibarengi dengan monitoring dan evaluasi melalui SIPP dan MIS yang dilaksanakan secara rutin untuk memonitor kinerja aparatur pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas 1B oleh pimpinan yang mana salah satu alat atau media pimpinan untuk monitoring capaian tersebut selain melalui MIS dan EIS juga menggunakan aplikasi internal hasil inovasi yaitu yang dijelaskan sebelumnya berupa aplikasi Monalisa dan Siamor.

1.4.3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB juga berupaya mewujudkan transparansi informasi ke publik yang mana menjadi salah satu cerminan atau syarat khusus terciptanya WBK (wilayah bebas korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dengan terus melakukan transparansi publik baik melalui fisik maupun non-fisik (sarana media elektronik) yang mana pada tahun 2025, Pengadilan Negeri

Pangkalan Balai menyandang predikat “Informatif” untuk katagori Lembaga Yudikatif Kab / Provinsi Sumatera Selatan yang diterbitkan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : 004/MONEV/KEP/KI.PROV.SUMSEL/XII/2025 tanggal 24 Desember 2025



Gambar 1.7. Monev keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025

5. Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 002/III/SKI-PROV.SUMSEL/2025 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Nomor 001/BA-MONEV/KI.PROV.SUMSEL/XII/2025 tanggal 23 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025. Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari 12 (dua belas) kategori Badan Publik, yang berpartisipasi dan telah melalui tahapan pelaksanaan sesuai ketentuan berlaku;
- KETIGA : Keputusan Hasil Monitoring Dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025 merupakan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan dan tidak dapat diganggu gugat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 24 Desember 2025

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI
SUMATERA SELATAN,



JOEMARTHINE CHANDRA, SH., MH

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Sumatera Selatan;
2. Yth. Ketua Komisi Informasi Pusat

Gambar 1.8. *Lanjutan Monev Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025*

7. KATEGORI LEMBAGA YUDIKATIF KAB/KOTA PROV. SUMSEL			
NO	NAMA BADAN PUBLIK	NILAI	KUALIFIKASI
1	Pengadilan Agama Kayu Agung	96,02	Informatif
2	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	96,02	Informatif
3	Pengadilan Negeri Muara Enim	95,87	Informatif
4	Pengadilan Agama Pangkalan Balai	95,39	Informatif
5	Pengadilan Agama Sekayu	94,53	Informatif
6	Pengadilan Agama Muara Enim	94,49	Informatif
7	Pengadilan Negeri Prabumulih	94,33	Informatif
8	Pengadilan Agama Lahat	92,61	Informatif
9	Pengadilan Negeri Kayu Agung	92,57	Informatif
10	Pengadilan Agama Palembang	26,59	Tidak Informatif
11	Pengadilan Agama Prabumulih	22,78	Tidak Informatif
12	Pengadilan Negeri Baturaja	16,48	Tidak Informatif
13	Pengadilan Negeri Palembang	10	Tidak Informatif
14	Pengadilan Negeri Sekayu	10	Tidak Informatif
15	Pengadilan Negeri Lahat	10	Tidak Informatif
16	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	10	Tidak Informatif
17	Pengadilan Negeri Pagaralam	10	Tidak Informatif
18	Pengadilan Agama Lubuk Linggau	10	Tidak Informatif
19	Pengadilan Agama Muaradua	10	Tidak Informatif

Gambar 1.9. Tabel Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menduduki peringkat II

1.4.4. Penyerapan Anggaran

Sebagai salah satu wujud dari akuntabilitas pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah adanya penerapan pada penyerapan anggaran baik itu pada mata anggaran yang bersumber dari Badan Urusan Administrasi (pada dipa 01) dan Dirjen Badilum (pada dipa 03). Untuk penyerapan anggaran ditahun 2025 sudah sesuai dengan harapan yang mana dapat dipantau pada Omspan dan juga Monev.Kemenkeu.go.id yang mana angkat tersebut berdasarkan kinerja baik dari keuangan maupun perencanaan. Untuk dipa nilai sampai Desember 2025 baik itu dipa 01 dan 03 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Revisi Akhir	Capaian (%)
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 5.077.615.000,-	Rp. 5.882.899.000,-	93,23
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 151.990.000,-	Rp. 150.390.000,-	99,02

Tabel 1.1. Capaian anggaran Tahun 2025 Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB

1.5. Sistematika Pelaporan

BAB I	Memuat pernyataan telah direviu pada halaman paling awal sebelum Kata Pengantar dan Formulir Reviu Laporan Kinerja menjadi Lampiran dalam Laporan Kinerja Tahun 2025.
BAB II	Perencanaan Kinerja pada Subbab Perjanjian Kinerja perlu disampaikan : - Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum terjadi revisi disertai dengancapaian kinerja akumulasi hingga September Tahun 2025. - Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
BAB III	Akuntabilitas Kinerja pada Subbab Capaian Kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja perbulan mulai Januari hingga Desember atas sasaran, indikator, dan target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja perbulan tersebut juga menjadi Lampiran dalam Laporan Kinerja Tahun 2025.
BAB IV	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 dijelaskan pada BAB III.

Tabel 1.2. Sistematika Laporan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB

BAB II

PERENCANAAN

PENETAPAN

KINERJA

**PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BALAI KELAS I B**

(0711) 5252010
pn.pangkalanbalai@gmail.com
pn.pangkalanbalai.go.id

**LKJIP
2025**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Latar Belakang

Rencana kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai merupakan gambaran dari kinerja lembaga badan peradilan dalam kurun waktu tahun 2024-2029 sejak diresmikan diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018, merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi yang dapat dijabarkan menjadi :

2.1.1 Visi dan Misi

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2024–2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan–tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundan–undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan nasional jangka panjang (RPNJP) 2005-2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2024-2029. Visi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Yang Agung”

Misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Agung Kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan strategis yang termuat di dalam rencana strategis adalah sebagai berikut :

- Menciptakan kredibilitas, profesional dan transparan.
- Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- Menciptakan rasa keadilan bagi pencari keadilan masyarakat bangsa dan negara.
- Memberikan pelayanan hukum yang mempunyai kepastian dan berkeadilan.

2. Sasaran Strategis

Untuk mendukung tercapainya tujuan dengan terukur maka Pengadilan Negeri Pangkalan Balai menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel.
- Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Ke-4 (empat) sasaran kegiatan tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas 1B untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, program dan kegiatan yang dilakukan disesuaikan dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung yang berasal dari DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Revisi Akhir	Capaian (%)
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 5.077.615.000,-	Rp. 5.882.899.000,-	93,23
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 151.990.000,-	Rp. 150.390.000,-	99,02

Tabel 2.1. Tabel Anggaran DIPA 01 dan DIPA 03 T.A. 2025 Pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB

Strategi yang dilakukan :

1. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait administrasi teknis dalam penanganan / penyelesaian perkara secara konsisten untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian perkara;
2. Menetapkan ketentuan *one day minute* terhadap penyelesaian perkara perdata permohonan;
3. Peningkatan kemampuan mediasi para hakim mediator melalui pelatihan mediasi;
4. Peningkatan kualitas putusan hakim dengan aktif melibatkan Hakim dalam pelatihan - pelatihan teknis

5. Meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja majelis hakim dalam menyelesaikan perkara.

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas 1B

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Pangkalan Balai digambarkan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
1.	Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, Transparan, dan Akuntabel.	1. Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu.	Persentase perbandingan jumlah perkara Perdata dengan jumlah perkara perdata yang ada.
		2. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu.	Persentase perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang ada.
		3. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan Penyelesaian Pendekatan Restoratif Justice.
		4. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya hukum Banding.	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diputus tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan perbandingan jumlah putusan perkara.
		5. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diputus tidak mengajukan upaya hukum kasasi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
		Hukum Kasasi.	dengan perbandingan jumlah putusan Perkara.
		6. Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diputus tidak mengajukan upaya hukum PK dengan perbandingan jumlah putusan perkara.
		7. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Indeks Kepuasan Pencari Keadilan.
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada pihak tepat waktu.	Persentase perbandingan jumlah Salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.
		2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.
3.	Meningkatnya Akses peradilan Bagi Masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	Persentase perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui prodeo dengan jumlah perkara yang dilakukan prodeo.
		2. Persentase pencari keadilan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	Persentase perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan Tertentu.
4.	Meningkatnya kepatuhan	Persentase putusan perkara perdata yang	Persentase perbandingan eksekusi yang telah dilaksanakan dengan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
	terhadap Putusan pengadilan	ditindak lanjuti (dieksekusi)	Jumlah Permohonan Eksekusi.

Tabel 2.2. Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)

2.3. Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas 1B

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	Persentase jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan.
		2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	Persentase jumlah salinan putusan yang tersedia kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat Banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi atau PK yang diterima pengadilan pengaju.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
		kepada para pihak.	
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah salinan putusan banding, kasasi, PK yang diterima pengadilan pengaju.
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	Persentase jumlah salinan putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi.
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	Persentase Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dengan jumlah putusan perdata yang dimohon eksekusi.
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	Persentase Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif.
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	Persentase jumlah perkara yang berhasil melalui mediasi dengan jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi.
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	Persentase jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.	Persentase jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court dengan jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan.
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	Persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dengan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan.
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).	Persentase jumlah layanan pidana yang diajukan secara elektronik dengan jumlah layanan perkara pidana.
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	Jumlah / nilai indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan.
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	Nilai total capaian dari Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berdasarkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, disiplin.
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan(Dipa 01).	Berdasarkan nilai dari kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tahun pelaporan untuk anggaran yang bersumber dari Badan Urusan Administrasi (Dipa 01).

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (Dipa 03).	Berdasarkan nilai dari kinerja pelaksanaan anggaran pada satuan kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tahun pelaporan untuk anggaran yang bersumber dari Dirjen Badilum (Dipa 03).
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (Dipa 01).	Nilai kinerja perencanaan anggaran pada tahun pelaporan berdasarkan efektifitas dan efisiensi mata anggaran yang bersumber dari Badan Urusan Administrasi (Dipa 01).
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (Dipa 03).	Nilai kinerja perencanaan anggaran pada tahun pelaporan berdasarkan efektifitas dan efisiensi mata anggaran yang bersumber dari Dirjen Badilum (Dipa 03).
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	Indeks pengelolaan aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara.

Tabel 2.3. *Tabel Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU)*

2.4. Rencana Kinerja Tahun 2025 Sebelum Revisi

Rencana Kinerja Tahun 2025 (awal / sebelum revisi) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai masih mengadopsi atau memuat isi dari Renstra (Rencana Strategis) dan IKU Mahkamah Agung RI tahun 2020-2024 yang mana masih dipakai atau dijadikan acuan dari Januari s/d September 2025 (sampai Triwulan III) pelaporan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2025 dalam hal ini sampai triwulan III tahun 2025. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja

tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja. Adapun Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	92
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.	100
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding.	95
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	85
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	90
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100
		g. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	10

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu.	100
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu.	100
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	14
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi).	40

Tabel 2.4. Tabel Rencana Kinerja Tahun 2025 Januari s.d September (Triwulan III)

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum Revisi

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan komitmen untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi

kinerja. Untuk perjanjian kinerja tahun 2025 juga mengalami perubahan menyesuaikan yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025 terjadi perubahan pada renstra Mahkamah Agung RI 2025-2029 yang mana hal tersebut otomatis merubah isi dari Perjanjian Kinerja di tahun 2025. Maka dari itu untuk Perjanjian Kinerja 2025 masih menggunakan IKU (Indikator Kinerja Utama) serta RENSTRA (Rencana Strategis) 2020-2024 sampai dengan Triwulan III (September) Adapun hasil Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum revisi pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	92
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.	100
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding.	95
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	85
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	90
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
		g. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	10
3.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu.	100
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu.	100
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	14
4.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100
5.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi).	40

Tabel 2.5. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum Revisi

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	92	82	89
		b. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.	100	100	100
		c. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	10	8	80
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding.	95	84	88
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	85	N/A	N/A
		f. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	90	N/A	N/A



No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
		g. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	100	100	100
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis I					91,4
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.	100	100	100
		b. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.	100	100	100
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	14	10	71
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis II					90,33
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100	100	100
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis III					100

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi).	40	6	15
RATA - RATA CAPAIAN IV				15	
TOTAL CAPAIAN				74	

Tabel 2.6. Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum Revisi disertai Capaian Akumulasi hingga September Tahun 2025 (Triwulan III)

2.6. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, tanggal 31 Oktober 2025 terdapat banyak sekali perubahan didalam isi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mana itu semua mempengaruhi sebagian besar pelaporan seperti Renstra, Perjanjian Kinerja termasuk Rencana Kinerja yang otomatis menyesuaikan dengan IKU terbaru Mahkamah Agung RI. Untuk target dari penyesuaian tersebut dan juga isi dari Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang Efektif Transparan, Responsif dan Modern.	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	97%
		b. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat	99.80%



No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		pertama kepada para pihak.	
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	99.80%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100%
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	60%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	13%
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	12%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	2%



No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.	100%
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	100%
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	4
3.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	92
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01).	88
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03).	88
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01).	86
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03).	86



No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	4

Tabel 2.7. Tabel Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB

2.7. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja ini bertujuan sebagai komitmen bersama untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai tolak ukur dan dasar penilaian evaluasi kinerja serta dasar penetapan sasaran kinerja pegawai. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2025 antara Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya peradilan yang Efektif Transparan, Responsif dan Modern.	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	97%
		b. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	99.80%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%



No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	99.80%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100%
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	60%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	13%
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	12%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	2%
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.	100%
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	100%



No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		1. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	4
3.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	92
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01).	88
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03).	88
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01).	86
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03).	86
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	4

Tabel 2.8. Tabel Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB

No.	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Revisi Akhir
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 5.077.615.000,-	Rp. 5.882.899.000,-
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 151.990.000,-	Rp. 150.390.000,-

Tabel 2.9. Tabel Anggaran Awal dan Anggaran Revisi Akhir Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB

Berikut ini adalah Revisi Perjanjian Kinerja berikut realisasi dan capaiannya Tahun 2025.

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peradilan yang Efektif Transparan, Responsif dan Modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	96%	98,97%
		b. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	99.80%	100%	100%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat	100%	100%	100%



No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak			
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	99.80%	100%	100%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	60%	60%	100%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	13%	13%	100%
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	12%	13%	108%

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	2%	N/A	N/A
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis I					92,31
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	4	4	100
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis II					100
3.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil	92	90	97,82



No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Putusan Pengadilan	Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan			
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01)	88	97	110
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03)	88	93	105
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01)	86	100	116
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03)	86	85	98,83
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	4	2,95	73,75
		Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis III			
TOTAL CAPAIAN				97,51	

Tabel 2.10. Tabel Revisi Perjanjian Kinerja Berikut Realisasi dan Capaiannya
Tahun 2025 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB



No.	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Revisi Akhir	Capaian (%)
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 5.077.615.000,-	Rp. 5.882.899.000,-	93,23
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 151.990.000,-	Rp. 150.390.000,-	99,02

Tabel 2.11. Tabel Anggaran Awal dan Anggaran Revisi Akhir Tahun 2025 dengan Kolom Capaian Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

**PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BALAI KELAS I B**

(0711) 5252010
pn.pangkalanbalai@gmail.com
pn.pangkalanbalai.go.id

**LKJIP
2025**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai, dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan *reward / punishment*, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2025 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun keempat dari RENSTRA Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2025-2029 yang mana disesuaikan dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak yang mana rumus serta substansinya sudah diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tahun 2025 yaitu : sebesar **97,51%** yang mana terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis meliputi :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, dengan total capaian : **92,31%**.
2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dengan capaian **100%**.
3. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, dengan capaian **100,23%**.

Untuk lebih jelas nya akan di jabarkan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	97%	96%	98,97%
		2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	99,80%	100%	100%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%	100%	100%
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	99,80%	100%	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	100%	100%	100%
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	60%	60%	100%
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	13%	13%	100%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	12%	13%	108%
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	2%	N/A	N/A
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.	100%	100%	100%
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	100%	100%	100%
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).	100%	100%	100%
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis I					92,31
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	4	4	100
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis II					100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satker Pengadilan.	92	90	97,82
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan (Dipa 01).	88	97	110
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan (Dipa 03).	88	93	105
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (Dipa 01).	86	100	116
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (Dipa 03).	86	85	98,83
		6. Indeks Pengelolaan Aset (IPA).	4	2,95	73,75
		Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis III			
Total Capaian					97,51

Tabel 3.1. Tabel Capaian Kinerja Organisasi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB Tahun 2025

3.1.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB di Tahun 2025 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah realisasi dan capaian memenuhi target atau tidak.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan rumus perbandingan antara realisasi dengan target :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB Tahun 2025 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Pada akhir tahun 2025. Capaian hasil pengukuran kinerja didapat dengan membandingkan antara realisasi pekerjaan yang berhasil dilaksanakan dengan target tahunan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025. Sumber data pencapaian realisasi kinerja adalah Laporan Bulanan, Laporan Tahunan dan data - data masing - masing kepaniteraan dan sub bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing - masing ditambah lagi untuk Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memiliki aplikasi internal seperti Siamor dan Monalisa yang dapat membantu dalam pengukuran kinerja. Tidak lupa juga dengan adanya aplikasi Instansi seperti SIKEP, Monev Kemenkeu, E-court, E-berpadu, dan lain - lain.

Hasil serta penjelasan mengenai analisis akuntabilitas kinerja masing - masing sasaran akan diuraikan sebagai berikut :

A. Sasaran 1 : Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel terdiri atas 12 (dua belas) indikator kinerja yaitu :

1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;
2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak;
3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak;
5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;
6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata;

7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif;
8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi;
9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi;
10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan E-Court;
11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (E-Berpadu);
12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (E-Berpadu).

Analisa terhadap pencapaian masing - masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. **Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai persentase perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 97%. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu” pada tahun 2020 s.d 2025 ditampilkan pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Tahun	Perkara yang diselesaikan / Putus	Perkara yang diselesaikan / Putus Tepat Waktu	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu	2025	575	554	96	97	98,97

Tabel 3.2. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu pada Tahun 2025

Tahun	Jenis Perkara	Perkara yang diselesaikan / Putus	Perkara yang diselesaikan / Putus Tepat Waktu	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
2024	Pidana	426	422	99	100	99
	Perdata	144	123	85	94	90
2023	Pidana	455	452	99	95	104
	Perdata	77	62	81	95	85
2022	Perdata	70	54	77	90	86
	Pidana	487	477	98	80	122
2021	Pidana	560	555	99	100	99
	Perdata	97	76	78	100	78
2020	Pidana	607	601	99	85	116
	Perdata	74	59	80	80	100

Tabel 3.3. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu pada Periode Tahun 2020 s.d 2025

a) Penyelesaian Perkara Perdata

Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB tahun 2025. Jumlah perkara yang putus sebanyak 147 perkara, dan perkara yang putus tepat waktu adalah sebanyak 126 perkara.

Nomor	Bulan	Jumlah Perkara Perdata Yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persentase
1	Januari	13	13	100%
2	Februari	14	11	79%
3	Maret	17	12	71%
4	April	7	3	43%
5	Mei	12	10	83%
6	Juni	5	5	100%
7	Juli	14	11	79%
8	Agustus	9	7	78%
9	September	15	15	100%
10	Oktober	19	18	95%
11	November	8	8	100%
12	Desember	14	13	93%
13	Tahun (Total)	147	126	86%

Gambar 3.1. Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Januari s.d Desember 2025 (Melalui Aplikasi Siamor)

No.	Jenis Perkara	Perkara yang diselesaikan / Putus	Perkara yang diselesaikan / Putus Tepat Waktu
1.	Perdata	147	126

Tabel 3.4. Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Periode Januari s.d Desember Tahun 2025

Analisa Penyebab Keberhasilan dalam mencapai target kinerja penyelesaian perkara perdata tepat waktu tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring mplementasi SIPP), rapat tim satgas SIPP, monitoring dan evaluasi SIPP setiap hari;
- 2) Pengawasan rutin oleh atasan langsung dan hakim pengawas bidang serta pelaksanaan rapat berjenjang di Kepaniteraan;
- 3) Penerapan percepatan penyelesaian perkara perdata sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) dari perkara masuk hingga perkara minutasasi diterapkan secara disiplin pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB;



- 4) Kepatuhan terhadap court calendar (kalender sidang / agenda persidangan), untuk menaati jadwal sidang yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dalam suatu perkara;
- 5) Terdapat aplikasi lokal hasil inovasi dari Pangkalan Balai berupa Monalisa dan Siamor yang mana berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan dalam melakukan pengawasan khususnya dibidang teknis penyelesaian perkara.

b) Penyelesaian Perkara Pidana

Tabel berikut menggambarkan keadaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB Tahun 2025 :

Nomor	Bulan	Jumlah Perkara Pidana Yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Persentase
1	Januari	29	29	100%
2	Februari	50	50	100%
3	Maret	27	27	100%
4	April	16	16	100%
5	Mei	51	51	100%
6	Juni	29	29	100%
7	Juli	45	45	100%
8	Agustus	38	38	100%
9	September	48	48	100%
10	Oktober	27	27	100%
11	November	29	29	100%
12	Desember	39	39	100%
13	Tahun (Total)	428	428	100%

Gambar 3.2. Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Januari s.d Desember 2025
(Melalui Aplikasi Siamor)

No.	Jenis Perkara	Perkara yang diselesaikan / Putus	Perkara yang diselesaikan / Putus Tepat Waktu
1.	Pid.Sus	188	188
2.	Pid.B	227	227
3.	Pid.Pra	1	1
4.	Pid.C	12	12
Total		428	428

Tabel 3.5. Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana
Periode Januari s.d Desember Tahun 2025

Selama tahun 2025 untuk perkara pidana terdapat 428 Perkara yang diputus yang mana dari perkara tersebut semuanya diputus tepat waktu. Karakteristik disini tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan tidak lebih dari 5 (lima) bulan. Sehingga untuk realisasi serta capaian nya dari target sebesar 92% adalah 100% serta capaian nya juga 100%.

Analisa Penyebab Keberhasilan dalam mencapai target kinerja penyelesaian perkara Pidana tepat waktu tahun 2025 sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring Implementasi SIPP), rapat tim satgas SIPP, monitoring dan evaluasi SIPP setiap hari;
- 2) Pengawasan rutin oleh atasan langsung dan hakim pengawas bidang serta pelaksanaan rapat berjenjang di Kepaniteraan;
- 3) Penerapan percepatan penyelesaian perkara pidana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 (kurang dari 5 bulan) dari perkara masuk hingga perkara minutasi diterapkan secara disiplin pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB;
- 4) Kepatuhan terhadap penginputan eberpadu, untuk menaati jadwal sidang yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dalam suatu perkara;
- 5) Terdapat aplikasi lokal hasil inovasi dari Pangkalan Balai berupa Monalisa dan Siamor yang mana berfungsi sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan dalam melakukan pengawasan khususnya dibidang teknis penyelesaian perkara.

2. Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai Persentase Jumlah Salinan Putusan yang Tersedia atau dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu dengan Jumlah Perkara yang di Putus, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim Kepada Pihak Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 99,80%. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak” pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Tahun	Perkara yang diselesaikan / Putus	Perkara yang diselesaikan / Putus Tepat Waktu	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Persentase Penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	2025	575	575	100	100	100

Tabel 3.6. Persentase Perkara yang diselesaikan / Putus Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak Tahun 2025

No.	Jenis Perkara	Perkara yang diselesaikan / Putus	Perkara yang diselesaikan / Putus Tepat Waktu
1.	Pid.Sus	188	188
2.	Pid.B	227	227
3.	Pid.Pra	1	1
4.	Pid.C	12	12
Total		428	428

Tabel 3.7. Persentase Perkara Pidana yang diselesaikan / Putus Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak Tahun 2025



No.	Jenis Perkara	Perkara yang diselesaikan / Putus	Perkara yang diselesaikan / Putus Tepat Waktu
1.	Perdata	147	126

Tabel 3.8. *Persentase Perkara Perdata yang diselesaikan / Putus Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak Tahun 2025*

Dalam hal Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak, yang mana pengiriman salinan putusan harus segera disampaikan kepada para pihak oleh juru sita atau jurusita pengganti pada satuan kerja pengadilan.

Untuk perkara perdata ditahun 2025, terdapat 147 perkara yang putus sedangkan untuk perkara pidana terdapat 428 perkara yang putus dan itu langsung disampaikan kepada para pihak.

Berikut tabel realisasi dan capaian Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak selama tahun 2020 s.d 2024.

Jenis Perkara	Tahun	Jumlah Putusan	Jumlah Salinan Putusan yang dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu
Perdata	2020	74	74
	2021	97	97
	2022	70	70
	2023	77	77
	2024	144	144

Tabel 3.9. *Jumlah Putusan dan Salinan Putusan Perdata yang dikirim Para Pihak Selama Tahun 2020 s.d 2024*

Jenis Perkara	Tahun	Jumlah Putusan	Jumlah Salinan Putusan yang dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu
Pidana	2020	607	607
	2021	560	560
	2022	487	487
	2023	455	455
	2024	426	426

Tabel 3.10. *Jumlah Putusan dan Salinan Putusan Pidana yang diterima Oleh Para Pihak Selama Tahun 2020 s.d 2024*

Jumlah putusan perkara pada tahun 2025 sebanyak 575 putusan, dan salinan putusan yang diminta dan diterima oleh para pihak sebanyak 575 putusan.

Berdasarkan data - data tersebut maka realisasi persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, dan capaiannya sebesar 100%.

Sasaran Strategis	Tahun	Perkara yang diselesaikan / Putus	Jumlah Salinan Putusan yang dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Persentase Penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak	2025	575	575	100	100	100
	2024	570	570	100	100	100
	2023	532	532	100	100	100
	2022	557	557	100	100	100
	2021	657	657	100	75	1
	2020	681	681	100	70	142

Tabel 3.11. Persentase Jumlah Penyediaan / Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak

Dari tabel di atas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- 1) Realisasi kinerja Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu pada tahun 2025 sebesar 100%, sama dengan tahun 2024 s.d 2022;
- 2) Dalam kurun waktu 2020 s.d 2021 capaiannya melebihi 100% dikarenakan target pada indikator tersebut dibawah 100, yang mana otomatis menyebabkan meningkatnya capaian;



- 3) Untuk tahun 2022 s.d 2025, target pada indikator tersebut disesuaikan yang mana idealnya perkara yang putus harus segera dikirimkan sehingga capaian sesuai dengan realisasi yaitu 100%.

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

- 1) Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan putusan dan petikan putusan. Dimana untuk perkara perdata, Pengadilan sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan;
- 2) Memantau penyampaian Salinan putusan dan petikan putusan melalui Aplikasi SIPP dan MIS, serta mengantisipasi kendala yang dihadapi;
- 3) Melakukan koordinasi antara majelis, panitera serta jurusita mengenai kendala yang dihadapi dilapangan.

3. Persentase Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai Persentase Pemberitahuan Petikan Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, PK yang disampaikan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu dengan Jumlah Petikan atau Amar Putusan Banding, Kasasi, PK yang diterima Pengadilan Pengaju, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, PK yang disampaikan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi, PK yang diterima Oleh Pengadilan Pengaju}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 100%. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak” pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut :

Bulan	Jumlah Petikan atau Amar Putusan yang diterima			Jumlah Pemberitahuan Petikan atau Amar Putusan Kepada Para Pihak Tepat Waktu		
	Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
Januari	3	-	-	3	-	-
Februari	3	-	-	3	-	-
Maret	4	-	-	4	-	-
April	3	4	-	3	4	-
Mei	3	1	-	3	1	-
Juni	1	-	-	1	-	-
Juli	7	4	-	7	4	-
Agustus	8	1	1	8	1	1
September	11	6	1	11	6	1
Oktober	2	4	-	2	4	-
November	3	4	1	3	4	1
Desember	2	5	1	2	5	1
Total	50	29	4	50	29	4

Tabel 3.12. Data Jumlah Petikan atau Amar Perkara Pidana Tahun 2025

Bulan	Jumlah Petikan atau Amar Putusan yang diterima			Jumlah Pemberitahuan Petikan atau Amar Putusan Kepada Para Pihak Tepat Waktu		
	Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
Januari	-	1	-	-	1	-
Februari	-	1	-	-	1	-
Maret	-	1	-	-	1	-
April	2	3	1	2	3	1
Mei	2	-	1	2	-	1
Juni	2	1	2	2	1	2
Juli	-	-	-	-	-	-
Agustus	1	1	-	1	1	-
September	1	1	1	1	1	1
Oktober	1	1	1	1	1	1
November	4	2	-	4	2	-
Desember	2	1	-	2	1	-
Total	15	13	6	15	13	6

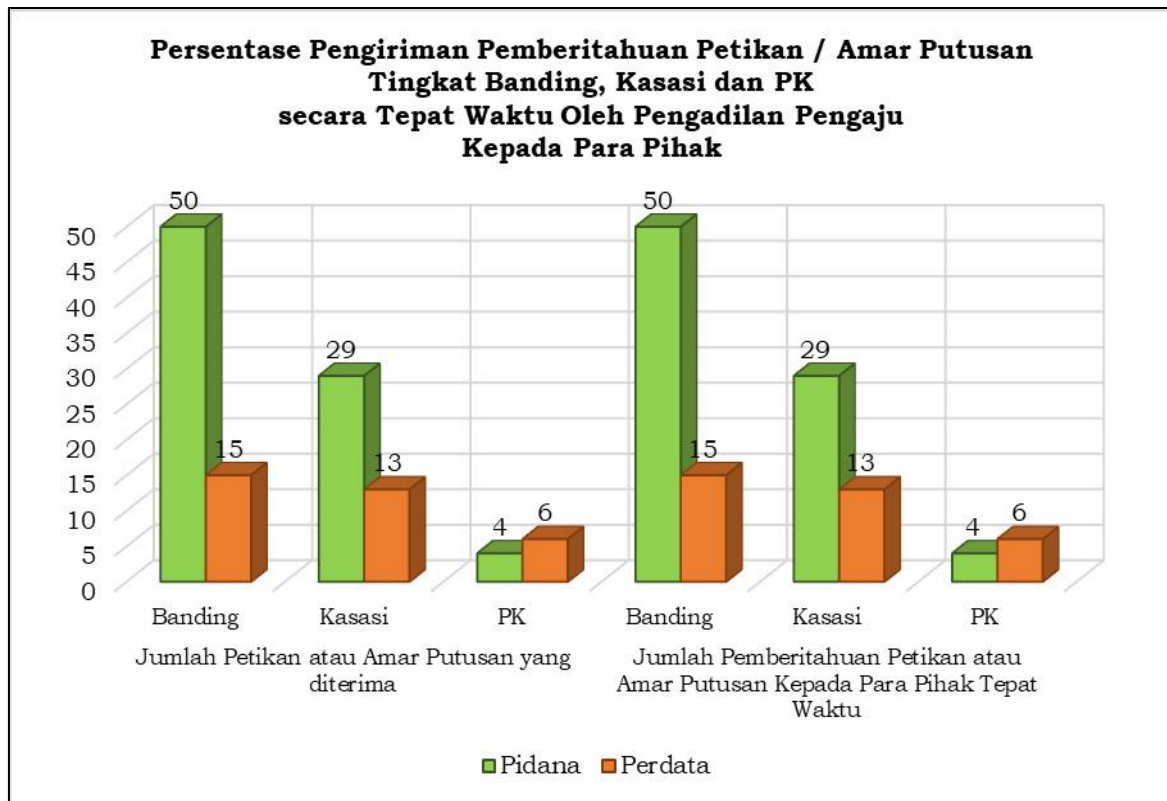
Tabel 3.13. Data Jumlah Petikan atau Amar Perkara Perdata Tahun 2025

Perkara	Jumlah Petikan atau Amar Putusan yang diterima			Jumlah Pemberitahuan Petikan atau Amar Putusan Kepada Para Pihak Tepat Waktu		
	Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
Pidana	50	29	4	50	29	4
Perdata	15	13	6	15	13	6
Total	65	42	10	65	42	10

Tabel 3.14. Persentase Jumlah Pengiriman Pemberitahuan Petikan / Amar Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Perkara Secara Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Jumlah petikan atau amar putusan yang diterima pada tahun 2025 untuk perkara Pidana dan Perdata (gabungan Banding, Kasasi dan PK) sebanyak 117 amar putusan, dan pemberitahuan petikan atau amar putusan kepada para pihak tepat waktu sebanyak 117 amar putusan.

Berdasarkan data - data tersebut maka realisasi persentase Jumlah pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK perkara secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, dan capaiannya sebesar 100%.



Grafik 3.1. *Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 3 pada Tahun 2025*

Dari tabel dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- 1) Realisasi kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 sebesar 100%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025;
- 2) Pada tahun 2025 capaian sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk penyelesaian Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak sebesar 100%. Berarti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

- 1) Kinerja jurusita yang cepat dalam mengirimkan amar putusan kepada para pihak sejak putusan diterima;
- 2) Pemantauan dan adanya monev dari pimpinan pengadilan (Ketua / Panitera) terhadap SIPP dan komitmen untuk menindaklanjuti putusan yang baru masuk (segera diberitahukan) untuk mencegah keterlambatan;
- 3) Sudah menjadi komitmen bahwasanya setiap adanya perintah penyampaian harus segera disampaikan kepada para pihak.

4. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai “Persentase Jumlah Putuan yang dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu dengan Jumlah Salinan Putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju”, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Putusan yang dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Salinan Putusan Tingkat Banding, Kasasi, PK yang diterima Oleh Pengadilan Pengaju}} \times 100\%$$

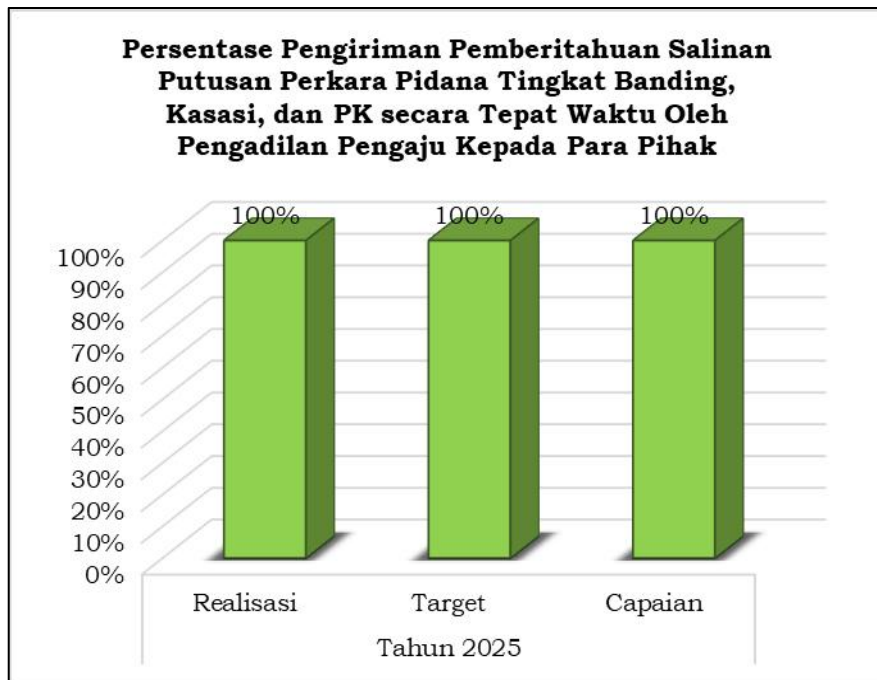
Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 99,80 %. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Presentase Jumlah Putusan yang dikirimkan Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu dengan Jumlah Salinan Putusan Banding, Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju” pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut :

Bulan	Jumlah Putusan yang dikirim Kepada Para Pihak Secara Tepat Waktu			Jumlah Salinan Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK yang diterima Pengadilan Pengaju		
	Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
Januari	3	-	-	3	-	-
Februari	3	-	-	3	-	-
Maret	4	-	-	4	-	-
April	3	4	-	3	4	-
Mei	3	1	-	3	1	-
Juni	1	-	-	1	-	-
Juli	7	4	-	7	4	-
Agustus	8	1	1	8	1	1
September	11	6	1	11	6	1
Oktober	2	4	-	2	4	-
November	3	4	1	3	4	1
Desember	2	5	1	2	5	1
Total	50	29	4	50	29	4

Tabel 3.15. Data Jumlah Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi, PK Tahun 2025

Jumlah Salinan Putusan perkara pidana tingkat Banding, Kasasi dan PK yang diterima pada tahun 2025 sebanyak 117 salinan putusan, dan pemberitahuan salinan putusan Banding, Kasasi dan PK kepada para pihak tepat waktu sebanyak 117 salinan putusan.

Berdasarkan data - data tersebut maka realisasi persentase Jumlah pengiriman pemberitahuan salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, dan capaiannya sebesar 100%.



Grafik 3.2. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indokitor 4 pada Tahun 2025

Dari tabel dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- 1) Realisasi kinerja Persentase pengiriman pemberitahuan salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak pada tahun 2025 sebesar 100%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025;
- 2) Pada tahun 2025 capaian sebesar 100% dan realisasi kinerja sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk penyelesaian Persentase pengiriman pemberitahuan salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak sebesar 100%. Berarti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

- 1) Kinerja jurusita yang cepat dalam mengirimkan salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK kepada para pihak sejak putusan diterima;
- 2) Pemantauan dan adanya monev dari pimpinan pengadilan (Ketua / Panitera) terhadap SIPP dan komitmen untuk menindaklanjuti putusan yang baru masuk (segera diberitahukan) untuk mencegah keterlambatan;
- 3) Adanya komitmen bahwasannya salinan yang telah ada atau keluar harus segera disampaikan kepada para pihak sejak putusan diterima.

5. **Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan**

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai “Persentase Jumlah Putusan yang diunggah Pada Direktori Putusan dengan Jumlah Putusan yang telah diminutasi”, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Putusan yang diunggah di Direktori Putusan}}{\text{Jumlah Putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 100%. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Persentase Jumlah Putusan yang diunggah Pada Direktori Putusan dengan Jumlah Putusan yang telah diminutasi” pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut :

Jumlah Putusan yang telah diminutasi	Jumlah Putusan yang diunggah di Direktori Putusan
575	575

Tabel 3.16. Data Jumlah Putusan Pengadilan yang diunggah di Direktori Putusan Tahun 2025

Jumlah putusan yang telah diminutasi pada tahun 2025 sebanyak 575 putusan, dan Jumlah putusan yang di unggah di Direktori Putusan sebanyak 575 putusan.

Berdasarkan data - data tersebut maka realisasi persentase Jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, dan capaiannya sebesar 100%.



Grafik 3.3. Jumlah Putusan Pengadilan yang diunggah Di Direktori Putusan pada Tahun 2025

Berikut ini jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dari 2020 s.d 2024 pada direktori putusan :

Tahun	Jumlah Putusan yang telah Diminutasi	Jumlah Putusan yang diunggah di Direktori Putusan
2024	570	570
2023	532	532
2022	557	557
2021	657	657
2020	681	681

Tabel 3.17. Jumlah Putusan Pengadilan yang diunggah di Direktori Putusan Tahun 2020 s.d 2024

Dari tabel dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- 1) Realisasi kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan pada tahun 2025 sebesar 100%. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025;
- 2) Pada tahun 2025 capaian sebesar 100% dari realisasi serta target yang telah ditentukan, yang mana artinya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara yang sudah putus dan minutasi dan diupload ke direktori putusan secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi SIPP;
- 2) Komitmen dari pimpinan, dan jajaran yang terkait didalamnya bahwasannya perkara yang telah putus dan minutasi harus segera di upload putusannya kedalam direktori putusan.

6. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai “Persentase Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata yang diselesaikan dengan Jumlah Putusan Perdata yang dimohonkan Eksekusi”, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Persentase Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Putusan Perdata yang dimohonkan Eksekusi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 60%. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata” pada tahun 2025 ditampilkan pada gambar berikut :

4/Pdt.Eks.RL/2024/PN Pkb Hak Tanggungan	Tanggal Permohonan : 25/11/2024	Yesi Veronica	Eksekusi Rill Telah Dilaksanakan 23/06/2025
1/Pdt.Eks/2025/PN Pkb	Tanggal Permohonan : 26/02/2025	Andrie Defriansyah, S.H.,M.H (Kuasa dari Penggugat : ILHAM ARRASID)	Eksekusi Rill Telah Dilaksanakan 21/05/2025
3/Pdt.Eks/2024/PN Pkb	Tanggal Permohonan : 18/11/2024	Lisa Merida, S.H.,M.H. (Kuasa dari Penggugat : Tjok Kah Ching Ronnie)	Eksekusi Rill Telah Dilaksanakan 15/05/2025

Gambar 3.3. Perkara BHT yang ditindaklanjuti untuk di Eksekusi

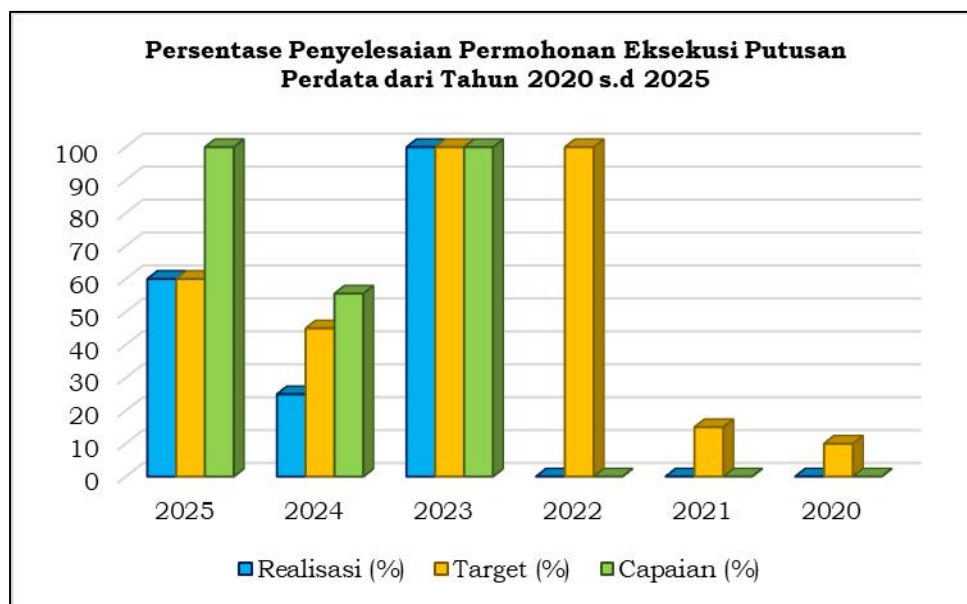
Pada tahun 2025, Jumlah permohonan eksekusi sebanyak 5 perkara, dan yang berhasil dilaksanakan eksekusi sebanyak 3 perkara. Berdasarkan data - data tersebut maka realisasi indikator kinerja ini pada tahun 2025 adalah sebesar 60%, dan capaian 100% dimana target dari indikator tersebut sebesar 60%.

Berikut ini tabel perbandingan untuk penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata dari tahun 2020 s.d 2025.



Sasaran Strategis	Tahun	Jumlah Putusan Perdata yang dimohonkan Eksekusi	Jumlah Permohonan Eksekusi Putusan Perdata yang diselesaikan	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata	2025	5	3	60	60	100
	2024	4	1	25	45	55,55
	2023	1	1	100	100	100
	2022	1	0	0	100	0
	2021	0	0	N/A	15	N/A
	2020	0	0	N/A	10	N/A

Tabel 3.18. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata dari Tahun 2020 s.d 2025



Grafik 3.4. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 4 Indikator 6 Tahun 2020 s.d 2025

Dari tabel dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- 1) Realisasi kinerja Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata tahun 2025 adalah 60 % dengan capaian sebesar 100%;

- 2) Capaian indikator ini selama kurun waktu 2020 s.d 2025, adalah 2020 (N/A), 2021 (N/A), 2022 (0), 2023 (100%), 2024 (55,55%), 2025 (100%). N/A disini dikarenakan tidak ada Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi dan tidak adanya Jumlah Permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan pada tahun pelaporan sehingga untuk capaian adalah N/A. Sedangkan yang nilainya 0 (Null) dimana salah satu komponen memiliki angka seperti pelaporan eksekusi tahun 2022 yang mana pada komponen Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi terdapat 1 (satu) permohonan sehingga tidak bisa dikatakan N/A;
- 3) Realisasi kinerja pada tahun 2025 adalah 60% jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata sebesar 60%. Sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 100%, artinya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisis penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi terhadap penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata secara rutin dan berkala;
- 2) Adanya aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) yang berfungsi sebagai sarana pemantauan proses eksekusi di seluruh pengadilan Indonesia secara lebih transparan dan akuntabel.

7. Indikator Jumlah Perkara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai “Persentase Jumlah Perkara yang diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dengan Jumlah Perkara yang Memenuhi Kriteria Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif”, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan Melalui Pendekatan Restoratif}}{\text{Jumlah Perkara yang Memenuhi Kriteria Penerapan Keadilan Restoratif}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 13%. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Persentase Jumlah Perkara yang diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif” pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut :

Bulan	Perkara yang diajukan Restoratif Justice	Perkara yang Putusan Berhasil Restoratif Justice
Januari	8	0
Februari	12	1
Maret	4	0
April	3	0
Mei	14	1
Juni	6	1
Juli	7	1
Agustus	11	1
September	13	2
Oktober	6	1
November	7	4
Desember	4	0
Total	95	12

Tabel 3.19. *Penyelesaian Perkara Restoratif Justice Pada Tahun 2025*

Jumlah Jumlah Perkara yang diajukan *Restoratif Justice* sebanyak 95 perkara, dan perkara yang berhasil *Restoratif Justice* pada tahun 2025 sebanyak 12 perkara.

Berdasarkan data - data tersebut maka realisasi persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2025 adalah sebesar 13%, dan capaiannya sebesar 100% dari target sebesar 13%.

Sasaran Strategis	Tahun	Perkara yang diajukan Restoratif Justice	Perkara yang Putusan Berhasil Restoratif Justice	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	2025	95	12	13	13	100
	2024	27	1	4	5	80
	2023	43	1	2,3	100	2,3
	2022	39	1	2,5	100	2,5
	2021	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-

Tabel 3.20. Pengukuran Jumlah Perkara yang Berhasil diselesaikan Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Tahun 2020 s.d 2025

Dari tabel dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- 1) Realisasi kinerja Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2025 sebesar 13%, dengan capaian 100% yang untuk target sebesar 13%;
- 2) Capaian indikator dari 2025 s.d 2020 yaitu untuk tahun 2020 s.d 2021 adalah N/A. Kemudian ditahun 2022 sebesar 2,5%, tahun 2023 sebesar 2,3%, tahun 2024 sebesar 80% dan ditahun 2025 sebesar 100%;
- 3) Realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 13% yang mana dari target juga sebesar 13% sehingga dari sini dapat diperoleh capaian sebesar 100%, melebihi tahun 2024 yang mana capaiannya sebesar 80%.

Analisa Penyebab berhasilnya perkara diselesaikan melalui pendekatan keadilan *Restoratif Justice* adalah :

- 1) Mendorong hakim untuk menerapkan penyelesaian putusan dengan pendekatan restoratif justice sesuai dengan Keputusan Dirjen Badilum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif;
- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perkara secara rutin dan berkala, melalui Aplikasi MIS (Monitoring mplementasi SIPP);

- 3) Menempel stiker khusus pada berkas untuk perkara yang dapat diajukan *Restorative Justice* dan membuat buku register perkara *Restorative Justice*, untuk memantau keberhasilan penyelesaian perkara;
- 4) Peran serta koordinasi antara Majelis Hakim, Panitera Pengganti serta staf kepaniteraan dalam pengelompokan berkas - berkas dalam kategori *Restorative Justice* baik selama pendaftaran perkara hingga penyelesaian perkara.

8. Indikator Kinerja Persentase Pekara yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai perbandingan persentase Jumlah Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi dengan Jumlah Perkara yang Wajib dilakukan Mediasi, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Wajib dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 12%. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi” pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut :

Jenis Perkara	Jumlah Perkara yang diajukan Mediasi	Penyelesaian Mediasi	
		Akta Damai	Gagal
Perkara Gugatan	46	6	40

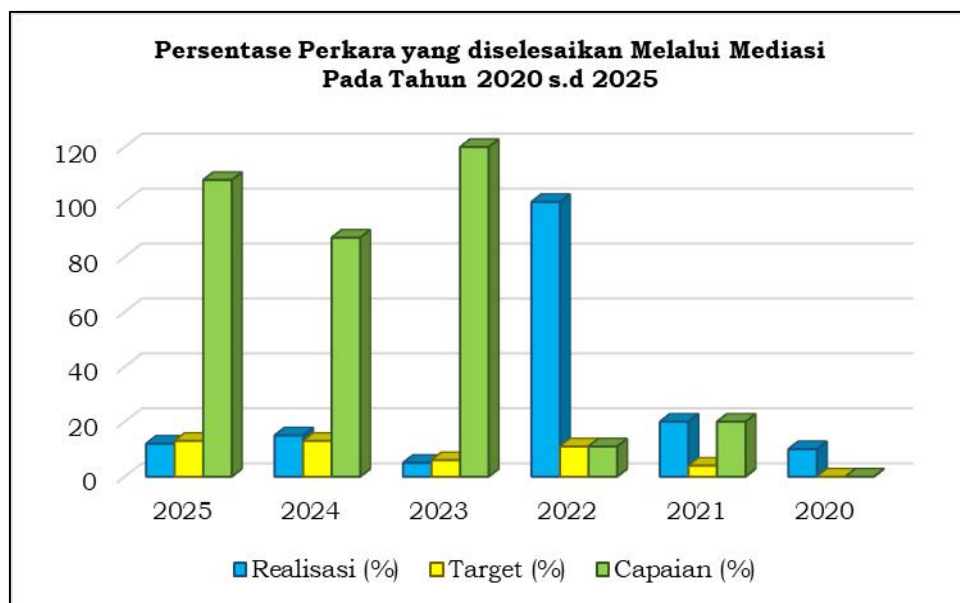
Tabel 3.21. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi Pada Tahun 2025

Jumlah perkara yang diajukan mediasi pada tahun 2025 sebanyak 46 perkara, sedangkan jumlah perkara yang dapat diselesaikan dengan mediasi pada tahun 2025 sebanyak 6 perkara.

Berdasarkan data - data tersebut maka realisasi persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2025 adalah sebesar 13%, dan capaiannya sebesar 108% dengan target untuk tahun 2025 sebesar 12%.

Sasaran Strategis	Tahun	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi	2025	12	13	108
	2024	15	13	87
	2023	5	6	120
	2022	100	11	11
	2021	20	4	20
	2020	10	0	0

Tabel 3.22. Persentase Perkara yang diselesaikan Melalui Mediasi Pada Tahun 2020 s.d 2025



Grafik 3.5. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 8 Tahun 2020 s.d 2025

Dari tabel dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- 1) Target dari penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah 12%, yang mana untuk realisasi ditahun 2025 adalah 13% dengan capaian sebesar 108%;
- 2) Capaian indikator periode 2020 s.d 2025 adalah : Tahun 2020 sebesar “0%”, tahun 2021 sebesar 20%, tahun 2022 sebesar 11%, tahun 2023 sebesar 120%, tahun 2024 sebesar 87% dan ditahun 2025 sebesar 108%;
- 3) Realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 13%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah capaian Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 12%. Berarti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB berhasil mencapai dan melebihi target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab berhasilnya Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2025 adalah :

- 1) Adanya upaya dari Mediator hakim untuk mendorong perdamaian melalui mediasi kepada para pihak yang bersengketa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

9. Indikator Kinerja Prosentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai Persentase Jumlah Perkara Anak yang Berhasil diselesaikan Secara Diversi dengan Jumlah Perkara Anak yang telah Selesai Proses Diversi, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Perkara Anak yang Berhasil diselesaikan Secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Anak yang Telah Selesai Proses Diversi}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 2%. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “N/A” Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi” pada tahun 2025 ditampilkan pada gambar berikut :

Nomor	Bulan	Jumlah Pelaksanaan Diversi	Jumlah Sepakat Diversi	Persentase
1	Januari	0	0	%
2	Februari	0	0	%
3	Maret	0	0	%
4	April	0	0	%
5	Mei	0	0	%
6	Juni	0	0	%
7	Juli	0	0	%
8	Agustus	0	0	%
9	September	0	0	%
10	Oktober	0	0	%
11	November	0	0	%
12	Desember	0	0	%
13	Tahun (Total)	0	0	%

Gambar 3.4. Keadaan Diversi Perkara Anak Pada Tahun 2025

Pada tahun 2025, tidak ada perkara anak yang masuk untuk diselesaikan secara diversi. Berdasarkan data - data tersebut maka realisasi Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun 2025 adalah sebesar 0%, dan capaiannya sebesar 0%.

Sasaran Strategis	Tahun	Perkara Anak Memenuhi Syarat diajukan Diversi	Perkara Anak yang Berhasil Diversi	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara Pidana	2025	N/A	2	N/A	2	N/A
	2024	N/A	90	N/A	90	N/A

Sasaran Strategis	Tahun	Perkara Anak Memenuhi Syarat diajukan Diversi	Perkara Anak yang Berhasil Diversi	Realisasi (%)	Target (%)	Capaian (%)
Anak yang diselesaikan dengan Diversi	2023	1	100	100	100	100
	2022	N/A	100	N/A	100	N/A
	2021	1	1	33,33	1	3
	2020	3	100	60	100	60

Tabel 3.23. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Pada Tahun 2020 s.d 2025

Dari tabel di atas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- 1) Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun 2025 adalah N/A%;
- 2) Capaian Indikator dari tahun 2025, tahun 2024 serta tahun 2022 ada N/A;
- 3) Untuk tahun 2023 capaiannya sebesar 100% serta tahun 2020 capaiannya sebesar 60%;
- 4) Realisasi tahun 2025, tahun 2024 serta tahun 2022 ada N/A, tahun 2023 sebesar 100% dan untuk realisasi ditahun 2020 realisasinya sebesar 60%.

Analisa penyebab tidak tercapainya target tahun 2025 adalah :

- 1) Sesuai dengan keadaan dilapangan, bahwasannya kesepakatan damai tersebut selesai ditingkat penyidik (kepolisian atau kejaksaan) sehingga tidak masuk dalam perhitungan diversi di tingkat pengadilan.

10. Persentase Perkara Perdata Tingkat Pertama yang Menggunakan E-Court

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai “Persentase Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama yang diajukan Menggunakan E-Court dengan Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama yang diajukan”, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama yang diajukan Menggunakan E – Court}}{\text{Jumlah Perkara Perdata Tingkat Pertama yang diajukan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 100%. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court” pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut :

Perkara	Jumlah Perkara Perdata yang diajukan	Jumlah Perkara Perdata yang Ddiajukan Menggunakan E-Court	Realisasi (%)
Gugatan	57	57	100
Gugatan Sederhana	22	22	100
Permohonan	64	64	100
Bantahan	1	1	100
Konsinyasi	27	27	100
Arbitrase	0	0	100
Total	171	171	100

Tabel 3.24. Jumlah Perkara Perdata E-Court Pada Tahun 2025

Pada tahun 2025, jumlah perkara perdata sebanyak 171 perkara (pengajuan), yang terdiri dari 57 perkara Gugatan, 22 Perkara Gugatan Sederhana dan 64 perkara Permohonan, Bantahan 1, Konsinyasi 27, yang mana seluruh pengajuan tersebut telah melalui *ecourt*.

Berdasarkan data - data tersebut maka realisasi Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, dan capaiannya sebesar 100%.

Dari tabel di atas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- 1) Realisasi kinerja Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court pada tahun 2025 adalah 100%, dan capaian sebesar 100%. dengan substansi jumlah perkara perdata yang diajukan sama dengan jumlah perkara perdata yang diajukan menggunakan e-Court.

Analisa penyebab keberhasilan tercapainya target tahun 2025 adalah :

- 1) Kecepatan verifikasi oleh petugas pengadilan terhadap berkas perkara *ecourt* yang masuk;
- 2) Kemampuan dan pengetahuan Pengguna Terdaftar (advokat) atau pengguna lain dalam mengoperasikan aplikasi e-Court;
- 3) Kewajiban untuk perkara perdata yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai seluruhnya harus menggunakan e-Court.

11. Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai “Persentase Jumlah Perkara Pidana yang dilimpahkan Secara Elektronik dengan Jumlah Perkara Pidana yang dilimpahkan”, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Persentase Jumlah Perkara Pidana yang dilimpahkan Secara Elektronik}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$$

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 100%. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)” pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut :

Bulan	Perkara yang dilimpahkan Secara Elektronik	Perkara Pidana yang dilimpahkan
Januari	12	12
Februari	29	29
Maret	51	51
April	14	14
Mei	40	40
Juni	47	47
Juli	31	31
Agustus	41	41
September	35	35
Oktober	22	22
November	34	34
Desember	34	34
Total	390	390

Tabel 3.25. Jumlah Perkara Pelimpahan Pidana E-Berpadu Perbulan Pada Tahun 2025

Pada tahun 2025, jumlah perkara Pidana yang dilimpahkan sebanyak 390 perkara. Perkara pidana yang dilimpahkan menggunakan eberpadu sebanyak 390 perkara, artinya seluruh perkara pidana telah menggunakan aplikasi eberpadu (elektronik).

Berdasarkan data - data tersebut maka realisasi Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, dan capaiannya sebesar 100% dengan target sebesar 100%.



Grafik 3.6. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 11 Tahun 2025

Dari tabel dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- 1) Realisasi kinerja Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) pada tahun 2025 adalah 100%, dan capaian sebesar 100%;
- 2) Realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah capaian Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) sebesar 100%. Berarti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa penyebab keberhasilan tercapainya target tahun 2025 adalah :

- 1) Kecepatan verifikasi oleh petugas pengadilan terhadap berkas perkara pidana yang masuk;

- 2) Koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan), dalam pelaksanaan pelimpahan perkara secara elektronik (e-berpadu).

12. Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (E-Berpadu)

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai “Persentase Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dengan Jumlah Perkara Pidana yang dilimpahkan”, difungsikan sebagai berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Layanan Perkara Pidana yang diajukan Secara Elektronik}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$$

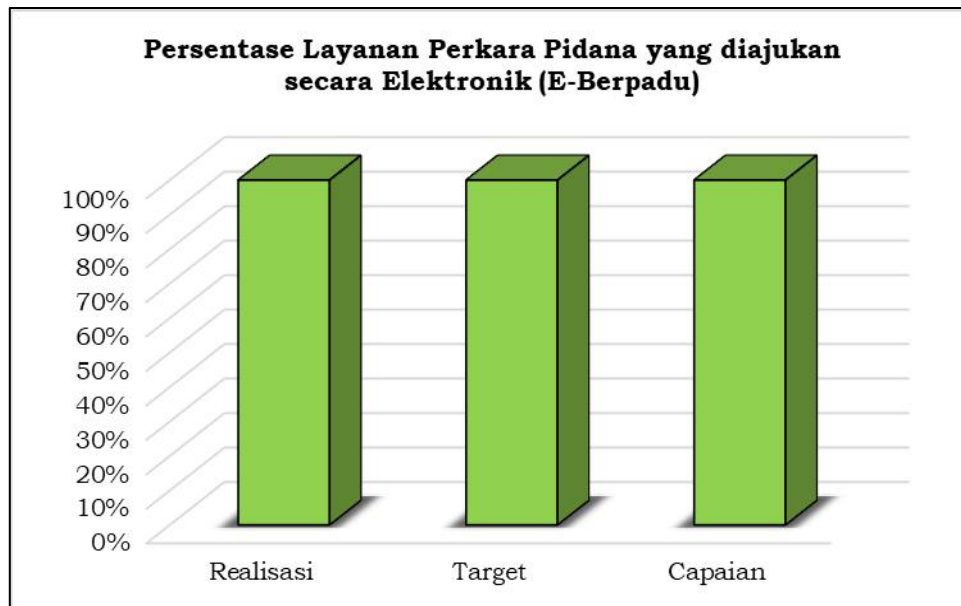
Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 100%. Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)” serta Jumlah Perkara Pidana yang dilimpahkan pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut :

JENIS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES
Pelimpahan	12	29	51	14	40	47	31	41	35	22	34	34
Penahanan	28	20	30	32	23	22	39	24	27	21	25	41
Sita	59	68	61	62	94	56	67	48	60	57	51	56
Penggeledahan	9	19	14	16	40	17	31	16	15	16	10	17
Izin Besuk	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembantaran	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Diversi	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Izin Pinjam Pakai	4	1	3	1	4	10	2	3	1	3	3	2
Penahanan Banding	8	3	5	3	9	4	9	14	3	5	2	7
Penahanan MA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berkas Pra Peradilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Penanguhan Penahanan	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	4
Pindah Tempat Sidang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Izin Keluar Tahanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PERBULAN	123	140	166	129	210	156	180	146	141	124	125	163
TOTAL TAHUNAN	1803											

Tabel 3.26. Jumlah Layanan Perkara Pidana yang diajukan Secara Elektronik

Pada tahun 2025, jumlah layanan perkara Pidana yang dilimpahkan sebanyak pada periode 2025 sebanyak 1803 layanan Perkara pidana, Layanan yang dilimpahkan menggunakan eberpadu sebanyak 1803 layanan, artinya seluruh layanan perkara pidana telah menggunakan aplikasi eberpadu (elektronik).

Berdasarkan data - data tersebut maka realisasi Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada tahun 2025 adalah sebesar 100%, dan capaiannya sebesar 100%.



Grafik 3.7. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 1 Indikator 12 Tahun 2025

Dari tabel dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- 1) Realisasi kinerja Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) pada tahun 2025 adalah 100%, dan capaian sebesar 100%;
- 2) Realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah capaian Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) sebesar 100%. Berarti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah;
- 3) Seluruh perkara pidana yang diajukan pada tahun 2025, semua telah melalui pengajuan secara elektronik.

Analisa penyebab keberhasilan tercapainya target tahun 2025 adalah :

- 1) Kecepatan verifikasi oleh petugas pengadilan terhadap berkas layanan perkara pidana yang masuk melalui eberpadu;
- 2) Koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan), dalam pelaksanaan pelimpahan perkara secara elektronik (eberpadu);
- 3) Sosialisasi layanan eberpadu melalui media sosial maupun secara tatap muka pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Sasaran 2 : Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik terdiri atas 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu :

1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan

Indikator kinerja ini dikuantitatifkan sebagai indeks kepuasan pencari keadilan sesuai dengan PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik, difungsikan sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Survey mengenai Indeks Kepuasan Layanan Pengadilan dilakukan sebanyak empat periode, yaitu periode setiap tahunnya periode Januari s.d Maret, periode April s.d Juni, periode Juli s.d September dan periode Oktober s.d Desember. Metode yang dilakukan dalam survey ini adalah metode random sampling, dengan populasi penelitian semua masyarakat pengguna layanan pengadilan seperti : masyarakat pencari keadilan, polisi, jaksa, pengacara (Advokat), dan masyarakat umum lainnya. Variabel pada pengukuran ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup, antara lain : Persyaratan, Prosedur, Waktu pelayanan, biaya / tarif, produk spesifikasi

jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, maklumat pelayanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan. Kategorisasi mutu pelayanan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB ditentukan sebagai berikut :

No.	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1.	A (Sangat Baik)	81,26 – 100,00	3,26 – 4,00
2.	B (Baik)	62,51 – 81,25	2,51 – 3,25
3.	C (Kurang Baik)	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50
4.	D (Tidak Baik)	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75

Tabel 3.27. Kategori Mutu Pelayanan

Hasil survey kepuasan masyarakat pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB dapat dilihat pada tabel berikut :

Periode	Jumlah Responden	Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala 1-4)	Kategori Mutu Pelayanan
Januari - Maret 2025	51	4	Sangat Baik
April - Juni 2025	45	4	Sangat Baik
Juli - September 2025	33	4	Sangat Baik
Oktober - Desember 2025	48	4	Sangat Baik
Rata - Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 : 4 (Sangat Baik)			
Januari - Maret 2024	71	4	Sangat Baik
April - Juni 2024	84	4	Sangat Baik
Juli - September 2024	84	4	Sangat Baik
Oktober - Desember 2024	68	4	Sangat Baik
Rata - Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 : 4 (Sangat Baik)			
Januari - Maret 2023	46	4	Sangat Baik
April - Juni 2023	28	4	Sangat Baik
Juli - September 2023	178	4	Sangat Baik
Oktober - Desember 2023	74	4	Sangat Baik
Rata - Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 : 4 (Sangat Baik)			
Januari - Maret 2022	116	4	Sangat Baik
April - Juni 2022	134	4	Sangat Baik
Juli - September 2022	85	4	Sangat Baik
Oktober - Desember 2022	78	4	Sangat Baik

Periode	Jumlah Responden	Indeks Kepuasan Masyarakat (Skala 1-4)	Kategori Mutu Pelayanan
Rata - Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 : 4 (Sangat Baik)			
Januari - Maret 2021	80	4	Sangat Baik
April - Juni 2021	62	4	Sangat Baik
Juli - September 2021	87	4	Sangat Baik
Oktober - Desember 2021	101	4	Sangat Baik
Rata - Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 : 4 (Sangat Baik)			
Januari - Maret 2020	55	4	Sangat Baik
April - Juni 2020	60	4	Sangat Baik
Juli - September 2020	70	4	Sangat Baik
Oktober - Desember 2020	68	4	Sangat Baik
Rata - Rata Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 : 4 (Sangat Baik)			

Tabel 3.28. Indeks Kepuasan Masyarakat Periode Tahun 2020 s.d 2025

Berdasarkan data - data tersebut maka realisasi indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2025 sebesar 4.00 dan capaian 100.

Dari tabel di atas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- 1) Target tahun 2025 yang ditetapkan untuk indikator : Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah sebesar 4.00, Realisasi pada indikator tersebut sebesar 4.00 dengan Katagori A (Sangat Baik) Hal ini berarti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025;
- 2) Dari tabel Indeks Kepuasan Masyarakat dapat disimpulkan bahwasannya dari tahun 2020 s.d 2025, Pengadilan Negeri Pangkalan Kelas IB mendapat predikat “Sangat Baik” atau A.

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan *briefing* petugas PTSP setiap hari untuk monitoring pelaksanaan tugas serta kendala yang dihadapi oleh petugas PTSP;

- 2) Peningkatan Kompetensi petugas PTSP melalui pelatihan pelayanan prima yang bekerjasama dengan Lembaga yang berkompeten seperti Perbankan (BRI dan BSI Kec. Pangkalan Balai);
- 3) Melaksanakan MOU dengan Sekolah Luar Biasa (SLB) terkait pemberian layanan kepada penyandang disabilitas;
- 4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengawasan secara rutin dan berkelanjutan pada PTSP oleh penanggung jawab PTSP dan hakim pengawas PTSP setiap hari dan setiap bulan guna meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat;
- 5) Pelaksanaan rapat monev untuk menindaklanjuti hasil survey terhadap unsur pelayanan yang bernilai rendah.

B. Sasaran 3 : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional terdiri atas 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu :

- 1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satker Pengadilan;
- 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan (Dipa 01);
- 3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan (Dipa 03);
- 4) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (Dipa 01);
- 5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (Dipa 03);
- 6) Indeks Pengelolaan Aset (IPA).

Analisa terhadap pencapaian masing-masing target indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satker Pengadilan

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) di Satker Pengadilan adalah ukuran statistik kualitas pegawai berdasarkan empat dimensi : kualifikasi pendidikan, kompetensi (pelatihan), kinerja (SKP), dan disiplin. Pengukuran ini dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan melalui aplikasi MyASN BKN untuk memetakan profesionalitas.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 92%. Untuk lebih melihat secara mendetail dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Tahun	Realisasi	Target	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satker Pengadilan	2025	90	92	97,82

Tabel 3.29. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satker Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB Tahun 2025

Pada tahun 2025, Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) dilihat dari aplikasi SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI) sebesar 90.00.

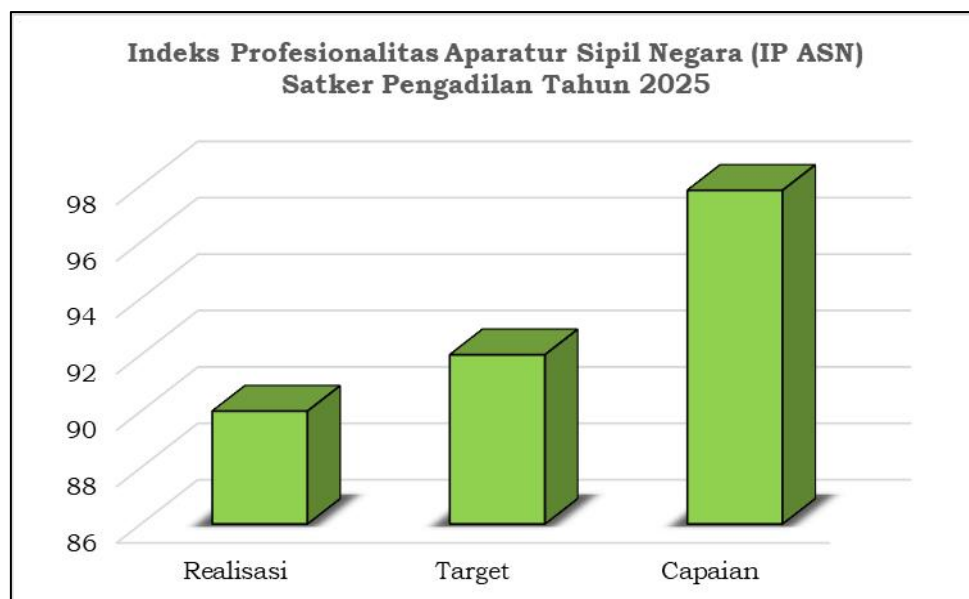
NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH MASA KERJA > 1 TH	INDEKS PROFESIONAL ASN	KATEGORI	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	DATA KUALIFIKASI KOSONG	DATA KOMPETENSI KOSONG
1	401909 - Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	43	2	90.00	tinggi	22.50	35.00	27.50	5.00	-	-

Gambar 3.5. Monitoring IPASN melalui Aplikasi Sikep Periode 2025

Metode yang dilakukan dalam Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) ini adalah dilakukan secara kuantitatif berdasarkan empat dimensi utama : kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin Pengukuran ini melibatkan penginputan dan pembaruan data secara berkala oleh ASN melalui aplikasi SIKEP.

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Profesionalitas ASN pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebesar 90.00 (kategori tinggi). Dengan jumlah pegawai sebanyak 44 orang, dan nilai masing - masing dimensi :

Kualifikasi : 22,50
Kompetensi : 35,00
Kinerja : 27,50
Disiplin : 5,00



Grafik 3.8. Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis 3 Indikator 1 Tahun 2025

Dari tabel dan grafik di atas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- 1) Target tahun 2025 yang ditetapkan untuk indikator : Persentase Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satker Pengadilan adalah sebesar 92. Realisasi pada indikator tersebut sebesar 90. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025;
- 2) Pencapaian tahun 2025 diatas 97,82. Realisasi kinerja pada tahun 2025 sebesar 90 jika dibandingkan dengan target jangka menengah untuk Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satker Pengadilan sebesar 92. Berarti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam target jangka menengah.

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pemantauan berkala terhadap 4 dimensi IP ASN, termasuk evaluasi rutin terhadap hasil Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan kehadiran disiplin;
- 2) Melakukan monitoring ketat terhadap pemutakhiran data mandiri di MyASN BKN, dan aplikasi SIKEP untuk memastikan setiap sertifikat diklat atau ijazah baru segera terinput untuk mendongkrak nilai dimensi kompetensi dan kualifikasi;
- 3) Banyak dan seringnya para aparatur pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB mengikuti terkait diklat atau pendidikan peningkatan kualitas SDM baik hadir secara langsung atau melalui media elektronik yang mana hasil dari kegiatan tersebut berupa sertifikat di unggah pada SIKEP masing-masing pegawai.

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2025, pada tahun 2026 direncanakan :

- 1) Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dalam aplikasi e-Kinerja BKN kini direncanakan agar sinkron dengan Indikator Kinerja Utama

(IKU) Satker, sehingga realisasi kinerja organisasi langsung berdampak pada nilai IP individu;

- 2) Validasi data pendidikan dilakukan secara berkala oleh tim Kepegawaian sebelum batas waktu penilaian IP ASN di akhir tahun;
- 3) Melakukan Rapat monitoring evaluasi setiap triwulan untuk memonitor progres input data;
- 4) Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala oleh atasan langsung terhadap bawahan;
- 5) Menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis sistem informasi (seperti aplikasi SIKEP / Aplikasi kinerja Mahkamah Agung).

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan DIPA 01 dan DIPA 03

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan adalah alat ukur yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas kinerja pengelolaan anggaran belanja (DIPA). Nilai ini mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi, mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan hasil.

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari :

- a. Revisi DIPA (10%);
- b. Penyerapan Anggaran (20%);
- c. Penyelesaian Tagihan (10%);
- d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA);
- e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%);
- f. Belanja Kontraktual (10%);
- g. Pengelolaan UP dan TUP (10%);
- h. Capaian Output (25%).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) bersifat spesifik dan dipantau secara berkala melalui aplikasi OMSPAN Kemenkeu dan juga Monev Kemenkeu.

Target indikator kinerja ini pada tahun 2025, sebagaimana ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025 adalah sebesar 86 baik untuk dipa 01 dan dipa 03. Pengukuran Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan” pada tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut :

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	Desember	160	005	401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	Nilai	100,00	81,75	100,00	100,00	100,00	99,40	100,00	97,20	100%	0,00	97,20
						Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
						Nilai Akhir	10,00	12,26	20,00	10,00	10,00	9,94	25,00				
						Nilai Aspek	90,88			99,85			100,00				

Gambar 3.6 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

No.	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	Desember	160	005	402017	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	Nilai	100,00	64,11	100,00	0,00	0,00	98,88	100,00	74,50	80%	0,00	93,13
						Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
						Nilai Akhir	10,00	9,62	20,00	0,00	0,00	9,89	25,00				
						Nilai Aspek	82,06			99,44			100,00				

Gambar 3.7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 (Badan Peradilan Umum)

Dipa	Nilai IKPA	Target	Realisasi	Capaian
DIPA 01	97,20	88	97,20	110
DIPA 03	93,13	88	74,50	84,65
Rata - Rata Capaian				97,32

Tabel 3.30. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 dan DIPA 03 Tahun 2025

Pada tahun 2025, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 sebesar 97,20 dan untuk DIPA 03 sebesar 74,50. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian / Lembaga. Nilai IKPA ≥ 95 , termasuk kategori “SANGAT BAIK”, artinya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk total capaian Nilai Indikator



Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dipa 01 dan Dipa 03 berhasil melaksanakan anggaran tahun 2025 bahkan melebihi target yang ditetapkan ditahun 2025 dengan total capaian (162,5).

Dari tabel di atas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- 1) Target untuk nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran untuk dipa 01 adalah 88. Yang mana realisasi untuk tahun 2025 dipa 01 adalah 97,20 dengan capaian 110;
- 2) Target untuk nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran untuk dipa 03 adalah 88. Yang mana realisasi untuk tahun 2025 dipa 01 adalah 74,50 dengan capaian 84,65;
- 3) Untuk total capaian dipa 01 dan dipa 03 tahun 2025 sebesar 97,32

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

- 1) Melakukan Penyelesaian Tagihan Tepat Waktu atau Memastikan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) segera setelah BAST diterima, sehingga terhindar dari pinalti indikator penyelesaian tagihan;
- 2) Perencanaan penarikan dana di Halaman III DIPA sesuai dengan realisasi belanja, dengan deviasi minimal (di bawah 5%);
- 3) Memonitoring dan mengevaluasi secara rutin pada rapat internal bulanan untuk progres setiap indikator;
- 4) Untuk nilai capaian yang melebihi 150 (melebihi angka wajar) kedepannya akan lebih disesuaikan antara target dengan realisasi sehingga angka capaian tidak terlalu besar.

Dengan memperhatikan hasil realisasi dan capaian pada tahun 2025, pada tahun 2026 direncanakan :

- 1) Pendaftaran kontrak ke KPPN dilakukan tepat waktu sesuai regulasi Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024;
- 2) Perencanaan Matang Penyusunan anggaran di awal tahun yang sangat akurat sehingga tidak memerlukan banyak perubahan di tengah jalan;
- 3) Pimpinan Satker (KPA dan Sekretaris) aktif melakukan rapat monitoring mingguan untuk mengevaluasi rapor di aplikasi OM-SPAN;

- 4) Penyelesaian Tagihan atau Memastikan penyelesaian tagihan / SPM dilakukan tepat waktu, maksimal 5 hari kerja setelah BAST / penyelesaian pekerjaan;
- 5) Lebih memonitoring antara target, serta realisasi.

3. Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Satker Pengadilan DIPA 01 dan DIPA 03

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satker Pengadilan adalah alat ukur yang ditetapkan Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas kinerja pengelolaan anggaran belanja (DIPA). Nilai ini mencerminkan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi, mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan, dan hasil.

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari :

- a. Revisi DIPA (10%);
- b. Penyerapan Anggaran (20%);
- c. Penyelesaian Tagihan (10%);
- d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA);
- e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%);
- f. Belanja Kontraktual (10%);
- g. Pengelolaan UP dan TUP (10%);
- h. Capaian Output (25%).

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (Dipa 01 dan Dipa 03) tahun 2025 bersifat spesifik dan dipantau secara berkala melalui aplikasi OMSPAN Kemenkeu dan juga Monev Kemenkeu yang mana untuk lebih jelas dan detail dapat dilihat pada tabel berikut :

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	005.01.401909	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 3.8. Nilai Indikator Perencanaan Anggaran DIPA 01
(Badan Urusan Administrasi) Tahun 2025

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	Efektivitas	Efisiensi	
				Capaian RO ↑↓	Penggunaan SBK ↑↓	Efisiensi SBK ↑↓
1	005.03.402017	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	85,00	100,00	100,00	0,00

Gambar 3.9. Nilai Indikator Perencanaan Anggaran DIPA 03
(Badan Peradilan Umum) Tahun 2025

Dipa	Nilai IKPA	Target	Realisasi	Capaian
DIPA 01	100	86	100	116
DIPA 03	85	86	85	98,83
Rata - Rata Capaian				107

Tabel 3.31. Nilai Indikator Perencanaan Anggaran
DIPA 01 dan DIPA 03 Tahun 2025

Pada tahun 2025, Indikator Perencanaan Anggaran DIPA 01 sebesar 100 dan untuk DIPA 03 sebesar 98,83. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian / Lembaga. Nilai IKPA ≥ 95 , termasuk kategori “SANGAT BAIK”, artinya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk total capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dipa 01 dan Dipa 03 berhasil melaksanakan anggaran tahun 2025 untuk total capaian bahkan melebihi target yang ditetapkan ditahun 2025 sebesar 107.

Dari tabel di atas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- 1) Target untuk nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran untuk dipa 01 adalah 86. Yang mana realisasi untuk tahun 2025 dipa 01 adalah 100 dengan capaian 116;

- 2) Target untuk nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran untuk dipa 03 adalah 86. Yang mana realisasi untuk tahun 2025 dipa 01 adalah 85 dengan capaian 98,83. Untuk total capaian nilai perencanaan dipa 01 dan dipa 03 tahun 2025 sebesar 107.

Analisa Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

- 1) Melakukan monitoring terhadap perencanaan penarikan anggaran atau Halaman III DIPA sesuai dengan realisasi belanja, dengan deviasi minimal (di bawah 5%);
- 2) Memonitoring dan mengevaluasi secara rutin pada rapat internal bulanan untuk progres setiap indikator.

4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Satuan Kerja Pengadilan telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengelola aset - asetnya dengan efektif. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) yang tinggi mencerminkan keberhasilan dalam mengelola sumber daya yang ada. Dengan IPA yang baik, Satuan Kerja Pengadilan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pengelolaan aset yang baik juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya. Dengan demikian, Satuan Kerja Pengadilan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan *stakeholders* lainnya. Pengelolaan aset yang efektif memerlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai terus meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya dalam mengelola aset - asetnya untuk mencapai tujuan.

Berikut ini Nilai Indikator Pengelolaan Aset Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025.

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI Kode Satker : 00501100401909000KD	Rekapitulasi Indeks Pengelolaan Aset	
	Parameter 1 - Penatausahaan Barang Milik Negara (Bobot 20%)	
	• Sub Parameter 1 - Kesesuaian & kelengkapan transaksi BMN (Bobot 12%)	4 Sangat Baik Indeks = $4 \times 12\% = 0,48$
	• Sub Parameter 2 - Penjelasan Telaah Data BMN (Bobot 8%)	4 Sangat Baik Indeks = $4 \times 8\% = 0,32$
	Parameter 2 - Realisasi PNPB Pengelolaan Aset (Bobot 15%)	
	• Sub Parameter 1 - Realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN (Bobot 7,5%)	1 Buruk Indeks = $1 \times 7,5\% = 0,075$
	• Sub Parameter 2 - Realisasi PNPB berdasar penetapan pengguna barang (Bobot 7,5%)	3 Baik Indeks = $3 \times 7,5\% = 0,225$
	Parameter 3 - Ketepatan waktu dokumen RKBMN (Bobot 25%)	
	• Sub Parameter 1 - Ketepatan waktu usulan RKBMN (Bobot 7,5%)	3 Baik Indeks = $3 \times 7,5\% = 0,225$
	• Sub Parameter 2 - Ketepatan waktu LBKP (Bobot 7,5%)	3 Baik Indeks = $3 \times 7,5\% = 0,225$
	• Sub Parameter 3 - Ketepatan & kelengkapan Wasdal (Bobot 10%)	3 Baik Indeks = $3 \times 10\% = 0,3$
	Parameter 4 - Tindak lanjut pemanfaatan BMN (Bobot 10%)	4 Sangat Baik Indeks = $4 \times 10\% = 0,4$
	Parameter 5 - Tindak lanjut BMN yg dihentikan penggunaannya (Bobot 10%)	2 Cukup Indeks = $2 \times 10\% = 0,2$
	Parameter 6 - BMN memiliki dokumen kepemilikan (Bobot 10%)	1 Buruk Indeks = $1 \times 10\% = 0,1$
	Parameter 7 - Penggunaan BMN sesuai ketentuan (Bobot 10%)	4 Sangat Baik Indeks = $4 \times 10\% = 0,4$
TOTAL NILAI INDIKATOR PENILAIAN ASET (IPA)		2,95

Gambar 3.10. Nilai Indikator Pengelolaan Aset Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025

Indikator	Nilai IKPA	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Pengelolaan Aset	2,95	4	2,95	73,75

Tabel 3.32. Tabel Target, Realisasi Serta Capaian dari Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Target Nilai Indikator Pengelolaan Aset tahun 2025 adalah 4;
- 2) Realisasi Nilai Indikator Pengelolaan Aset Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2025 sebesar 2,95 yang mana data diambil dari aplikasi e-Sadewa;
- 3) Nilai capaian dari Nilai Indikator Pengelolaan Aset sebesar 73,75 didapat dari aplikasi e-sadewa.mahkamahagung.go.id;
- 4) Kategori untuk Nilai Indikator Pengelolaan Aset pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah “Cukup”.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Analisa penyebab kegagalan dan keberhasilan :

- 1) Adanya monitoring berkala antara Kuasa Pengguna Barang, Kasubbag Umum dan Keuangan serta operator BMN terkait inventaris barang pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
- 2) Monitoring secara berkala melalui aplikasi e-Sadewa;
- 3) Untuk nilai realisasi pada aplikasi e-Sadewa sebesar 2,95 “Cukup” karena pada saat akan akhir tahun pelaporan, beberapa barang yang sedang dalam pendaftaran dikarenakan baru saja mendapat hibah.

3.1.2 Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi sumber daya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB periode 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peradilan yang Efektif Transparan, Responsif dan Modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	97%	96%	98,97%
		b. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	99.80%	100%	100%



No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan / amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	100%	100%	100%
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	99.80%	100%	100%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	60%	60%	100%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	13%	13%	100%



No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	12%	13%	108%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	2%	N/A	N/A
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.	100%	100%	100%
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	100%	100%	100%
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).	100%	100%	100%
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis I : 92,31					
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	4	4	100
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis II : 100					



No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	92	90	97,82
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 01).	88	97	110
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan (DIPA 03).	88	93	105
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 01).	86	100	116
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (DIPA 03).	86	85	98,83
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.	4	2,95	73,75
Rata - Rata Capaian Sasaran Strategis III : 100,23					

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Total Capaian				97,51	
	Anggaran Awal	Anggaran Akhir		%	
Dipa 01	Rp.5.077.615.000,-	Rp. 5,882,899,000,-		93,23	
Dipa 03	Rp.151.990.000,-	Rp. 150.390.000,-		99,02	

Tabel 3.33. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk penggunaan sumber daya terkait sumber anggaran selama periode 2025 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB dinilai efektif dan terpenuhi, khususnya terkait sumber daya anggaran baik itu Dipa 01 dan Dipa 03 yang mana juga mempengaruhi dari hasil capaian dan realisasi kinerja pada periode 2025.

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta mencapai target rencana kinerja sesuai dokumen Perjanjian Kinerja, tidak terlepas dari kebutuhan dana / anggaran. Pada Periode 2025, Mahkamah Agung menyediakan anggaran untuk pelaksanaan 2 (tiga) program pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB, yaitu sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen.
 - a. Layanan Umum.
 - Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan.
 - b. Layanan Perkantoran
 - Gaji dan Tunjangan.
 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor.
 - c. Layanan Pemantauan dan Evaluasi.
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
 - a. Perkara Hukum Perseorangan.
 - Pendaftaran Berkas Perkara.
 - Penetapan Hari Sidang.

- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan.
 - Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan.
 - Pengiriman Petikan / Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa.
 - Minutasi / Upaya Hukum.
 - Penanganan Perkara Banding Di Pengadilan Tingkat Pertama.
 - Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Di Pengadilan Tingkat Pertama.
- b. Layanan Bantuan Hukum.
- Layanan Pos Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Umum.

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB tahun anggaran 2025, rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Anggaran Awal	Anggaran Revisi Akhir	Realisasi (%)
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 5.077.615.000,-	Rp. 5,882,899,000,-	93,23
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 151.990.000,-	Rp. 150.390.000,-	99,02

Tabel 3.34. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum

3.2.1 DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

Pada tahun 2025 realisasi dan persentase penyerapan anggaran DIPA (01) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB sebesar 93,23% yang mana perinciannya adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa (Rp)
1.	Program Dukungan Manajemen	5.882.899.000,-	5.484.600.603,-	93,23	398.298.397,-
	- Layanan Umum	700.000,-	700.000,-	100	0
	- Layanan Perkantoran	5.881.899.000,-	5.483.600.603,-	93,23	398.298.397,-
	- Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000,-	300.000,-	100	0

Tabel 3.35. Tabel Perincian Penyerapan Anggaran Dipa 01
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025

Untuk Dipa 01 (bersumber dari Badan Urusan Administrasi), dari Pagu Awal sebesar Rp. 5.077.615.000,- terdapat penambahan anggaran menjadi Rp. 5.882.899.000,- atau terjadi penambahan anggaran sebesar Rp.805.284.000,-.

Dari Pagu Akhir sebesar Rp. 5.882.899.000,- sampai dengan Desember 2025 realisasinya sebesar 93,23% atau kalau dirupiahkan sebesar Rp. 5.484.600.603,-.

Sisa dari pagu akhir tersebut sebesar Rp.398.298.397,- yang mana perinciannya sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Sisa (Rp)
1.	Layanan Perkantoran	5.881.899.000,-	5.483.600.603,-	93,23	398.298.397,-
	- Gaji dan Tunjangan	4.499.413.000,-	4.104.354.400,-	91,22	395.058.600,-
	- Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.382.486.000,-	1.379.246.203,-	99,77	3.239.797,-

Tabel 3.36. Tabel Perincian Sisa Anggaran Dipa 01
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025

3.2.2 DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Pada tahun 2025 realisasi dan persentase penyerapan anggaran DIPA (03) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB dari pagu akhir Rp. 150.390.000,- sebesar 99,02% atau di konversikan kedalam rupiah sebesar Rp. 148.912.246,- dengan perincian sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi (%)	Sisa (Rp)
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	150.390.000,-	99,02	1.477.754,-
	- Perkara Hukum Perseorangan	122.390.000,-	98,79	1.477.750,-
	- Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	28.000.000,-	100	4

Tabel 3.37. Tabel Perincian Penyerapan Anggaran Dipa 03
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025

Pada Dipa 03 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.477.750,- yang mana perinciannya sebagai berikut :



No.	Kegiatan	Pagu Akhir (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
1.	Perkara Hukum Perseorangan	122.390.000,-	98,79	120.912.250,-	1.477.750,-
	- Pendaftaran Berkas Perkara	68.425.000,-	99,96	68.395.580,-	29.420,-
	- Penetapan hari sidang	1.440.000,-	96,33	1.387.100,-	52.900,-
	- Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	6.240.000,-	97,59	6.089.650,-	150.350,-
	- Pemeriksaan di sidang pengadilan	15.900.000,-	98,49	15.660.000,-	240.000,-
	- Pengiriman petikan / salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa	1.900.000,-	86,03	1.634.500,-	265.500,-
	- Minutasi / Upaya Hukum	20.585.000,-	100	20.585.000,-	0
	- Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama	5.700.000,-	95,62	5.450.520,-	249.480,-
	- Penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Pengadilan Tinggi	2.200.000,-	77,72	1.709.900,-	490.100,-

Tabel 3.38. Tabel Perincian Sisa Anggaran Dipa 03
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025

3.3 Evaluasi SAKIP Oleh Pengadilan Tinggi Palembang

Untuk mengetahui sejauh mana Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Pengadilan Tinggi Palembang secara berkelanjutan melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Pengadilan Negeri Sumatera Selatan, dengan berpedoman pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) sesuai target yang ditentukan.

Aktivitas utama dalam pelaksanaan evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta menginterpretasikan hasilnya melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa implementasi SAKIP yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB telah memadai, kemudian dapat diberikan saran dan rekomendasi guna meningkatkan AKIP.

Hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2024, adalah sebagai berikut :



No.	Komponen / Sub Komponen / Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun Sebelumnya	Tahun 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	18,60	22,50
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	24,00	21,60
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	11,55	11,25
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,50	17,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			71,65	72,85
Predikat			BB (Sangat Baik)	BB (Sangat Baik)

Tabel 3.39. Hasil Evaluasi SAKIP Pengadilan Negeri
Pangkalan Balai Tahun 2024

Untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB melaksanakan :

1. Mengisi secara berkala capaian kinerja perbulan melalui aplikasi Komdanas, dan Aplikasi Batara;
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi per triwulan terhadap capaian kinerja;
3. Meningkatkan komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja dengan membahas kendala yang ada, penyebab dan langkah penyelesaian terhadap realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak mencapai target;
4. Melakukan koordinasi dan kolaborasi seluruh bagian pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB untuk menghasilkan capaian kinerja yang optimal;
5. Meningkatkan kualitas kompetensi ASN yang mengelola akuntabilitas kinerja dengan mengikutsertakan dalam kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi dan diklat SAKIP.

3.4 Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Pertama Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Palembang

Pengadilan Tinggi Palembang telah melakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024 untuk seluruh satuan kerja Di Sumatera Selatan berdasarkan surat Nomor :



2475/KPT.W6-U/PW1.1.1/VII/2025 tanggal 31 Juli 2025. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP telah dilaksanakan dan untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

Evaluasi SAKIP tahun 2024 ini dilakukan dengan menggunakan instrumen evaluasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Instrumen evaluasi ini mencakup beberapa aspek, seperti perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Evaluasi SAKIP tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kinerja satuan kerja di Sumatera Selatan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas satuan kerja di masa depan.

Beberapa aspek yang dievaluasi dalam SAKIP tahun 2024 antara lain :

1. Perencanaan kinerja : kemampuan satuan kerja dalam menyusun rencana kinerja yang efektif dan realistis;
2. Pengukuran kinerja : kemampuan satuan kerja dalam mengukur kinerja yang akurat dan transparan;
3. Pelaporan kinerja : kemampuan satuan kerja dalam melaporkan kinerja yang tepat waktu dan akurat;
4. Evaluasi kinerja : kemampuan satuan kerja dalam melakukan evaluasi kinerja yang efektif dan berkelanjutan.



Adapun perbandingan nilai evaluasi SAKIP tahun 2024 untuk satuan kerja Pengadilan Negeri se-Sumatera Selatan sebagai berikut :

No.	Unit Kerja	Nilai Per Komponen				Nilai	Kategori
		Perencanaan Kinerja (30)	Pengukuran Kinerja (30)	Pelaporan Kinerja (15)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (25)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PN Muara Enim	24	24,90	12,30	18,75	79,95	BB "Sangat Baik"
2.	PN Palembang	24	24	12,75	18	78,75	BB "Sangat Baik"
3.	PN Sekayu	23,10	24	11,55	20	78,65	BB "Sangat Baik"
4.	PN Prabumulih	24	24	11,25	19,25	78,50	BB "Sangat Baik"
5.	PN Baturaja	24	24,90	10,80	18,75	78,45	BB "Sangat Baik"
6.	PN Lubuk Linggau	24	23,10	11,55	19,25	77,90	BB "Sangat Baik"
7.	PN Lahat	24	21,60	12,30	20	77,90	BB "Sangat Baik"
8.	PN Kayu Agung	21,60	23,40	10,50	20	75,50	BB "Sangat Baik"
9.	PN Pangkalan Balai	22,50	21,60	11,25	17,50	72,85	BB "Sangat Baik"
10.	PN Pagaralam	21	22,50	10,80	16,25	70,55	BB "Sangat Baik"

Tabel 3.40. Tabel Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Pertama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Palembang

Berdasarkan Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2024, diharapkan satuan kerja di Sumatera Selatan dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dengan :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja;
2. Meningkatkan pengukuran kinerja yang akurat dan transparan;
3. Meningkatkan pelaporan kinerja yang tepat waktu dan akurat;
4. Meningkatkan evaluasi kinerja yang efektif dan berkelanjutan;
5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola kinerja;

6. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja.

3.5 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 telah disusun dan disampaikan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Palembang. Laporan ini berisi hasil evaluasi atas implementasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tahun 2024, yang mencakup aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Berikut ini adalah tabel rekomendasi serta tindak lanjut dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2024.

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
A.	PERENCANAAN KINERJA		
1.	Tambahkan Dokumen SK Penetapan Renstra.	Telah disusun dan dicantumkan dalam dokumen	Eviden Terlampir
2.	Terkait penetapan target kinerja tahun 2025 berdasarkan analisa target kinerja tahun 2024 harus dilakukan analisis kembali agar target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai, menantang dan realistis.	Telah disusun, diformalkan dan dilampirkan ke dalam dokumen	Eviden Terlampir
3.	Agar melampirkan dokumen analisa atas dokumen perencanaan kinerja yang menggambarkan <i>cascading</i> (contoh : dalam bentuk pohon kinerja).	Telah disusun, diformalkan dan dilampirkan ke dalam dokumen	Eviden Terlampir



No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
4.	Agar satker melampirkan dokumen Analisa atas dokumen perencanaan kinerja yang menggambarkan <i>crosscutting</i> (contoh : dalam bentuk pohon kinerja yang menggambarkan garis koordinasi antara sasaran di kepaniteraan dan di kesekretariatan).	Dokumen telah disusun dan dilampirkan kedalam bukti dukung.	Eviden Terlampir
5.	Agar satker melampirkan dokumen matriks pendanaan sehingga dapat di pastikan bahwa terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.	Dokumen telah disusun dan dilampirkan kedalam bukti dukung.	Eviden Terlampir
B. PENGUKURAN KINERJA			
1.	Agar kedepannya dalam setiap rapat kedinasan rutin setiap bulan, pimpinan PN Pangkalan Balai dapat menyampaikan serta mengevaluasi capaian kinerja dan menekankan pada upaya pimpinan untuk mengatasi kendala capaian kinerja satuan kinerja.	Dokumen telah disusun dan dilampirkan kedalam bukti dukung.	Eviden Terlampir
2.	Sebaiknya satuan kerja dapat menganalisis kinerja sebagai dasar penempatan / penghapusan jabatan dengan menyusun Abalisis Beban Kerja (ABK) atau matriks peran hasil, Dokumen Peta Jabatan, SKP, Rencana Pengembangan Pegawai, dan surat Keputusan Penataan Pegawai.	Dokumen telah disusun dan dilampirkan kedalam bukti dukung.	Eviden Terlampir
3.	Dalam setiap rapat kedinasan rutin PN Pangkalan Balai agar pimpinan dapat menyampaikan serta	Dokumen telah disusun dan dilampirkan	Eviden Terlampir



No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
	mengevaluasi capaian kinerja dan menekankan pada upaya Pimpinan mengatasi kendala capaian kinerja satuan kerja, pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.	kedalam bukti dukung.	
4.	Dalam setiap rapat kedinasan rutin bulanan PN Pangkalan Balai sebaiknya pimpinan dapat menyampaikan serta mengevaluasi capaian kinerja dan menekankan pada upaya Ketua Pengadilan untuk menyesuaikan kebijakan dalam mencapai kinerja.	Dokumen telah disusun dan dilampirkan kedalam bukti dukung.	Eviden Terlampir
5.	Sebaiknya monitoring dan evaluasi SOP dilakukan secara rutin setiap triwulan.	Dokumen telah disusun dan dilampirkan kedalam bukti dukung.	Eviden Terlampir
6.	Agar semua bagian / unit dari PN Pangkalan Balai dapat menjadikan capaian kinerja organisasi menjadi bahan evaluasi kinerja masing - masing bagian yang di buktikan dengan hasil monev setiap bagian / unit kerja di PN Pangkalan Balai untuk mengetahui permasalahan yang ada.	Dokumen telah disusun dan dilampirkan kedalam bukti dukung.	Eviden Terlampir
C.	PELAPORAN KINERJA		
1.	Agar dari setiap keberhasilan / kegagalan kinerja perlu diperjelas upaya dari satuan kerja untuk memitigasi permasalahan tidak tercapainya kinerja tersebut.	Dokumen telah disusun dan dilampirkan kedalam bukti dukung.	Eviden Terlampir



No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
2.	Agar pada penyusunan LKjIP tahun - tahun selanjutnya dapat mencantumkan data perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di Pengadilan Tingkat Pertama lainnya di wilayah hukum PT Palembang.	Dokumen telah disusun dan dilampirkan kedalam bukti dukung.	Eviden Terlampir
3.	Agar kedepannya rapat dinas rutin bulanan dan rapat berjenjang setiap bidang dapat dilaksanakan setiap bulan dengan pembahasan terkait kinerja Pengadilan dan semua unit didalamnya.	Dokumen telah disusun dan dilampirkan kedalam bukti dukung.	Eviden Terlampir
4.	Kedepanya, agar satker menyertakan narasi yang menjelaskan bahwa informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja pada salah satu bagian dalam laporan kinerja.	Dokumen telah disusun dan dilampirkan kedalam bukti dukung.	Eviden Terlampir
5.	Tambahkan dokumen Notula Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP tahun 2024, Rapat Reviu Renstra, dan Rapat Reviu Target dalam Perjanjian Kerja.	Dokumen telah disusun dan dilampirkan kedalam bukti dukung.	Eviden Terlampir
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL			
1.	Tambahkan data dukung berupa analisis atau narasi yang menggambarkan bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai (misalnya dapat di	Dokumen telah disusun dan dilampirkan kedalam bukti dukung.	Eviden Terlampir



No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Keterangan
	jelaskan bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja internal didapat berdasarkan rapat / pemantauan kinerja per triwulan).		
2.	Agar satuan kerja dapat menindaklanjuti rekomendasi kinerja tahun sebelumnya secara menyeluruh sehingga dapat memberikan perbaikan pada kinerja satuan kerja dan terlihat bahwa seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti.	Dokumen telah disusun dan dilampirkan kedalam bukti dukung.	Eviden Terlampir
3.	Tambahkan dokumen analisa terhadap laporan tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi kinerja internal per triwulan tahun 2024.	Dokumen telah disusun dan dilampirkan kedalam bukti dukung.	Eviden Terlampir
4.	Agar satuan kerja dapat menindaklanjuti rekomendasi kinerja tahun sebelumnya secara menyeluruh sehingga dapat memberikan perbaikan pada kinerja satuan kerja sehingga tampak bahwa telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi.	Dokumen telah disusun dan dilampirkan kedalam bukti dukung.	Eviden Terlampir

Tabel 3.41. *Tabel Rekomendasi Serta Tindak Lanjut dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2024*



Tindak Lanjut yang dilakukan Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2024, beberapa tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Kinerja : Satuan kerja akan meningkatkan kualitas perencanaan kinerja dengan menyusun rencana kinerja yang lebih efektif dan realistis;
2. Meningkatkan Pengukuran Kinerja : Satuan kerja akan meningkatkan pengukuran kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang lebih akurat dan transparan;
3. Meningkatkan Pelaporan Kinerja : Satuan kerja akan meningkatkan pelaporan kinerja dengan menyusun laporan kinerja yang lebih tepat waktu dan akurat;
4. Meningkatkan Evaluasi Kinerja : Satuan kerja akan meningkatkan evaluasi kinerja dengan melakukan evaluasi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

BAB IV PENUTUP

**PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BALAI KELAS I B**

(0711) 5252010
pn.pangkalanbalai@gmail.com
pn.pangkalanbalai.go.id

**LKJIP
2025**

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada dasarnya merupakan bentuk pertanggung jawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi (LKjIP).

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran satuan kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2025 telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hasil yang telah dicapai di tahun 2025 tentunya masih perlu ditingkatkan lagi ditahun - tahun mendatang agar dapat merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Untuk nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tahun 2025 sebesar **97,51%**.

Adapun tantangan dan hambatan yang dihadapi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB khususnya sampai dengan periode 2025 antara lain :

1. Kurangnya jumlah panitera pengganti dikarenakan TPM, sehingga jadwal persidangan menumpuk yang otomatis menghambat dalam waktu penyelesaian persidangan atau perkara.
2. Kurangnya ASN golongan II terutama untuk ditempatkan sebagai operator khususnya kesekretariatan dan petugas register
3. Kurangnya anggaran baik dipa dari Badan urusan Administrasi (dipa 01) maupun dari Badan Peradilan Umum (dipa 03) guna menunjang operasional. Hal tersebut seringkali mengharuskan satuan kerja untuk merevisi anggaran baik itu antar komponen maupun antar satker dan juga mengajukan Anggaran Tambahan Belanja (ABT).

4. Masih minimnya pelatihan baik untuk struktural maupun fungsional bagi aparaturnya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai guna meningkatkan kemampuan.

Keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis. Keberhasilan yang telah dicapai di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang tentunya membawa dampak kepada peningkatan mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

4.2. Rekomendasi

Dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB ditemukan beberapa kendala dan hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, untuk mengatasi kendala - kendala dalam melaksanakan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas I B, kami rekomendasikan hal - hal sebagai berikut :

1. Perlu lebih ditingkatkannya pelatihan baik bagi Hakim, Pejabat dan Staf Fungsional maupun Struktural terkait peningkatan mutu kerja dan juga keterampilan guna menghadapi tuntutan dan perkembangan di dunia kerja.
2. Perlu adanya peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.

3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja.
4. Dibutuhkannya pemantauan secara berkala dan berjenjang pada setiap bidang dari pimpinan guna menjaga akuntabel (monev berkala).
5. Keterbukaan, kerjasama dan perhitungan yang profesional di tiap bagian guna memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta pembentukan Tim penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang terdiri dari unsur kepaniteraan dan unsur kesekretariatan, agar data yang diperoleh lebih akurat dan mempermudah proses penyusunan.
6. Untuk mencapai keberhasilan dalam program yang telah ditetapkan dalam sasaran kerja dan indikator kerja, diperlukan Sumber Daya Manusia yang cakap dan handal, Sistem Operasional Prosedur yang telah dijalankan sesuai peraturan yang berlaku, kerjasama yang baik dan kedisiplinan tinggi setiap personil di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB serta memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan peradilan.
7. Mendorong Agen Perubahan untuk membuat inovasi - inovasi guna menunjang dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Melalui LKjIP Tahun 2025 ini kami sampaikan gambaran secara komprehensif mengenai capaian - capaian, kendala / kekurangan - kekurangan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas IB sebagai sarana evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas dan fungsi untuk dapat ditindaklanjuti sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi serta performa Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kelas IB dapat berjalan secara konsisten dan sustainable.

LAMPIRAN

**PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BALAI KELAS I B**

(0711) 5252010
pn.pangkalanbalai@gmail.com
pn.pangkalanbalai.go.id

**LKJIP
2025**



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 16292 /SEK/OT1.6/11/2025 Jakarta, 25 November 2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : Empat Berkas
Hal : Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP

Yth. 1. Para Pejabat Eselon I Mahkamah Agung RI:
2. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Banding;
3. Para Kepala/Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;
Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya

Menindaklanjuti Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK. RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK. RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/ SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 – 2029, seluruh unit Eselon I, Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya wajib menyusun dokumen SAKIP yang terdiri dari:

1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi unit kerja yang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Tahun 2025.
3. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029.
4. Revisi Rencana Strategis bagi unit kerja yang telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025 – 2029.
5. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2026;
6. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
7. Revisi Rencana Aksi Tahun 2025;
8. Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan I - III Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
9. Revisi Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan I - IV Tahun 2025 berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
10. Rencana Kinerja Tahun 2027;

11. Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
12. Rencana Aksi Tahun 2026;
13. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024;
14. Laporan Kinerja Tahun 2025 dengan ketentuan: masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja
 - a) Memuat pernyataan telah direviu pada halaman paling awal sebelum Kata Pengantar dan Formulir Reviu Laporan Kinerja menjadi Lampiran dalam Laporan Kinerja Tahun 2025
 - b) BAB II Perencanaan Kinerja pada Subbab Perjanjian Kinerja perlu disampaikan:
 - Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum terjadi revisi disertai dengan capaian kinerja akumulasi hingga September Tahun 2025.
 - Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
 - c) BAB III Akuntabilitas Kinerja pada Subbab Capaian Kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja perbulan mulai Januari hingga Desember atas sasaran, indikator, dan target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja perbulan tersebut juga menjadi Lampiran dalam Laporan Kinerja Tahun 2025.
 - d) Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dijelaskan pada BAB III.

Seluruh Dokumen SAKIP berikut dengan revisinya disampaikan paling lambat tanggal 28 Februari 2026 melalui:

1. Aplikasi e-SAKIP REVIU oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada link <https://esr.menpan.go.id/>.
2. Aplikasi e-SAKIP pada link <https://batara.mahkamahagung.go.id/>.
3. Website masing-masing Satuan Kerja.

Bila diperlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Rina Alprini (081310606347).

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


Sekretaris Mahkamah Agung RI
Sugiyanto

Lampiran I : Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 16292 /SEK/OT1.6/11/2025
Tanggal : 25 November 2025

MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN (1) TRIWULAN I/III/III/IV
.....(2)

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.		1.			
		2.			

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.		1.			
		2.			

NO	AKSI/KEGIATAN	URAIAN PROGRES PELAKSANAAN	URAIAN PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT

..... (3)(4)

.....(5)

(.....)(6)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Tahun Pelaksanaan Kinerja
- (2) Entitas Akuntabilitas Kinerja
 - Unit Eselon I
 - Pengadlian Tingkat Banding
 - Pengadlian Tingkat Pertama
- (3) Lokasi Penetapan
- (4) Tanggal, Bulan dan Tahun Penetapan
- (5) Pimpinan Entitas Akuntabilitas Kinerja
 - Kepala Unit Eselon I
 - Ketua Pengadlian Tingkat Banding
 - Ketua Pengadlian Tingkat Pertama
- (6) Nama Pimpinan Entitas Akuntabilitas Kinerja

Lampiran II: Surat Sekretaris Mahkamah Agung
 Nomor : 16292 /SEK/OT1.6/11/2025
 Tanggal : 25 November 2025

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN (1)

.....(2)

No.	Pernyataan		Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.	
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	

		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	
		10. IKU dan IK telah SMART	

..... (3),(4)

Pereviu I

Pereviu II

(.....)

(.....)(5)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Tahun Pelaksanaan Kinerja
- (2) Entitas Akuntabilitas Kinerja
 - Unit Eselon I
 - Pengadilan Tingkat Banding
 - Pengadilan Tingkat Pertama
- (3) Lokasi Penetapan
- (4) Tanggal, Bulan dan Tahun Penetapan
- (5) Nama Pereviu

Lampiran III : Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 16292 /SEK/OT1.6/11/2025
Tanggal : 25 November 2025

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN (1)
.....(2)

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada (2)
untuk Tahun Anggaran(1) sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.
Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab
manajemen (2).

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah
disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan
kinerja ini.

..... (3),(4)

Pereviu I

Pereviu II

(.....)

(.....)(5)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Tahun Pelaksanaan Kinerja
- (2) Entitas Akuntabilitas Kinerja
 - Unit Eselon I
 - Pengadilan Tingkat Banding
 - Pengadilan Tingkat Pertama
- (3) Lokasi Penetapan
- (4) Tanggal, Bulan dan Tahun Penetapan
- (5) Nama Pereviu

Lampiran IV : Surat Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor : 16292 /SEK/OT1.6/11/2025
Tanggal : 25 November 2025

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN (1)
.....(2)

No	Rekomendasi LHE Tahun (1)	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung

..... (3)(4)

.....(5)

(.....)(6)

Petunjuk Pengisian:

- (1) Tahun LHE
- (2) Entitas Akuntabilitas Kinerja
- (3) Lokasi Penetapan
- (4) Tanggal, Bulan dan Tahun Penetapan
- (5) Pimpinan Entitas Akuntabilitas Kinerja
- (6) Nama Pimpinan Entitas Akuntabilitas Kinerja

REVISI RENCANA AKSI TAHUN 2025 **MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96,46%
		2. Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	100,00%
		3. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak	99,97%
		4. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	91,01%
		5. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90,69%
		6. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90,11%
		7. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	39,55%
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	10,48%
		9. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	18,69%
		10. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	97,00&
		11. Persentase perkara perdata tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-Court	95,76%
		12. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	89,80%
		13. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	89,93%

1. KEPANITERAAN

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Mahkamah Agung					Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1044-Peningkatan Penyelesaian Perkara	Rp250.000.000

2.	Putusan Perkara Pidana					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1044-Peningkatan Penyelesaian Perkara	Rp10.218.452.000
3.	Putusan Perkara Pidana Militer					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1044-Peningkatan Penyelesaian Perkara	Rp308.124.000
4.	Penyelesaian Perkara PHI yang nilai gugatannya dibawah 150jt					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1044-Peningkatan Penyelesaian Perkara	Rp633.461.000

2. BADAN PERADILAN UMUM

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum					Orang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1046 - Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum	Rp1.226.675.000
2.	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum					Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp850.000.000
3.	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp360.000.000
4.	Sidang di luar Gedung Pengadilan					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp8152.000.000
5.	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp2.174.359.000
6.	Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp450.833.000
7.	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp31.892.677.000

8.	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Barat						Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp990.489.000
9.	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Barat						Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp1.676.867.000
10.	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Tengah						Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp1.153.264.000
11.	Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Tengah						Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp266.473.000
12.	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Tengah						Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp11.831.801.000
13.	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Tengah						Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp537.180.000
14.	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Tengah						Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp386.751.000
15.	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Timur						Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp191.488.000
16.	Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Timur						Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp110.457.000
17.	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Timur						Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp1.461.773.000
18.	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di Wilayah Timur						Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp179.985.000

19.	Perkara PHI (dibawah 150 juta) yang Diselesaikan di Tingkat Pertama di wilayah Timur						Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049-Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp91.748.000
-----	--	--	--	--	--	--	---------	---------------------------------------	---	--------------

3. BADAN PERADILAN AGAMA

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama					kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp850.000.000
2.	Layanan Mediator Eksternal di Pengadilan					Orang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp116.1000.000
3.	Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayah					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp124.965.000
4.	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp9.879.161.000
5.	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp20.882.166.000
6.	Perkara di Lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp2.443.888.000
7.	Perkara yang diselesaikan melalui Sidang Itsbat Nikah diluar Negeri					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp921.945.000
8.	Bimbingan Teknis Kaum Rentan Berhadapan dengan Hukum					Orang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	7019 - Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Agama	Rp841.387.000

4. BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer					Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp100.000.000
2.	Perkara Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp4.970.000
3.	Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Tinggi I s.d III					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp172.200.000
4.	Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp2.555.039.000
5.	Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp512.485.000
6.	Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Tinggi I s.d III dan Pengadilan Militer I - 01 s.d III - 18					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp34.866.000
7.	Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Pengadilan Militer III - 19 Jayapura					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp10.320.000
8.	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer					Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp2.663.253.000

9.	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp200.000.000
10.	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara						Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp6.075.000
11.	Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara						Perkara	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp760.190.000

RENCANA AKSI TAHUN 2025

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN 2. Persentase Penanganan Pengaduan yang Tepat Waktu 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti 4. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan	98,00% 70,00% 85,00% 3,78

1. Badan Peradilan Umum

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum					kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049 - Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp6.642.871.000
2.	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum					kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049 - Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp5.760.000
3.	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara					orang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049 - Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp2.436.117.000
4.	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum					Orang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1049 - Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp13.136.800.000

2. BADAN PERADILAN AGAMA

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Barat					kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp2.358.850.000
2.	Koordinasi dan Pembinaan Implementasi Restorative Justice					kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp283.636.000
3.	Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Tengah					kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp1.932.405.000
4.	Koordinasi dan Pemantauan Layanan Pengadilan Wilayah Timur					kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp641.400.000
5.	Koordinasi Pengelolaan PNPB					kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp4.684.635.000
6.	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama					Orang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1053-Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp22.607.700.000
7.	Naskah Kesyarifan					Rekomendasi Kebijakan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1056 - Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) serta Kesyarifan	Rp496.776.000

3. BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Militer					Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp277.000

2.	Pengawasan dan Pengamatan Lembaga Pemasyarakatan Militer						Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp380.600.000
3.	Bimbingan Teknis Kompetensi Penyelesaian Perkara						Orang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp758.966.000
4.	Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Militer						Orang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1058-Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Rp250.000.000
5.	Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara						Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp479.930.000
6.	Dukungan Penyelesaian Perkara						Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp303.755.000
7.	Bimbingan Teknis Kompetensi Penyelesaian Perkara						Kegiatan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp1.063.630.000
8.	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						Orang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp1.122.800.000
9.	Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						Orang	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1059 - Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	Rp350.000.000

4. Badan Pengawasan

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Layanan Audit Internal					Laporan	Program Dukungan Manajemen	1077 - Pengawasan Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Inspektur Wilayah I, II, III, IV	Rp30.435.648.000

RENCANA AKSI TAHUN 2025

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	73
		2. Nilai Kinerja Anggaran	90
		3. Nilai Sistem Merit	203
		4. Indeks Pengelolaan Aset	3,75
		5. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	94
		6. Predikat Opini Laporan Keuangan	WTP

1. Kepaniteraan

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Layanan BMN					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6242 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	Rp200.000.000
2.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6242 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	Rp7.360.843.000
3.	Layanan Perkantoran					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6242 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	Rp193.168.457.000
4.	Layanan Manajemen SDM					Orang	Program Dukungan Manajemen	6242 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	Rp1.775.292.000
5.	Layanan Manajemen Keuangan					Laporan	Program Dukungan Manajemen	6242 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	Rp833.092.000
6.	Layanan Sarana Internal					Unit	Program Dukungan Manajemen	6242 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Kepaniteraan	Rp1.223.474.000

2. BADAN PERADILAN UMUM

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Layanan BMN					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp1.100.000
2.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp2. 885.079.000
3.	Layanan Umum					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp5.783.621.000
4.	Layanan Perkantoran					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp33.396.429.000
5.	Layanan Data dan Informasi					Dokumen	Program Dukungan Manajemen	6243 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum	Rp1.650.106.000

3. BADAN PERADILAN AGAMA

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Layanan BMN					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6244 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	Rp139.000.000
2.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6244 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	Rp2.254.067.000
3.	Layanan Umum					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6244 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	Rp140.175.000
4.	Layanan Data dan Informasi					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6244 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	Rp1.367.029.000

5.	Layanan Perkantoran						Layanan	Program Dukungan Manajemen	6244 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag)	Rp31.315.645.000
----	---------------------	--	--	--	--	--	---------	----------------------------	--	------------------

4. BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Layanan BMN					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6245 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilimiltun)	Rp8.340.000
2.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6245 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilimiltun)	Rp1.433.556.000
3.	Layanan Data dan Informasi					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6245 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilimiltun)	Rp874.099.000
4.	Layanan Perkantoran					Layanan	Program Dukungan Manajemen	6245 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilimiltun)	Rp15.150.438.000

5. BADAN STRATEGI DAN PELATIHAN DAN PENDIDIKAN HUKUM DAN PERADILAN

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Layanan Umum					Layanan	Program Dukungan Manajemen	1075 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Rp4.629.595.000

2.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal							Layanan	Program Dukungan Manajemen	1075 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Rp1.145.564.000
3.	Layanan Data dan Informasi							Layanan	Program Dukungan Manajemen	1075 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Rp742.638.000
4.	Layanan Perkantoran							Layanan	Program Dukungan Manajemen	1075 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan	Rp50.069.762.000

6. BADAN PENGAWASAN

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Layanan Umum					Layanan	Program Dukungan Manajemen	1079 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	Rp512.654.000
2.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal					Layanan	Program Dukungan Manajemen	1079 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	Rp476.901.000
3.	Layanan Data dan Informasi					Layanan	Program Dukungan Manajemen	1079 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	Rp298.250.000
4.	Layanan Perkantoran					Layanan	Program Dukungan Manajemen	1079 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawasan Mahkamah Agung	Rp47.060.355.000

7. BADAN URUSAN ADMINISTRASI

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	Layanan Perkantoran					Layanan	Program Dukungan Manajemen	1064 - Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	Rp15.530.795.000
2.	Layanan Hukum					Layanan	Program Dukungan Manajemen	1064 - Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	Rp16.787.996.000
3.	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi					Layanan	Program Dukungan Manajemen	1064 - Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	Rp425.800.000
4.	Layanan Data dan Informasi					Layanan	Program Dukungan Manajemen	1064 - Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	Rp3.000.287.000
5.	Penyusunan Pedoman Peradilan					Rancangan Standar	Program Dukungan Manajemen	1064 - Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	Rp500.000.000
6.	Pengembangan Sistem Penanganan Perkara					Layanan	Program Dukungan Manajemen	1064 - Peningkatan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Semua Lingkungan Peradilan	Rp6.000.000.000
7.	Layanan Manajemen SDM					Orang	Program Dukungan Manajemen	1065 - Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp19.734.385.000
8.	Layanan Perkantoran					Layanan	Program Dukungan Manajemen	1066 - Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp4.122.142.962.000

9.	Layanan Manajemen Keuangan							Dokumen	Program Dukungan Manajemen	1066 - Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp34.327.994.000
10.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran							Dokumen	Program Dukungan Manajemen	1067 - Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	Rp5.331.481.000
11.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi							Dokumen	Program Dukungan Manajemen	1067 - Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	Rp1.360.772.000
12.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal							Layanan	Program Dukungan Manajemen	1067 - Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	Rp8.861.069.000
13.	Penyusunan Rancangan Kebijakan Penguatan Kelembagaan Mahkamah Agung							Rancangan Standar	Program Dukungan Manajemen	1067 - Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan dan Anggaran serta Penataan Organisasi Mahkamah Agung	Rp1.500.000.000
14.	Layanan Data dan Informasi							Layanan	Program Dukungan Manajemen	1068 - Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	Rp3.703.416.000
15.	Layanan Manajemen Keuangan							Layanan	Program Dukungan Manajemen	1068 - Pembinaan Administrasi Pengelolaan Perlengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	Rp1.822.422.000
16.	Layanan Perkantoran							Layanan	Program Dukungan Manajemen	1069 - Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya	Rp5.700.000.000
17.	Layanan Umum							Layanan	Program Dukungan Manajemen	1069 - Dukungan Pelayanan Pimpinan Mahkamah Agung dan Tugas Teknis Lainnya	Rp14.102.937.000

18.	Layanan Perkantoran							Layanan	Program Dukungan Manajemen	1070 - Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp210.367.587.000
19.	Layanan Umum							Layanan	Program Dukungan Manajemen	1070 - Pelaksanaan Pembinaan Keamanan, Urusan Tata Usaha, Rumah Tangga, Bina Sikap Mental di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp930.060.000
20.	Layanan Sarana Internal							Unit	Program Dukungan Manajemen	1071 - Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp147.974.000.000
21.	Layanan Prasarana Internal							M2	Program Dukungan Manajemen	1071 - Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp73.279.500.000
22.	Layanan Umum							Rupiah	Program Dukungan Manajemen	6986 - Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilatan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp1.390.770.000
23.	Layanan Perkantoran							Rupiah	Program Dukungan Manajemen	6986 - Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilatan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp6.183.724.871.000
24.	Layanan Pemantauan dan Evaluasi							Dokumen	Program Dukungan Manajemen	6986 - Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilatan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp276.856.000

Sumber data: Aplikasi KRISNA – RENSTRAKL 2025 - 2029 <https://ma.kl.krisna.systems/renstrakl/2025-2029/renstrakl-v2-main>

Jakarta, 25 November 2025

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia



Sugiyanto



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

Jalan Jenderal Sudirman KM. 3,5 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning
Palembang, Sumatera Selatan, Kode Pos 30151 www.pt-palembang.go.id, info@pt-palembang.go.id

Nomor : **4182** /KPT.W6-U/OT1.6/XII/2025
Lampiran : -
Perihal : Penyusunan dan Penyampaian
Dokumen SAKIP

03 Desember 2025

Yth. Ketua Pengadilan Negeri
se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
di -
Tempat

Guna memenuhi maksud Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 16292/SEK/SK.OT1.6/II/2025 tanggal 25 November 2025 tentang penyusunan dan penyampaian dokumen SAKIP, bersama ini kami minta kepada seluruh Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang untuk menyusun dokumen SAKIP yang terdiri dari :

1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
2. Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi unit kerja yang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2025
3. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029;
4. Revisi Rencana Strategis bagi unit kerja yang telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029
5. Revisi Rencana Kinerja Tahun 2026;
6. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
7. Revisi Rencana Aksi Tahun 2025;
8. Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan I – III Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
9. Revisi Monitoring dan Evaluasi atas Rencana Aksi Triwulan I – IV Tahun 2025 berdasarkan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
10. Rencana Kinerja Tahun 2027;
11. Perjanjian Kinerja Tahun 2026;
12. Rencana Aksi Tahun 2026;
13. Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024;

14. Laporan Kinerja Tahun 2025 dengan ketentuan: masing- masing Entitas Akuntabilitas Kinerja

- a) Memuat pernyataan telah direviu pada halaman paling awal sebelum Kata Pengantar dan Formulir Reviu Laporan Kinerja menjadi Lampiran dalam Laporan Kinerja Tahun 2025.
- b) BAB II Perencanaan Kinerja pada Subbab Perjanjian Kinerja perlu disampaikan :
 - Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebelum terjadi revisi disertai dengan capaian kinerja akumulasi hingga September Tahun 2025
 - Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- c) BAB III Akuntabilitas Kinerja pada Subbab Capaian Kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja perbulan mulai Januari hingga Desember atas sasaran, indikator, dan target pada Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja perbulan tersebut juga menjadi lampiran dalam Laporan Kinerja Tahun 2025.
- d) Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 dijelaskan pada BAB III.

Seluruh Dokumen SAKIP berikut dengan revisinya disampaikan paling lambat tanggal **13 Februari 2026** melalui :

1. Aplikasi e-SAKIP Reviu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tautan : <https://esr.menpan.go.id/> ;
2. Aplikasi e-SAKIP pada link <https://batara.mahkamahagung.go.id/> ;
3. Website masing-masing Satuan Kerja.
4. Mengunggah kelengkapan dokumen SAKIP point 1-14 pada link https://bit.ly/SAKIP_PNSeSumsel2025

Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA, y.



HERDI AGUSTEN

Tembusan
Sekretaris Mahkamah Agung RI



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR : 3/KPN.W6-U10/SK.OT1.6/I/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2026
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2026 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2026 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Desember Tahun 2026;
- KEEMPAT : Segala biaya ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 2 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,



FITRI AGUSTINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Nomor : 3/KPN.W6-U10/SK.OT1.6/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2026 PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

No.	Jabatan	Nama
1.	Penanggung Jawab	Fitri Agustina, S.H., M.H.
2.	Koordinator Validasi Data	Melissa, S.H., M.H.
3.	Ketua	Bainal Hakim, S.H.
4.	Sekretariat	Sadat Prayudi, S.H.
5.	Anggota	1. A. Hairun Yulasni, S.H., M.H. 2. Mohd. Sobirin, S.H. 3. Beny Herlambang, S.H. 4. M. Budianto, S.E., S.H. 5. Mutiara Saputri
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. M. Iman Septian, S.IP. 2. Citra Puspitasari, S.T.



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,

FITRI AGUSTINA

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2026 PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

No.	Jabatan	Tugas
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2026 Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	a. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan b. mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada aparatur pengawasan intern pemerintah
4.	Sekretariat	Mengkoordinasikan Teknis penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisa indikator kinerja pada masing masing unit Eselon I
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,

FITRI AGUSTINA



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR : 9/KPN.W6-U10/SK.PW1/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran dan terkontrolnya administrasi kantor, maka perlu ditunjuk Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
- b. Bahwa nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI.**

- KESATU : Menetapkan susunan Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sebagaimana tercantum dalam Daftar Lampiran ini;
- KEDUA : Memerintahkan kepada nama-nama Hakim Pengawas untuk melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,

FITRI AGUSTINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Nomor : 9/KPN.W6-U10/SK.PW1/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN DAN
KESEKRETARIATAN PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Tugas
1.	VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H., M.H. NIP. 197901162002122001	Pembina Tk. I (IV/b)	Wakil Ketua	KOORDINATOR PENGAWAS BIDANG
2.	HARI MUKTIYONO, S.H. NIP. 198909012017121007	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim	1. HAKIM PENGAWAS BIDANG UMUM DAN KEUANGAN; 2. HAKIM PENGAWAS BIDANG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN; 3. HAKIM PENGAWAS SIPP.
3.	SYARIFA YANA, S.H., M.H. NIP. 198701152017122001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim	1. HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN PIDANA; 2. HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN PERDATA.
4.	AYU CAHYANI SIRAIT, S.H., M.H. NIP. 199306042017122002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim	1. HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN HUKUM; 2. HAKIM PENGAWAS BIDAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA; 3. HAKIM PENGAWAS PTSP.


KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,
FITRI AGUSTINA



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR : 46/KPN.W6-U10/SK.HK1.2.5/I/2025

TENTANG

**TIM PENGELOLA KEUANGAN PERKARA
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai maka dipandang perlu menunjuk Tim Pengelola Keuangan Perkara;
- b. Bahwa Tim yang ditunjuk di dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG TIM PENGELOLA KEUANGAN PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI.**
- KESATU : Menunjuk pejabat/pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Pengelola Keuangan Perkara pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
- KEDUA : Kepada pejabat/pegawai yang ditunjuk agar melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan terkait pengelolaan keuangan perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada tanggal : 2 Januari 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,

FITRI AGUSTINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Nomor : 46/KPN.W6-U10/SK.HK1.2.5/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**TIM PENGELOLA KEUANGAN PERKARA
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Tugas
1.	BAINAL HAKIM, S.H. NIP. 196909031994031005	Penata Tk. I (III/d)	Panitera	Pengelola Biaya Perkara
2.	DEA ANGGITA, A.Md. NIP. 199208222020122004	Pengatur Tk. I (II/d)	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	Kasir



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,



KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR : 47/KPN.W6-U10/SK.RA1.7/I/2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA ANGGARAN
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam penyusunan RKA-KL maka dipandang perlu menunjuk Tim Penyusun Rencana Anggaran pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
- b. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Rencana Anggaran pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang RKA-KL;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA ANGGARAN PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI.**
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat/Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2, serta Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, dengan kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Para Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Penyusun Rencana Anggaran pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,



FITRI AGUSTINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Nomor : 47/KPN.W6-U10/SK.RA1.7/I/2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**TIM PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	FITRI AGUSTINA, S.H. NIP. 197908252006042002	Ketua	Pembina	
2.	ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom. NIP. 197612032011011005	Sekretaris	Ketua Tim	
3.	BAINAL HAKIM, S.H. NIP. 196909031994031005	Panitera	Sekretaris	
4.	A. HAIRUN YULASNI, S.H., M.H. NIP. 197007251990031001	Penata Tk. I (III/d)	Anggota	
5.	KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H. NIP. 197909142005021001	Penata Tk. I (III/d)	Anggota	
6.	BENY HERLAMBANG, S.H. NIP. 198402012006041002	Penata Tk. I (III/d)	Anggota	
7.	M. IMAN SEPTIAN, S.IP. NIP. 198509212011011011	Penata Tk. I (III/d)	Anggota	
8.	RAHMAT JUNIANSYAH NIP. 197506201994031001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Anggota	
9.	MUTIARA SAPUTRI NIP. 199603222019032007	Penata Muda Tk. I (III/b)	Anggota	


KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,
FITRI AGUSTINA

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 1 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	5,882,899,000	0	4,917,852,855	566,747,748	5,484,600,603	93.23 %	398,298,397
WA Program Dukungan Manajemen	5,882,899,000	0	4,917,852,855	566,747,748	5,484,600,603	93.23 %	398,298,397
WA.6986 Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	5,882,899,000	0	4,917,852,855	566,747,748	5,484,600,603	93.23 %	398,298,397
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	5,882,599,000	0	4,917,741,855	566,558,748	5,484,300,603	93.23 %	398,298,397
EBA.962 Layanan Umum	700,000	0	700,000	0	700,000	100.00	0
051 Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan	700,000	0	700,000	0	700,000	100.00	0
051.0C Pengadaan Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel	700,000	0	700,000	0	700,000	100.00	0
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	0	700,000	0	700,000	100.00	0
000097. Mesin Pompa Air Dorong	700,000	0	700,000	0	700,000	100.00	0
EBA.994 Layanan Perkantoran	5,881,899,000	0	4,917,041,855	566,558,748	5,483,600,603	93.23 %	398,298,397
001 Gaji dan Tunjangan	4,499,413,000	0	3,724,854,283	379,500,117	4,104,354,400	91.22 %	395,058,600
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	4,499,413,000	0	3,724,854,283	379,500,117	4,104,354,400	91.22 %	395,058,600
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	1,718,805,000	0	1,464,514,540	128,254,640	1,592,769,180	92.67 %	126,035,820
000001. Belanja Gaji Pokok PNS	1,509,350,000	0	1,255,068,240	128,254,640	1,383,322,880	91.65 %	126,027,120
000002. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	103,219,000	0	103,214,600	0	103,214,600	100.00	4,400
000003. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	106,236,000	0	106,231,700	0	106,231,700	100.00	4,300
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	50,000	0	19,680	1,625	21,305	42.61 %	28,695
000004. Belanja Pembulatan Gaji PNS	38,000	0	16,392	1,625	18,017	47.41 %	19,983
000005. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	6,000	0	1,584	0	1,584	26.40 %	4,416
000006. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	6,000	0	1,704	0	1,704	28.40 %	4,296
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	115,565,000	0	98,294,674	9,171,994	107,466,668	92.99 %	8,098,332
000007. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	101,514,000	0	84,252,254	9,171,994	93,424,248	92.03 %	8,089,752
000008. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	6,862,000	0	6,857,780	0	6,857,780	99.94 %	4,220
000009. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	7,189,000	0	7,184,640	0	7,184,640	99.94 %	4,360
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	32,790,000	0	30,164,020	2,606,672	32,770,692	99.94 %	19,308

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 2 dari 7

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000010. Belanja Tunj. Anak PNS	28,365,000	0	25,744,468	2,606,672	28,351,140	99.95 %	13,860
	000011. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	2,142,000	0	2,137,156	0	2,137,156	99.77 %	4,844
	000012. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	2,283,000	0	2,282,396	0	2,282,396	99.97 %	604
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28,540,000	0	26,480,000	2,060,000	28,540,000	100.00	0
	000013. Belanja Tunjangan Struktural PNS	25,010,000	0	22,950,000	2,060,000	25,010,000	100.00	0
	000014. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1,520,000	0	1,520,000	0	1,520,000	100.00	0
	000015. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	2,010,000	0	2,010,000	0	2,010,000	100.00	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	208,940,000	0	156,550,000	4,900,000	161,450,000	77.27 %	47,490,000
	000016. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	200,000,000	0	147,610,000	4,900,000	152,510,000	76.26 %	47,490,000
	000017. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	4,470,000	0	4,470,000	0	4,470,000	100.00	0
	000018. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	4,470,000	0	4,470,000	0	4,470,000	100.00	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	12,799,000	0	10,190,441	80,229	10,270,670	80.25 %	2,528,330
	000019. Belanja Tunjangan PPh PNS	6,645,000	0	4,045,796	80,229	4,126,025	62.09 %	2,518,975
	000020. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	3,026,000	0	3,021,307	0	3,021,307	99.84 %	4,693
	000021. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	3,128,000	0	3,123,338	0	3,123,338	99.85 %	4,662
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	91,312,000	0	78,068,760	7,024,740	85,093,500	93.19 %	6,218,500
	000022. Belanja Tunj Beras PNS	91,312,000	0	78,068,760	7,024,740	85,093,500	93.19 %	6,218,500
511129	Belanja Uang Makan PNS	242,956,000	0	218,001,000	22,932,000	240,933,000	99.17 %	2,023,000
	000023. Belanja Uang Makan PNS	242,956,000	0	218,001,000	22,932,000	240,933,000	99.17 %	2,023,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	23,165,000	0	19,155,000	1,820,000	20,975,000	90.55 %	2,190,000
	000024. Belanja Tunjangan Umum PNS	20,970,000	0	16,960,000	1,820,000	18,780,000	89.56 %	2,190,000
	000025. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	100.00	0
	000026. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1,095,000	0	1,095,000	0	1,095,000	100.00	0
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	225,608,000	0	188,434,496	854,809	189,289,305	83.90 %	36,318,695
	000099. Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara	173,989,000	0	137,186,770	854,809	138,041,579	79.34 %	35,947,421
	000100. Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara (Gaji ke-	25,994,000	0	25,623,863	0	25,623,863	98.58 %	370,137

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 3 dari 7

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	13)	25,994,000	0	25,623,863	0			370,137
	000101. Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara (Gaji ke-14)	25,625,000	0	25,623,863	0	25,623,863	100.00	1,137
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1,644,551,000	0	1,320,770,000	170,400,000	1,491,170,000	90.67 %	153,381,000
	000102. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (Gaji ke-14)	85,000,000	0	85,000,000	0	85,000,000	100.00	0
	000103. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (Gaji ke-13)	85,000,000	0	85,000,000	0	85,000,000	100.00	0
	000104. Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1,474,551,000	0	1,150,770,000	170,400,000	1,321,170,000	89.60 %	153,381,000
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	105,671,000	0	84,959,000	20,696,200	105,655,200	99.99 %	15,800
	000027. Belanja Gaji Pokok PPPK	99,941,000	0	79,241,400	20,696,200	99,937,600	100.00	3,400
	000028. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	2,867,000	0	2,858,800	0	2,858,800	99.71 %	8,200
	000029. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	2,863,000	0	2,858,800	0	2,858,800	99.85 %	4,200
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9,000	0	1,774	362	2,136	23.73 %	6,864
	000030. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	7,000	0	1,614	362	1,976	28.23 %	5,024
	000031. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1,000	0	80	0	80	8.00 %	920
	000032. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1,000	0	80	0	80	8.00 %	920
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,884,000	0	3,533,250	1,177,750	4,711,000	80.06 %	1,173,000
	000033. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,876,000	0	3,533,250	1,177,750	4,711,000	80.17 %	1,165,000
	000034. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 13)	4,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000
	000035. Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 14)	4,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,382,000	0	1,028,868	342,956	1,371,824	99.26 %	10,176
	000036. Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,372,000	0	1,028,868	342,956	1,371,824	99.99 %	176
	000037. Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13)	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
	000038. Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14)	5,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,900,000	0	2,800,000	0	2,800,000	57.14 %	2,100,000
	000039. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	4,200,000	0	2,100,000	0	2,100,000	50.00 %	2,100,000
	000040. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13)	350,000	0	350,000	0	350,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 4 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000041. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	350,000	0	350,000	0	350,000	100.00	0
511625 Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,516,000	0	4,272,780	1,231,140	5,503,920	99.78 %	12,080
000042. Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,362,000	0	4,127,940	1,231,140	5,359,080	99.95 %	2,920
000043. Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 13)	77,000	0	72,420	0	72,420	94.05 %	4,580
000044. Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 14)	77,000	0	72,420	0	72,420	94.05 %	4,580
511628 Belanja Uang Makan PPPK	24,570,000	0	13,776,000	4,665,000	18,441,000	75.05 %	6,129,000
000045. Belanja Uang Makan PPPK	24,570,000	0	13,776,000	4,665,000	18,441,000	75.05 %	6,129,000
511633 Belanja Tunjangan Umum PPPK	6,400,000	0	3,840,000	1,280,000	5,120,000	80.00 %	1,280,000
000107. Belanja Tunjangan Umum PPPK	6,400,000	0	3,840,000	1,280,000	5,120,000	80.00 %	1,280,000
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1,382,486,000	0	1,192,187,572	187,058,631	1,379,246,203	99.77 %	3,239,797
002.0A Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	419,965,000	0	369,686,166	50,265,802	419,951,968	100.00	13,032
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	309,377,000	0	281,190,500	28,181,600	309,372,100	100.00	4,900
000046. Biaya Penjilitan	290,000	0	210,000	80,000	290,000	100.00	0
000047. Air Minum Galon	7,915,000	0	5,215,500	2,695,000	7,910,500	99.94 %	4,500
000048. Retribusi Sampah	1,800,000	0	1,650,000	150,000	1,800,000	100.00	0
000049. Honorarium Sopir	31,448,000	0	31,448,000	0	31,448,000	100.00	0
000050. Honorarium Satpam	62,896,000	0	62,896,000	0	62,896,000	100.00	0
000051. Honorarium Pramubakti	157,256,000	0	150,108,000	7,148,000	157,256,000	100.00	0
000052. THR Sopir	3,931,000	0	3,931,000	0	3,931,000	100.00	0
000053. THR Satpam	7,862,000	0	7,862,000	0	7,862,000	100.00	0
000054. THR Pramubakti	17,870,000	0	17,870,000	0	17,870,000	100.00	0
000110. Jasa Petugas Kebersihan	18,109,000	0	0	18,108,600	18,108,600	100.00	400
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	58,779,000	0	48,523,366	10,253,500	58,776,866	100.00	2,134
000055. Spanduk	5,998,000	0	5,476,000	522,000	5,998,000	100.00	0
000056. Benner	4,968,000	0	4,652,000	316,000	4,968,000	100.00	0
000105. Pembelian Plakat, Kunci, Dll	47,813,000	0	38,395,366	9,415,500	47,810,866	100.00	2,134

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 5 dari 7

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	51,809,000	0	39,972,300	11,830,702	51,803,002	99.99 %	5,998
	000057. Biaya Keperluan sehari-hari perkantoran (pegawai 32 orang)	51,809,000	0	39,972,300	11,830,702	51,803,002	99.99 %	5,998
002.0B	Langganan Daya dan Jasa	212,370,000	0	209,558,915	2,690,290	212,249,205	99.94 %	120,795
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	189,000,000	0	189,000,000	0	189,000,000	100.00	0
	000058. Lisensi Vidio Conference	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
	000059. Langganan Internet	186,000,000	0	186,000,000	0	186,000,000	100.00	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,132,000	0	1,645,910	399,000	2,044,910	95.92 %	87,090
	000060. Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	2,132,000	0	1,645,910	399,000	2,044,910	95.92 %	87,090
522112	Belanja Langganan Telepon	10,263,000	0	9,331,630	931,290	10,262,920	100.00	80
	000061. Langganan telpon	10,263,000	0	9,331,630	931,290	10,262,920	100.00	80
522113	Belanja Langganan Air	7,000,000	0	5,606,375	1,360,000	6,966,375	99.52 %	33,625
	000062. Langganan Air	7,000,000	0	5,606,375	1,360,000	6,966,375	99.52 %	33,625
522141	Belanja Sewa	3,975,000	0	3,975,000	0	3,975,000	100.00	0
	000063. Langganan Web Hosting	3,975,000	0	3,975,000	0	3,975,000	100.00	0
002.0C	Pemeliharaan Kantor	477,322,000	0	374,058,932	103,168,539	477,227,471	99.98 %	94,529
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	279,531,000	0	207,497,178	71,969,900	279,467,078	99.98 %	63,922
	000064. Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Sumatera Selatan)	279,529,000	0	207,497,178	71,969,900	279,467,078	99.98 %	61,922
	000065. Pemeilharaan Rumah Genset	2,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	197,791,000	0	166,561,754	31,198,639	197,760,393	99.98 %	30,607
	000066. Bahan Bakar Genset	11,728,000	0	9,977,980	1,750,000	11,727,980	100.00	20
	000067. Perawatan Laptop	3,648,000	0	3,648,000	0	3,648,000	100.00	0
	000068. Pemeliharaan AC VRV Outdoor (6 unit x 2 kali)	5,673,000	0	0	5,672,100	5,672,100	99.98 %	900
	000069. Pemeliharaan AC VRV Indoor (65 unit x 2 kali)	45,014,000	0	37,731,550	7,281,600	45,013,150	100.00	850
	000070. BBM Sewa Roda 4	25,500,000	0	22,036,040	3,443,000	25,479,040	99.92 %	20,960
	000071. Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua)	5,190,000	0	5,079,262	110,000	5,189,262	99.99 %	738

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 6 dari 7

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000072. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat)	81,290,000	0	74,400,622	6,884,939	81,285,561	99.99 %	4,439
	000073. Perawatan Komputer	7,300,000	0	4,594,800	2,705,000	7,299,800	100.00	200
	000074. Perawatan Printer	7,760,000	0	6,233,500	1,525,000	7,758,500	99.98 %	1,500
	000075. Perawatan AC	4,688,000	0	2,860,000	1,827,000	4,687,000	99.98 %	1,000
002.0D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	108,030,000	0	95,775,075	12,254,000	108,029,075	100.00	925
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	49,710,000	0	46,775,075	2,934,000	49,709,075	100.00	925
	000076. Pakaian Dinas PPPK	978,000	0	978,000	0	978,000	100.00	0
	000077. Pakaian Dinas CPNS	4,890,000	0	4,890,000	0	4,890,000	100.00	0
	000078. Pakaian Dinas Hakim	6,846,000	0	4,890,000	1,956,000	6,846,000	100.00	0
	000079. Pakaian Kerja Satpam (Sumatera Selatan)	3,260,000	0	3,260,000	0	3,260,000	100.00	0
	000080. Pakaian Kerja Pramubakti	4,065,000	0	4,065,000	0	4,065,000	100.00	0
	000081. Pakaian Kerja Pengemudi	813,000	0	813,000	0	813,000	100.00	0
	000082. Pakaian Dinas Pegawai	23,472,000	0	22,494,000	978,000	23,472,000	100.00	0
	000106. Pajak Kendaraan Bermotor	5,386,000	0	5,385,075	0	5,385,075	99.98 %	925
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	58,320,000	0	49,000,000	9,320,000	58,320,000	100.00	0
	000083. Honorarium Staf Pengelola	9,360,000	0	7,800,000	1,560,000	9,360,000	100.00	0
	000084. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	18,120,000	0	15,100,000	3,020,000	18,120,000	100.00	0
	000085. Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp	3,600,000	0	3,000,000	600,000	3,600,000	100.00	0
	000086. Honorarium Bendahara Pengeluaran	6,240,000	0	5,200,000	1,040,000	6,240,000	100.00	0
	000087. Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
	000088. Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	18,600,000	0	15,500,000	3,100,000	18,600,000	100.00	0
002.0E	Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim dan Hakim Adhoc	113,400,000	0	98,280,000	12,600,000	110,880,000	97.78 %	2,520,000
522141	Belanja Sewa	113,400,000	0	98,280,000	12,600,000	110,880,000	97.78 %	2,520,000
	000089. Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim	113,400,000	0	98,280,000	12,600,000	110,880,000	97.78 %	2,520,000
002.0F	Pelantikan dan Sumpah Jabatan	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Satuan Kerja : 401909 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 7 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000090. Jasa Rohaniawan	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
002.0G Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding/Tingkat Pertama	38,544,000	0	32,733,484	5,320,000	38,053,484	98.73 %	490,516
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	38,544,000	0	32,733,484	5,320,000	38,053,484	98.73 %	490,516
000091. Penginapan	6,143,000	0	6,142,411	0	6,142,411	99.99 %	589
000092. Transportasi	8,361,000	0	7,871,073	0	7,871,073	94.14 %	489,927
000093. Uang Harian	24,040,000	0	18,720,000	5,320,000	24,040,000	100.00	0
002.0H Konsultasi ke KPPN/KANWIL DJPb/KPKNL/KANWIL DJKN/BKN/BKD	11,355,000	0	10,595,000	760,000	11,355,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,355,000	0	10,595,000	760,000	11,355,000	100.00	0
000094. Uang Harian	7,600,000	0	6,840,000	760,000	7,600,000	100.00	0
000095. Penginapan	1,540,000	0	1,540,000	0	1,540,000	100.00	0
000096. Transportasi	2,215,000	0	2,215,000	0	2,215,000	100.00	0
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	300,000	0	111,000	189,000	300,000	100.00	0
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	111,000	189,000	300,000	100.00	0
051 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	111,000	189,000	300,000	100.00	0
051.0A Dokumen Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	111,000	189,000	300,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	300,000	0	111,000	189,000	300,000	100.00	0
000098. Cetak Bahan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	0	111,000	189,000	300,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 03 Ditjen Badan Peradilan Umum
Satuan Kerja : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 1 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	150,390,000	0	119,865,760	29,046,486	148,912,246	99.02 %	1,477,754
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	150,390,000	0	119,865,760	29,046,486	148,912,246	99.02 %	1,477,754
BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	150,390,000	0	119,865,760	29,046,486	148,912,246	99.02 %	1,477,754
BCA Perkara Hukum Perseorangan	122,390,000	0	96,532,430	24,379,820	120,912,250	98.79 %	1,477,750
BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	122,390,000	0	96,532,430	24,379,820	120,912,250	98.79 %	1,477,750
051 Pendaftaran Berkas Perkara	68,425,000	0	55,295,760	13,099,820	68,395,580	99.96 %	29,420
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	68,425,000	0	55,295,760	13,099,820	68,395,580	99.96 %	29,420
521211 Belanja Bahan	9,884,000	0	5,903,000	3,981,000	9,884,000	100.00	0
000001. Penjilitan berkas perkara	9,884,000	0	5,903,000	3,981,000	9,884,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	58,541,000	0	49,392,760	9,118,820	58,511,580	99.95 %	29,420
000002. Alat Tulis Kantor	58,541,000	0	49,392,760	9,118,820	58,511,580	99.95 %	29,420
052 Penetapan hari sidang	1,440,000	0	1,168,100	219,000	1,387,100	96.33 %	52,900
052.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,440,000	0	1,168,100	219,000	1,387,100	96.33 %	52,900
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,440,000	0	1,168,100	219,000	1,387,100	96.33 %	52,900
000003. Pengiriman Surat Penetapan Hari Sidang	1,440,000	0	1,168,100	219,000	1,387,100	96.33 %	52,900
053 Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.	6,240,000	0	5,285,650	804,000	6,089,650	97.59 %	150,350
053.0A TANPA SUB KOMPONEN	6,240,000	0	5,285,650	804,000	6,089,650	97.59 %	150,350
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,240,000	0	5,285,650	804,000	6,089,650	97.59 %	150,350
000004. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	6,240,000	0	5,285,650	804,000	6,089,650	97.59 %	150,350
054 Pemeriksaan di sidang pengadilan	15,900,000	0	12,135,000	3,525,000	15,660,000	98.49 %	240,000
054.0A TANPA SUB KOMPONEN	15,900,000	0	12,135,000	3,525,000	15,660,000	98.49 %	240,000
521211 Belanja Bahan	15,900,000	0	12,135,000	3,525,000	15,660,000	98.49 %	240,000
000005. Konsumsi Makan Terdakwa	11,085,000	0	8,070,000	3,015,000	11,085,000	100.00	0
000006. Konsumsi Pengamanan dari Kepolisian	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000	100.00	0
000018. Konsumsi Persidangan Di Luar Jam Kerja	3,690,000	0	2,940,000	510,000	3,450,000	93.50 %	240,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 03 Ditjen Badan Peradilan Umum
Satuan Kerja : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 2 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
055 Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	1,900,000	0	1,402,500	232,000	1,634,500	86.03 %	265,500
055.0A TANPA SUB KOMPONEN	1,900,000	0	1,402,500	232,000	1,634,500	86.03 %	265,500
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,900,000	0	1,402,500	232,000	1,634,500	86.03 %	265,500
000007. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	1,900,000	0	1,402,500	232,000	1,634,500	86.03 %	265,500
056 Minutasi/Upaya hukum	20,585,000	0	14,900,000	5,685,000	20,585,000	100.00	0
056.0A TANPA SUB KOMPONEN	20,585,000	0	14,900,000	5,685,000	20,585,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	20,585,000	0	14,900,000	5,685,000	20,585,000	100.00	0
000008. Penjilitan Berkas Perkara	20,585,000	0	14,900,000	5,685,000	20,585,000	100.00	0
057 Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama	5,700,000	0	4,782,520	668,000	5,450,520	95.62 %	249,480
057.0A TANPA SUB KOMPONEN	5,700,000	0	4,782,520	668,000	5,450,520	95.62 %	249,480
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,100,000	0	3,182,520	668,000	3,850,520	93.92 %	249,480
000009. Pengiriman Berkas Banding	2,500,000	0	1,816,920	553,000	2,369,920	94.80 %	130,080
000010. Pengiriman Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	800,000	0	678,400	115,000	793,400	99.18 %	6,600
000011. Pengiriman Putusan Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	800,000	0	687,200	0	687,200	85.90 %	112,800
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
000012. Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000013. Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
058 Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama	2,200,000	0	1,562,900	147,000	1,709,900	77.72 %	490,100
058.0A TANPA SUB KOMPONEN	2,200,000	0	1,562,900	147,000	1,709,900	77.72 %	490,100
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,200,000	0	1,562,900	147,000	1,709,900	77.72 %	490,100
000014. Pengiriman Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	400,000	0	328,900	0	328,900	82.22 %	71,100
000015. Pengiriman Berkas Kasasi dan PK	900,000	0	515,200	147,000	662,200	73.58 %	237,800
000016. Pengiriman Proses Kasasi/PK/Kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	900,000	0	718,800	0	718,800	79.87 %	181,200
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	28,000,000	0	23,333,330	4,666,666	27,999,996	100.00	4

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;
Periode Desember 2025

Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 03 Ditjen Badan Peradilan Umum
Satuan Kerja : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Hal 3 dari 3

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	28,000,000	0	23,333,330	4,666,666	27,999,996	100.00	4
051 Pos Bantuan Hukum	28,000,000	0	23,333,330	4,666,666	27,999,996	100.00	4
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	28,000,000	0	23,333,330	4,666,666	27,999,996	100.00	4
522131 Belanja Jasa Konsultan	28,000,000	0	23,333,330	4,666,666	27,999,996	100.00	4
000017. Honorarium Advokat Piket	28,000,000	0	23,333,330	4,666,666	27,999,996	100.00	4

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AKHIR)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(03)

(402017)

Rp. 150,390,000

MAHKAMAH AGUNG

Ditjen Badan Peradilan Umum

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			150,390,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			150,390,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	447.0 Perkara, Berkas Perkara		122,390,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
1049.BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	447.0 Perkara		122,390,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			68,425,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			68,425,000	
521211	Belanja Bahan			9,884,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Penjilitan berkas perkara	447.0 PKR	22,112	9,884,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			58,541,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Alat Tulis Kantor	447.0 PKR	130,965	58,541,000	
052	Penetapan hari sidang			1,440,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,440,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			1,440,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman Surat Penetapan Hari Sidang	447.0 KEG	3,222	1,440,000	
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.			6,240,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			6,240,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			6,240,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	447.0 OK	13,960	6,240,000	
054	Pemeriksaan di sidang pengadilan			15,900,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			15,900,000	
521211	Belanja Bahan			15,900,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Konsumsi Persidangan Di Luar Jam Kerja	121.0 OK	30,496	3,690,000	
	- Konsumsi Makan Terdakwa	596.0 OK	18,599	11,085,000	
	- Konsumsi Pengamanan dari Kepolisian	55.0 OK	20,455	1,125,000	
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa			1,900,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,900,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			1,900,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pangiriman Petikan/Salinan Putusan	60.0 KEG	31,667	1,900,000	
056	Minutasi/Upaya hukum			20,585,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			20,585,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AKHIR)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
ALOKASI Rp. 150,390,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan			20,585,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Penjiliran Berkas Perkara	374.0 PKR	55,042	20,585,000	
057	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama			5,700,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			5,700,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			4,100,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman Berkas Banding	20.0 KEG	125,000	2,500,000	
	- Pengiriman Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 KEG	40,000	800,000	
	- Pengiriman Putusan Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 KEG	40,000	800,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			1,600,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 OK	40,000	800,000	
	- Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 OK	40,000	800,000	
058	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama			2,200,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,200,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			2,200,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	5.0 KEG	80,000	400,000	
	- Pengiriman Berkas Kasasi dan PK	5.0 OK	180,000	900,000	
	- Pengiriman Proses Kasasi/PK/Kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	5.0 KEG	180,000	900,000	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line]	30.0 Orang		28,000,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
1049.QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	30.0 Orang		28,000,000	
051	Pos Bantuan Hukum			28,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			28,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan			28,000,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Honorarium Advokat Piket [2 ORG x 2 JAM x 7 HARI x 10 BLN	280.0 OJ	100,000	28,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir



SADAT PRAYUDI
NIP 197407102006041003

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(01)

(401909)

Rp. 5,077,615,000

MAHKAMAH AGUNG

Badan Urusan Administrasi

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA	Program Dukungan Manajemen			5,077,615,000	
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan			5,077,615,000	
6986.EBA	Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama			5,077,315,000	
	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit			
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
6986.EBA.962	Layanan Umum	1.0 Laporan		700,000	
051	Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan			700,000	
C	Pengadaan Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel			700,000	
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel (KPPN.160-Sekayu)			700,000	RM
	- Mesin Pompa Air Dorong	1.0 UNIT	700,000	700,000	
6986.EBA.994	Layanan Perkantoran	1.0 Layanan		5,076,615,000	
001	Gaji dan Tunjangan			3,683,882,000	
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			3,683,882,000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.160-Sekayu)			1,546,029,000	RM
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1.0 THN	1,319,847,000	1,319,847,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	113,004,000	113,004,000	
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	113,178,000	113,178,000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.160-Sekayu)			52,000	RM
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.0 THN	38,000	38,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	7,000	7,000	
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	7,000	7,000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.160-Sekayu)			114,934,000	RM
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1.0 THN	98,514,000	98,514,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	8,210,000	8,210,000	
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	8,210,000	8,210,000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.160-Sekayu)			31,531,000	RM
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1.0 THN	27,063,000	27,063,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,198,000	2,198,000	
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,270,000	2,270,000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.160-Sekayu)			28,140,000	RM
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.0 THN	24,120,000	24,120,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,010,000	2,010,000	
	- Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	2,010,000	2,010,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB(005)MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORG(01)Badan Urusan Administrasi

UNIT KERJA(401909)PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

ALOKASIRp. 5,077,615,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunjangan Fungsional PNS - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	1.0 THN	1,009,350,000	1,176,090,000	RM
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunjangan PPh PNS - Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 THN	124,638,000	156,140,000	RM
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	93,812,000	93,812,000	RM
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	421,977,000	421,977,000	RM
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunjangan Umum PNS - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1.0 THN	50,000,000	55,560,000	RM
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Gaji Pokok PPPK - Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	1.0 THN	31,776,000	37,070,000	RM
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Pembulatan Gaji PPPK - Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13) - Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1.0 THN	7,000	9,000	RM
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK - Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 14)	1.0 THN	3,176,000	3,704,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(01)

(401909)

Rp. 5,077,615,000

MAHKAMAH AGUNG

Badan Urusan Administrasi

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunjangan Anak PPPK - Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14)	1.0 THN	1,270,000	1,270,000	RM
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	1.0 THN	4,200,000	4,200,000	RM
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunjangan Beras PPPK - Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 14)	1.0 THN	3,476,000	3,476,000	RM
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Uang Makan PPPK	1.0 THN	8,400,000	8,400,000	RM
002	<u>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</u>			1,392,733,000	
A	<u>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</u>			466,439,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu) - Biaya Penjilitan - Air Minum Galon - Retribusi Sampah - Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN] - Honorarium Satpam [2 ORG x 12 BLN] - Honorarium Pramubakti [5 ORG x 12 BLN] - THR Sopir [1 ORG x 1 BLN] - THR Satpam [2 ORG x 1 BLN] - THR Pramubakti [5 ORG x 1 BLN]	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	RM
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.160-Sekayu) - Spanduk - Benner	1.0 THN	6,000,000	6,000,000	RM
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.160-Sekayu) - Biaya Keperluan sehari-hari perkantoran (pegawai 32 orang)	1.0 THN	60,020,000	60,020,000	RM
B	<u>Langganan Daya dan Jasa</u>			222,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(01)

(401909)

Rp. 5,077,615,000

MAHKAMAH AGUNG

Badan Urusan Administrasi

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	Belanja Keperluan Perkantoran (KPPN.160-Sekayu) - Lisensi Vidio Conference [1 THN x 1 KEG] - Langganan Internet	1.0 THN 12.0 BLN	3,000,000 15,500,000	189,000,000 3,000,000 186,000,000	RM
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu) - Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	12.0 BLN	500,000	6,000,000 6,000,000	RM
522112	Belanja Langganan Telepon (KPPN.160-Sekayu) - Langganan telpon	12.0 BLN	1,000,000	12,000,000 12,000,000	RM
522113	Belanja Langganan Air (KPPN.160-Sekayu) - Langganan Air	12.0 BLN	916,667	11,000,000 11,000,000	RM
522141	Belanja Sewa (KPPN.160-Sekayu) - Langganan Web Hosting	1.0 THN	4,000,000	4,000,000 4,000,000	RM
C	Pemeliharaan Kantor			426,970,000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (KPPN.160-Sekayu) - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Sumatera Selatan) - Pemeilharaan Rumah Genset	2496.0 M2 1.0 THN	78,102 1,396,000	196,338,000 194,942,000 1,396,000	RM
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (KPPN.160-Sekayu) - Bahan Bakar Genset [1 UT x 1 THN] - Pemeliharaan AC VRV Outdoor (6 unit x 2 kali) - Pemeliharaan AC VRV Indoor (65 unit x 2 kali) - BBM Sewa Roda 4 - Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua) [2 UNIT x 1 THN] - Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat) - Perawatan Komputer [20 UNIT x 1 THN] - Perawatan Printer [4 UNIT x 1 THN] - Perawatan AC [6 Unit x 1 THN] - Perawatan Laptop [5 UNIT x 1 THN]	1.0 THN 6.0 Unit 65.0 Unit 1.0 UT 2.0 UT 4.0 UNIT 20.0 UT 4.0 UT 6.0 UT 5.0 UT	8,561,000 960,150 692,640 30,000,000 3,000,000 30,000,000 219,000 690,000 750,000 730,000	230,632,000 8,561,000 5,760,000 45,021,000 30,000,000 6,000,000 120,000,000 4,380,000 2,760,000 4,500,000 3,650,000	RM
D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor			100,724,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(01)

(401909)

Rp. 5,077,615,000

MAHKAMAH AGUNG

Badan Urusan Administrasi

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u>			44,324,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pakaian Dinas PPPK [1 ORG x 1 STEL]	1.0 STEL	978,000	978,000	
	- Pakaian Dinas CPNS [5 ORG x 1 STEL]	5.0 STEL	978,000	4,890,000	
	- Pakaian Dinas Hakim [7 ORG x 1 STEL]	7.0 STEL	978,000	6,846,000	
	- Pakaian Kerja Satpam (Sumatera Selatan) [2 ORG x 1 STEL]	2.0 STEL	1,630,000	3,260,000	
	- Pakaian Kerja Pramubakti [5 ORG x 1 STEL]	5.0 STEL	813,000	4,065,000	
	- Pakaian Kerja Pengemudi [1 ORG x 1 Stel]	1.0 STEL	813,000	813,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u>			56,400,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Honorarium Staf Pengelola [2 ORG x 12 BLN]	24.0 OB	350,000	8,400,000	
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,330,000	15,960,000	
	- Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola Pnbp [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	300,000	3,600,000	
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran [1 OPRG x 12 BLN]	12.0 OB	470,000	5,640,000	
	- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	530,000	6,360,000	
	- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]	12.0 OB	1,370,000	16,440,000	
E	<i>Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim dan Hakim Adhoc</i>			75,600,000	RM
522141	<u>Belanja Sewa</u>			75,600,000	
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim [5 ORG x 12 BLN]	60.0 OB	1,260,000	75,600,000	RM
F	<i>Pelantikan dan Sumpah Jabatan</i>			1,200,000	
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>			1,200,000	
	(KPPN.160-Sekayu)				RM
	- Jasa Rohaniawan [1 ORG x 4 KEG x 1 THN]	4.0 OK	300,000	1,200,000	
G	<i>Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding/Tingkat Pertama</i>			80,600,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			80,600,000	A RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Penginapan [4 ORG x 1 HARI x 20 KEG]	80.0 OH	207,500	16,600,000	
	- Transportasi [4 ORG x 1 PP x 20 KEG]	80.0 OK	200,000	16,000,000	A RM
	- Uang Harian [4 ORG x 2 HARI x 20 KEG]	160.0 OH	300,000	48,000,000	
H	<i>Konsultasi ke KPPN/KANWIL DJPb/KPKNL/KANWIL DJKN/BKN/BKD</i>			19,200,000	
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>			19,200,000	A RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Uang Harian [2 ORG x 2 Hari x 12 KEG]	48.0 OH	300,000	14,400,000	
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 12 KEG]	24.0 OH	100,000	2,400,000	
	- Transportasi [2 ORG x 1 PP x 12 KEG]	24.0 OK	100,000	2,400,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(01)

(401909)

Rp. 5,077,615,000

MAHKAMAH AGUNG

Badan Urusan Administrasi

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6986.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	1.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		300,000	RM
6986.EBD.953	Lokasi : KAB. BANYUASIN Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.0 Dokumen		300,000	
051	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			300,000	
A	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi			300,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.160-Sekayu) - Cetak Bahan Pemantauan dan Evaluasi	1.0 KEG	300,000	300,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir



PANGKALAN BALAI 26 Februari 2026

SADAT PRAYUDI
NIP 197407102006041003

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(03)

(402017)

Rp. 151,990,000

MAHKAMAH AGUNG

Ditjen Badan Peradilan Umum

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			151,990,000	
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			151,990,000	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]	447.0 Perkara, Berkas Perkara		123,990,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
1049.BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	447.0 Perkara		123,990,000	
051	Pendaftaran Berkas Perkara			48,985,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			48,985,000	
521211	Belanja Bahan			6,705,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Penjilitan berkas perkara	447.0 PKR	15,000	6,705,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			42,280,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Alat Tulis Kantor	447.0 PKR	94,587	42,280,000	
052	Penetapan hari sidang			35,760,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			35,760,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			35,760,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman Surat Penetapan Hari Sidang	447.0 KEG	80,000	35,760,000	
053	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan.			2,400,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,400,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			2,400,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	60.0 OK	40,000	2,400,000	
054	Pemeriksaan di sidang pengadilan			20,940,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			20,940,000	
521211	Belanja Bahan			20,940,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Konsumsi Makan Terdakwa	447.0 OK	20,000	8,940,000	
	- Konsumsi Pengamanan dari Kepolisian	480.0 OK	25,000	12,000,000	
055	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa			2,400,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,400,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat			2,400,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan	60.0 KEG	40,000	2,400,000	
056	Minutasi/Upaya hukum			6,705,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			6,705,000	
521211	Belanja Bahan			6,705,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Penjilitan Berkas Perkara	447.0 PKR	15,000	6,705,000	

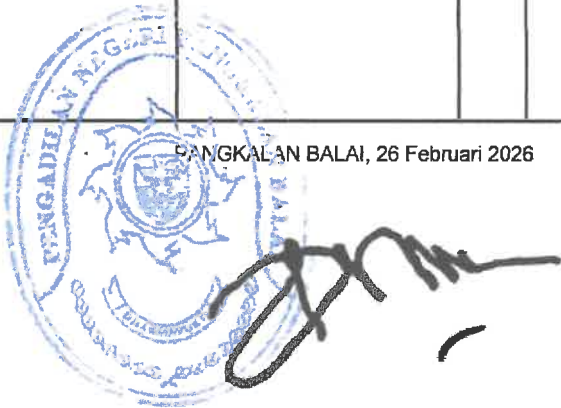
RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AWAL)

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
ALOKASI Rp. 151,990,000

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
057	Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama			5,600,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			5,600,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			2,400,000	RM
	- Pengiriman Berkas Banding	20.0 KEG	40,000	800,000	
	- Pengiriman Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 KEG	40,000	800,000	
	- Pengiriman Putusan Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 KEG	40,000	800,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.160-Sekayu)			3,200,000	A
	- Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 OK	80,000	1,600,000	*
	- Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa	20.0 OK	80,000	1,600,000	*
058	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama			1,200,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			1,200,000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (KPPN.160-Sekayu)			1,200,000	RM
	- Pengiriman Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	5.0 KEG	80,000	400,000	
	- Pengiriman Berkas Kasasi dan PK	5.0 OK	80,000	400,000	
	- Pengiriman Proses Kasasi/PK/Kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum	5.0 KEG	80,000	400,000	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line]	30.0 Orang		28,000,000	
	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
1049.QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum	30.0 Orang		28,000,000	
051	Pos Bantuan Hukum			28,000,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			28,000,000	
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.160-Sekayu)			28,000,000	RM
	- Honorarium Advokat Piket [2 ORG x 2 JAM x 7 HARI x 10 BLN	280.0 OJ	100,000	28,000,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

PANGKALAN BALAI, 26 Februari 2026



SADAT PRAYUDI
NIP 197407102006041003

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AKHIR)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(01)

(401909)

Rp. 5,882,899,000

MAHKAMAH AGUNG

Badan Urusan Administrasi

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
005.01.WA 6986 6986.EBA	Program Dukungan Manajemen Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base-Line]	2.0 Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		5,882,899,000 5,882,899,000 5,882,599,000	
6986.EBA.962 051 C 521252	Lokasi : KAB. BANYUASIN Layanan Umum Dukungan Manajemen Non Operasional Pengadilan Pengadaan Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel (KPPN.160-Sekayu) - Mesin Pompa Air Dorong	1.0 Laporan 1.0 UNIT 1.0 Layanan		700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000	RM
6986.EBA.994 001 A 511111	Layanan Perkantoran Gaji dan Tunjangan Pembayaran gaji dan tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Gaji Pokok PNS - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	700,000 1,509,350,000 103,219,000 106,236,000	5,881,899,000 4,499,413,000 4,499,413,000 1,718,805,000	U RM
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Pembulatan Gaji PNS - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	38,000 6,000 6,000	38,000 6,000 6,000	RM
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	101,514,000 6,862,000 7,189,000	101,514,000 6,862,000 7,189,000	RM
511122	Belanja Tunj. Anak PNS (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunj. Anak PNS - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	28,365,000 2,142,000 2,283,396	28,365,000 2,142,000 2,283,000	RM
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunjangan Struktural PNS - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1.0 THN 1.0 BLN 1.0 BLN	25,010,000 1,520,000 2,010,000	25,010,000 1,520,000 2,010,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AKHIR)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(01)

(401909)

Rp. 5,882,899,000

MAHKAMAH AGUNG

Badan Urusan Administrasi

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511124	<u>Belanja Tunj. Fungsional PNS</u>			208,940,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS	1.0 THN	200,000,000	200,000,000	
	- Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	1.0 THN	4,470,000	4,470,000	
511125	<u>Belanja Tunj. PPh PNS</u>			12,799,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunjangan PPh PNS	1.0 THN	6,645,796	6,645,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	3,026,000	3,026,000	
511126	<u>Belanja Tunj. Beras PNS</u>			91,312,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunj Beras PNS	1.0 THN	91,312,000	91,312,000	
	- Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	1.0 BLN	3,128,000	3,128,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u>			242,956,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Uang Makan PNS	1.0 THN	242,956,000	242,956,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 BLN	1,100,000	1,100,000	
511151	<u>Belanja Tunjangan Umum PNS</u>			23,165,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1.0 THN	20,970,000	20,970,000	
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1.0 BLN	1,100,000	1,100,000	
511324	<u>Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara</u>			225,608,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara (Gaji ke-13)	1.0 BLN	25,994,000	25,994,000	
	- Belanja Tunjangan PPh Pejabat Negara (Gaji ke-14)	1.0 BLN	25,625,151	25,625,000	
511339	<u>Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara</u>			1,644,551,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (Gaji ke-14)	1.0 BLN	85,000,000	85,000,000	
	- Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara (Gaji ke-13)	1.0 BLN	85,000,000	85,000,000	
511611	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u>			105,671,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	1.0 THN	99,941,200	99,941,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,867,000	2,867,000	
	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u>			2,863,000	
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	1.0 THN	99,941,200	99,941,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,867,000	2,867,000	
	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u>			2,863,000	
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	1.0 THN	99,941,200	99,941,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,867,000	2,867,000	
	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u>			2,863,000	
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	1.0 THN	99,941,200	99,941,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,867,000	2,867,000	
	<u>Belanja Gaji Pokok PPPK</u>			2,863,000	
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Belanja Gaji Pokok PPPK	1.0 THN	99,941,200	99,941,000	
	- Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	1.0 BLN	2,867,000	2,867,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AKHIR)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(01)

(401909)

Rp. 5,882,899,000

MAHKAMAH AGUNG

Badan Urusan Administrasi

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511619	<u>Belanja Pembulatan Gaji PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Pembulatan Gaji PPPK - Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13) - Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)			9,000	RM
		1.0 THN	7,000	7,000	
		1.0 BLN	1,000	1,000	
		1.0 BLN	1,000	1,000	
511621	<u>Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK - Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Suami/Istri PPK (gaji ke 14)			5,884,000	RM
		1.0 THN	5,876,000	5,876,000	
		1.0 BLN	4,000	4,000	
		1.0 BLN	4,000	4,000	
511622	<u>Belanja Tunjangan Anak PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunjangan Anak PPPK - Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Anak PPPK (gaji ke 14)			1,382,000	RM
		1.0 THN	1,372,000	1,372,000	
		1.0 BLN	5,000	5,000	
		1.0 BLN	5,000	5,000	
511624	<u>Belanja Tunjangan Fungsional PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)			4,900,000	RM
		1.0 THN	4,200,000	4,200,000	
		1.0 BLN	350,000	350,000	
		1.0 BLN	350,000	350,000	
511625	<u>Belanja Tunjangan Beras PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunjangan Beras PPPK - Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 13) - Belanja Tunjangan Beras PPPK (gaji ke 14)			5,516,000	RM
		1.0 THN	5,362,000	5,362,000	
		1.0 BLN	77,000	77,000	
		1.0 BLN	77,000	77,000	
511628	<u>Belanja Uang Makan PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Uang Makan PPPK			24,570,000	RM
		1.0 THN	24,570,000	24,570,000	
511633	<u>Belanja Tunjangan Umum PPPK</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja Tunjangan Umum PPPK [0 ORG x 0 BLN]			6,400,000	RM
		5.0 BLN	1,280,000	6,400,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1,382,486,000	U
A	<i>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</i>			419,965,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AKHIR)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(01)

(401909)

Rp. 5,882,899,000

MAHKAMAH AGUNG

Badan Urusan Administrasi

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu) - Jasa Petugas Kebersihan - Biaya Penjilitan - Air Minum Galon - Retribusi Sampah - Honorarium Sopir [1 ORG x 12 BLN] - Honorarium Satpam [2 ORG x 12 BLN] - Honorarium Pramubakti [5 ORG x 12 BLN] - THR Sopir [1 ORG x 1 BLN] - THR Satpam [2 ORG x 1 BLN] - THR Pramubakti [5 ORG x 1 BLN]	2.0 BULAN	9,054,500	309,377,000	RM
				18,109,000	
		1.0 THN	290,000	290,000	
		1.0 THN	7,915,500	7,915,000	
		12.0 KEG	150,000	1,800,000	
		12.0 OB	2,620,667	31,448,000	
		24.0 OB	2,620,667	62,896,000	
		60.0 OB	2,620,934	157,256,000	
		1.0 OB	3,931,000	3,931,000	
		2.0 OB	3,931,000	7,862,000	
		5.0 OB	3,574,000	17,870,000	
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.160-Sekayu) - Spanduk - Benner - Pembelian Plakat, Kunci, Dll	1.0 THN	5,998,000	58,779,000	RM
		1.0 THN	4,968,000	5,998,000	
		1.0 THN	47,813,425	4,968,000	
521811	<u>Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi</u> (KPPN.160-Sekayu) - Biaya Keperluan sehari-hari perkantoran (pegawai 32 orang)	1.0 THN	51,809,000	51,809,000	RM
B	Langganan Daya dan Jasa			51,809,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu) - Lisensi Vidio Conference [1 THN x 1 KEG] - Langganan Internet	1.0 THN	3,000,000	212,370,000	RM
		12.0 BLN	15,500,000	189,000,000	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.160-Sekayu) - Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	12.0 BLN	177,667	2,132,000	RM
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.160-Sekayu) - Langganan telpon	12.0 BLN	855,250	10,263,000	RM
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.160-Sekayu) - Langganan Air	12.0 BLN	583,350	7,000,000	RM
522141	<u>Belanja Sewa</u> (KPPN.160-Sekayu) - Langganan Web Hosting	1.0 THN	3,975,000	3,975,000	RM
C	Pemeliharaan Kantor			477,322,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AKHIR)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(01)

(401909)

Rp. 5,882,899,000

MAHKAMAH AGUNG

Badan Urusan Administrasi

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.160-Sekayu) - Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat (Sumatera Selatan) - Pemeliharaan Rumah Genset	2496.0 M2 1.0 THN	111,991 2,000	279,531,000 279,529,000 2,000	RM
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.160-Sekayu) - Bahan Bakar Genset [1 UT x 1 THN] - Pemeliharaan AC VRV Outdoor (6 unit x 2 kali) - Pemeliharaan AC VRV Indoor (65 unit x 2 kali) - BBM Sewa Roda 4 - Pemeliharaan Kendaraan roda 2 (dua) [2 UNIT x 1 THN] - Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 (empat) - Perawatan Komputer [20 UNIT x 1 THN] - Perawatan Printer [4 UNIT x 1 THN] - Perawatan AC [6 Unit x 1 THN] - Perawatan Laptop [5 UNIT x 1 THN]	1.0 THN 6.0 Unit 65.0 Unit 1.0 UT 2.0 UT 2.0 UNIT 20.0 UT 4.0 UT 6.0 UT 5.0 UT	11,728,000 945,580 692,525 25,500,000 2,595,000 40,645,000 365,000 1,940,000 781,450 729,600	11,728,000 5,673,000 45,014,000 25,500,000 5,190,000 81,290,000 7,300,000 7,760,000 4,688,000 3,648,000	RM
D	<u>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</u>			108,030,000	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.160-Sekayu) - Pakaian Dinas PPPK [1 ORG x 1 STEL] - Pakaian Dinas CPNS [5 ORG x 1 STEL] - Pakaian Dinas Hakim [7 ORG x 1 STEL] - Pakaian Kerja Satpam (Sumatera Selatan) [2 ORG x 1 STEL] - Pakaian Kerja Pramubakti [5 ORG x 1 STEL] - Pakaian Kerja Pengemudi [1 ORG x 1 Stel] - Pakaian Dinas Pegawai [24 ORG x 1 STEL] - Pajak Kendaraan Bermotor	1.0 STEL 5.0 STEL 7.0 STEL 2.0 STEL 5.0 STEL 1.0 STEL 24.0 STEL 1.0 THN	978,000 978,000 978,000 1,630,000 813,000 813,000 978,000 5,386,075	978,000 4,890,000 6,846,000 3,260,000 4,065,000 813,000 23,472,000 5,386,000	RM
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.160-Sekayu) - Honorarium Staf Pengelola [2 ORG x 12 BLN] - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12 BLN] - Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp [1 ORG x 12 BLN] - Honorarium Bendahara Pengeluaran [1 OPRG x 12 BLN] - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Sprn [1 ORG x 4 BLN] - Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN]	24.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 4.0 OB 12.0 OB	390,000 1,510,000 300,000 520,000 600,000 1,550,000	9,360,000 18,120,000 3,600,000 6,240,000 2,400,000 18,600,000	RM
E	<u>Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim dan Hakim Adhoc</u>			113,400,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025 (DIPA AKHIR)

KEMEN/LEMB

UNIT ORG

UNIT KERJA

ALOKASI

(005)

(01)

(401909)

Rp. 5,882,899,000

MAHKAMAH AGUNG

Badan Urusan Administrasi

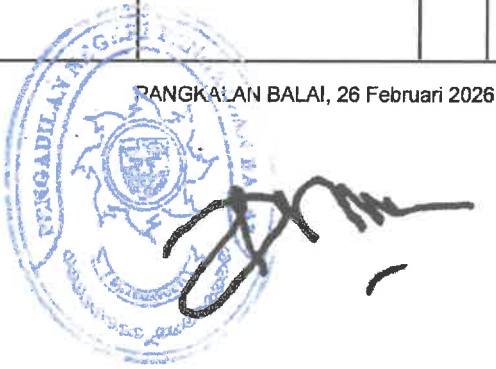
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2025			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522141	Belanja Sewa			113,400,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Bantuan Sewa Rumah Dinas Hakim [5 ORG x 12 BLN]	60.0 OB	1,890,000	113,400,000	
F	Pelantikan dan Sumpah Jabatan			1,500,000	RM
522191	Belanja Jasa Lainnya			1,500,000	
	(KPPN.160-Sekayu)				
G	- Jasa Rohaniawan [1 ORG x 5 KEG x 1 THN]	5.0 OK	300,000	1,500,000	RM
	Konsultasi ke Pusat/Tingkat Banding/Tingkat Pertama			38,544,000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			38,544,000	
524111	(KPPN.160-Sekayu)				RM
H	- Penginapan [4 ORG x 1 HARI x 10 KEG]	40.0 OH	153,580	6,143,000	
	- Transportasi [4 ORG x 1 PP x 10 KEG]	40.0 OK	209,030	8,361,000	
	- Uang Harian [4 ORG x 2 HARI x 10 KEG]	80.0 OH	300,500	24,040,000	
	Konsultasi ke KPPN/KANWIL DJPb/KPKNL/KANWIL DJKN/BKN/BKD			11,355,000	RM
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			11,355,000	
	(KPPN.160-Sekayu)				
6986.EBD	- Uang Harian [2 ORG x 2 Hari x 9 KEG]	36.0 OH	211,112	7,600,000	RM
	- Penginapan [2 ORG x 1 HARI x 12 KEG]	24.0 OH	64,167	1,540,000	
	- Transportasi [2 ORG x 1 PP x 12 KEG]	24.0 OK	92,292	2,215,000	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	1.0 Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		300,000	RM

	Lokasi : KAB. BANYUASIN				
6986.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.0 Dokumen		300,000	RM
051	Layanan Pemantauan dan Evaluasi			300,000	
A	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi			300,000	
521211	Belanja Bahan			300,000	RM
	(KPPN.160-Sekayu)				
	- Cetak Bahan Pemantauan dan Evaluasi	1.0 KEG	300,000	300,000	

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

PANGKALAN BALAI, 26 Februari 2026



SADAT PRAYUDI
NIP 197407102006041003

sadewa

Dashboard

Monitoring

Pengelolaan BMN

Pengadaan Barang

Penatausahaan

1A, 2025

Data Rekapitulasi Indeks Pengelolaan Aset

Reload Table

No	Satuan Kerja	1	Rekapitulasi IPA	Aksi
#	Satuan Kerja		Semua	
1	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI Kode Satker : 00501100401909000KD	Rekapitulasi Indeks Pengelolaan Aset		
		Parameter 1 - Penatausahaan Barang Milik Negara (Bobot 20%)		
		• Sub Parameter 1 - Kesesuaian & kelengkapan transaksi BMN (Bobot 12%)		4 Sangat Baik Indeks = 4 × 12% = 0.48
		• Sub Parameter 2 - Penjelasan Telaah Data BMN (Bobot 8%)		4 Sangat Baik Indeks = 4 × 8% = 0.32
		Parameter 2 - Realisasi PNBP Pengelolaan Aset (Bobot 15%)		
		• Sub Parameter 1 - Realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN (Bobot 7.5%)		1 Buruk Indeks = 1 × 7.5% = 0.075
		• Sub Parameter 2 - Realisasi PNBP berdasar penetapan pengguna barang (Bobot 7.5%)		3 Baik Indeks = 3 × 7.5% = 0.225
		Parameter 3 - Ketepatan waktu dokumen RKBMN (Bobot 25%)		
		• Sub Parameter 1 - Ketepatan waktu usulan RKBMN (Bobot 7.5%)		3 Baik Indeks = 3 × 7.5% = 0.225
		• Sub Parameter 2 - Ketepatan waktu LBKP (Bobot 7.5%)		3 Baik Indeks = 3 × 7.5% = 0.225
		• Sub Parameter 3 - Ketepatan & kelengkapan Wasdal (Bobot 10%)		3 Baik Indeks = 3 × 10% = 0.3
		Parameter 4 - Tindak lanjut pemanfaatan BMN (Bobot 10%)		
		Parameter 5 - Tindak lanjut BMN yg dihentikan penggunaannya (Bobot 10%)		2 Cukup Indeks = 2 × 10% = 0.2
		Parameter 6 - BMN memiliki dokumen kepemilikan (Bobot 10%)		1 Buruk Indeks = 1 × 10% = 0.1
		Parameter 7 - Penggunaan BMN sesuai ketentuan (Bobot 10%)		4 Sangat Baik Indeks = 4 × 10% = 0.4
TOTAL NILAI INDIKATOR PENILAIAN ASET (IPA)			2.95	